

REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, Telepon (021) 7260864, Faksimili (021) 7392786

PENGUMUMAN Nomor: KP.02.01-Mn/2621.1

TENTANG

PENGADAAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT UNTUK JABATAN FUNGSIONAL TEKNIS TAHUN 2022

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 338 Tahun 2022 Tanggal 19 Agustus 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2022, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia untuk dapat mengikuti seleksi pengadaan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Jabatan Fungsional Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1. Jumlah kebutuhan tenaga teknis sebanyak 2.706 (dua ribu tujuh ratus enam) orang, dengan rincian kebutuhan jabatan, kualifikasi pendidikan, persyaratan umum, persyaratan wajib tambahan, persyaratan sertifikasi, dan keterangan lainnya sebagaimana dapat dilihat pada lampiran pengumuman ini.
- 2. Periode pendaftaran dibuka tanggal **21 Desember 2022 sampai dengan 06 Januari 2023** secara *online* melalui *website* **https://sscasn.bkn.go.id**
- 3. Seluruh informasi terkait proses Pengadaan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Jabatan Fungsional Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dapat dilihat di *website* Sistem Seleksi Aparatur Sipil Negara Nasional (https://sscasn.bkn.go.id) dan website Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (https://setjen.pu.go.id/bko).
- 4. Seluruh tahapan dalam proses seleksi pengadaan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) **tidak dipungut biaya**.

Demikian pengumuman ini kami sampaikan, untuk menjadi perhatian.

Jakarta, 20 Desember 2022

a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT SekretarisJenderal,

Cap.Ttd

Mohammad Zainal Fatah NIP.196610211996031001

Nomor : KP.02.01-Mn/2621.1 Tanggal : 20 Desember 2022

INFORMASI ALOKASI KEBUTUHAN SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT UNTUK JABATAN FUNGSIONAL TENAGA TEKNIS TAHUN 2022

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	JUMLAH	MASA HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
JUML	AH KEBUTUHAN SELUF	RUHNYA		2706		
1	Analis Kebijakan Ahli Pertama	S.1 Administrasi Publik/S.1 Kebijakan Publik/S.1 Manajemen/S.1 Ekonomi/S.1 Administrasi Negara	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta - Jawa Barat, Direktorat Jenderal Bina Marga	3	Paling lama 5 (lima) tahun	
2	Analis Kebijakan Ahli Pertama	S.1 Administrasi Publik/S.1 Kebijakan Publik/S.1 Manajemen/S.1 Ekonomi/S.1 Administrasi Negara	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah - DI Yogyakarta, Direktorat Jenderal Bina Marga	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
3	Analis Kebijakan Ahli Pertama	S.1 Administrasi Publik/S.1 Kebijakan Publik/S.1 Manajemen/S.1 Ekonomi/S.1 Administrasi Negara	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur - Bali, Direktorat Jenderal Bina Marga	3	Paling lama 5 (lima) tahun	
4	Analis Kebijakan Ahli Pertama	S.1 Administrasi Publik/S.1 Kebijakan Publik/S.1 Manajemen/S.1 Ekonomi/S.1 Administrasi Negara	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
5	Analis Kebijakan Ahli Pertama	S.1 Administrasi Publik/S.1 Kebijakan Publik/S.1 Manajemen/S.1 Ekonomi/S.1 Administrasi Negara	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
6	Analis Kebijakan Ahli Pertama	S.1 Administrasi Publik/S.1 Kebijakan Publik/S.1 Manajemen/S.1 Ekonomi/S.1 Administrasi Negara	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh, Direktorat Jenderal Bina Marga	2	Paling lama 5 (lima) tahun	

7	Analis Kebijakan Ahli	S.1 Administrasi Publik/S.1	Balai Pelaksanaan Jalan	1	Paling lama 5	
'	Pertama	Kebijakan Publik/S.1	Nasional Bangka Belitung,	ı	(lima) tahun	
	Fertaina	Manajemen/S.1 Ekonomi/S.1	Direktorat Jenderal Bina		(IIIIIa) tallull	
		Administrasi Negara	Marga			
8	Analis Kebijakan Ahli	S.1 Administrasi Publik/S.1	Balai Pelaksanaan Jalan	1	Paling lama 5	
0	_	Kebijakan Publik/S.1	Nasional Banten, Direktorat	ı		
	Pertama	1 ,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		(lima) tahun	
		Manajemen/S.1 Ekonomi/S.1	Jenderal Bina Marga			
	Analia Kahiiakan Ahli	Administrasi Negara	Dalai Dalaksanasa Jalan	4	Deline lesse 5	
9	Analis Kebijakan Ahli	S.1 Administrasi Publik/S.1	Balai Pelaksanaan Jalan	1	Paling lama 5	
	Pertama	Kebijakan Publik/S.1	Nasional Bengkulu,		(lima) tahun	
		Manajemen/S.1 Ekonomi/S.1	Direktorat Jenderal Bina			
		Administrasi Negara	Marga			
10	Analis Kebijakan Ahli	S.1 Administrasi Publik/S.1	Balai Pelaksanaan Jalan	1	Paling lama 5	
	Pertama	Kebijakan Publik/S.1	Nasional Jayapura,		(lima) tahun	
		Manajemen/S.1 Ekonomi/S.1	Direktorat Jenderal Bina			
		Administrasi Negara	Marga			
11	Analis Kebijakan Ahli	S.1 Administrasi Publik/S.1	Balai Pelaksanaan Jalan	2	Paling lama 5	
	Pertama	Kebijakan Publik/S.1	Nasional Kepulauan Riau,		(lima) tahun	
		Manajemen/S.1 Ekonomi/S.1	Direktorat Jenderal Bina			
		Administrasi Negara	Marga			
12	Analis Kebijakan Ahli	S.1 Administrasi Publik/S.1	Balai Pelaksanaan Jalan	2	Paling lama 5	
	Pertama	Kebijakan Publik/S.1	Nasional Maluku, Direktorat		(lima) tahun	
		Manajemen/S.1 Ekonomi/S.1	Jenderal Bina Marga			
		Administrasi Negara				
13	Analis Kebijakan Ahli	S.1 Administrasi Publik/S.1	Direktorat Bina Teknik Jalan	2	Paling lama 5	
	Pertama	Kebijakan Publik/S.1	Dan Jembatan, Direktorat		(lima) tahun	
		Manajemen/S.1 Ekonomi/S.1	Jenderal Bina Marga			
		Administrasi Negara				
14	Analis Kebijakan Ahli	S.1 Administrasi Publik/S.1	Direktorat Jalan Bebas	4	Paling lama 5	
	Pertama	Kebijakan Publik/S.1	Hambatan, Direktorat		(lima) tahun	
		Manajemen/S.1 Ekonomi/S.1	Jenderal Bina Marga		,	
		Administrasi Negara				
15	Analis Kebijakan Ahli	S.1 Administrasi Publik/S.1	Direktorat Sistem Dan	1	Paling lama 5	
	Pertama	Kebijakan Publik/S.1	Strategi Penyelenggaraan		(lima) tahun	
		Manajemen/S.1 Ekonomi/S.1	Jalan Dan Jembatan,		[` '	
		Administrasi Negara	Direktorat Jenderal Bina			
			Marga			
16	Analis Kebijakan Ahli	S.1 Administrasi Publik/S.1	Sekretariat Direktorat	3	Paling lama 5	
	Pertama	Kebijakan Publik/S.1	Jenderal Bina Marga,	-	(lima) tahun	
		Manajemen/S.1 Ekonomi/S.1	Direktorat Jenderal Bina		(
		Administrasi Negara	Marga			
	1	i aminotraor regara	Marga			

	Analis Kebijakan Ahli Pertama Analis Kebijakan Ahli	D.IV Administrasi Negara/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen Dan Kebijakan Publik/S.1 Administrasi Negara D.IV Administrasi Negara/D.IV	Balai Bahan Dan Struktur Bangunan Gedung, Direktorat Bina Teknik Permukiman Dan Perumahan, Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Kawasan Permukiman	1	Paling lama 5 (lima) tahun Paling lama 5	
	Pertama	Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen Dan Kebijakan Publik/S.1 Administrasi Negara	Dan Perumahan, Direktorat Jenderal Cipta Karya	·	(lima) tahun	
	Analis Kebijakan Ahli Pertama	Publik/S.1 Manajemen Dan Kebijakan Publik/S.1 Administrasi Negara	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Aceh, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
	Analis Kebijakan Ahli Pertama	D.IV Administrasi Negara/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen Dan Kebijakan Publik/S.1 Administrasi Negara	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
21	Analis Kebijakan Ahli Pertama	D.IV Administrasi Negara/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen Dan Kebijakan Publik/S.1 Administrasi Negara	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Banten, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
	Analis Kebijakan Ahli Pertama	D.IV Administrasi Negara/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen Dan Kebijakan Publik/S.1 Administrasi Negara	Balai Prasarana Permukiman Wilayah D.I. Yogyakarta, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
	Analis Kebijakan Ahli Pertama	D.IV Administrasi Negara/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen Dan Kebijakan Publik/S.1 Administrasi Negara	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Gorontalo, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
	Analis Kebijakan Ahli Pertama	D.IV Administrasi Negara/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen Dan Kebijakan Publik/S.1 Administrasi Negara	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jakarta Metropolitan, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
	Analis Kebijakan Ahli Pertama	D.IV Administrasi Negara/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen Dan Kebijakan Publik/S.1 Administrasi Negara	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Barat, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	

	Analis Kebijakan Ahli Pertama	D.IV Administrasi Negara/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen Dan Kebijakan Publik/S.1 Administrasi Negara	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
27	Analis Kebijakan Ahli Pertama	D.IV Administrasi Negara/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen Dan Kebijakan Publik/S.1 Administrasi Negara	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
28	Analis Kebijakan Ahli Pertama	D.IV Administrasi Negara/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen Dan Kebijakan Publik/S.1 Administrasi Negara	Kalimantan Barat, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
29	Analis Kebijakan Ahli Pertama	D.IV Administrasi Negara/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen Dan Kebijakan Publik/S.1 Administrasi Negara	Kalimantan Selatan, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
30	Analis Kebijakan Ahli Pertama	D.IV Administrasi Negara/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen Dan Kebijakan Publik/S.1 Administrasi Negara	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Tengah, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
31	Analis Kebijakan Ahli Pertama	Publik/S.1 Manajemen Dan Kebijakan Publik/S.1 Administrasi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Timur, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
32	Analis Kebijakan Ahli Pertama	D.IV Administrasi Negara/D.IV	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Utara, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
	Analis Kebijakan Ahli Pertama	D.IV Administrasi Negara/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen Dan Kebijakan Publik/S.1 Administrasi Negara	Kepulauan Riau, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
34	Analis Kebijakan Ahli Pertama	D.IV Administrasi Negara/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen Dan Kebijakan Publik/S.1 Administrasi Negara	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Lampung, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	

	Analis Kebijakan Ahli Pertama	D.IV Administrasi Negara/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen Dan Kebijakan Publik/S.1 Administrasi Negara	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Maluku Utara, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
36	Analis Kebijakan Ahli Pertama	D.IV Administrasi Negara/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen Dan Kebijakan Publik/S.1 Administrasi Negara	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Maluku, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
37	Analis Kebijakan Ahli Pertama	Publik/S.1 Manajemen Dan Kebijakan Publik/S.1 Administrasi Negara	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Barat, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
38	Analis Kebijakan Ahli Pertama	D.IV Administrasi Negara/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen Dan Kebijakan Publik/S.1 Administrasi Negara	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Timur, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
39	Analis Kebijakan Ahli Pertama	D.IV Administrasi Negara/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen Dan Kebijakan Publik/S.1 Administrasi Negara	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua Barat, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
40	Analis Kebijakan Ahli Pertama	D.IV Administrasi Negara/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen Dan Kebijakan Publik/S.1 Administrasi Negara	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
41	Analis Kebijakan Ahli Pertama	D.IV Administrasi Negara/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen Dan Kebijakan Publik/S.1 Administrasi Negara	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Tenggara, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
42	Analis Kebijakan Ahli Pertama	D.IV Administrasi Negara/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen Dan Kebijakan Publik/S.1 Administrasi Negara	Balai Prasarana	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
43	Analis Kebijakan Ahli Pertama	D.IV Administrasi Negara/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen Dan Kebijakan Publik/S.1 Administrasi Negara	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	

44	Analis Kebijakan Ahli Pertama	D.IV Administrasi Negara/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen Dan Kebijakan Publik/S.1 Administrasi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Selatan, Direktorat Jenderal Cipta	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
45	Analis Kebijakan Ahli Pertama	Negara D.IV Administrasi Negara/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen Dan Kebijakan Publik/S.1 Administrasi	Karya Balai Sains Bangunan, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
46	Analis Kebijakan Ahli Pertama	Negara D.IV Administrasi Negara/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen Dan Kebijakan Publik/S.1 Administrasi Negara	Balai Teknologi Air Minum, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
47	Analis Kebijakan Ahli Pertama	D.IV Administrasi Negara/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen Dan Kebijakan Publik/S.1 Administrasi Negara	Balai Teknologi Sanitasi, Direktorat Sanitasi, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
48	Analis Kebijakan Ahli Pertama	S.1 Administrasi Publik/S.1 Kebijakan Publik/S.1 Manajemen/S.1 Ekonomi/S.1 Administrasi Negara	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan Dan Jembatan, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan	6	Paling lama 5 (lima) tahun	
49	Analis Kebijakan Ahli Pertama	S.1 Administrasi Publik/S.1 Kebijakan Publik/S.1 Manajemen/S.1 Ekonomi/S.1 Administrasi Negara	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan	5	Paling lama 5 (lima) tahun	
50	Analis Kebijakan Ahli Pertama	S.1 Administrasi Publik/S.1 Kebijakan Publik/S.1 Manajemen/S.1 Ekonomi/S.1 Administrasi Negara	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan	5	Paling lama 5 (lima) tahun	
51	Analis Kebijakan Ahli Pertama	S.1 Administrasi Publik/S.1 Kebijakan Publik/S.1 Manajemen/S.1 Ekonomi/S.1 Administrasi Negara	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan	7	Paling lama 5 (lima) tahun	

52	Analis Kebijakan Ahli Pertama	S.1 Administrasi Publik/S.1 Kebijakan Publik/S.1 Manajemen/S.1 Ekonomi/S.1 Administrasi Negara	Direktorat Pengembangan Sistem Dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
53	Analis Kebijakan Ahli Pertama	S.1 Administrasi Publik/S.1 Kebijakan Publik/S.1 Manajemen/S.1 Ekonomi/S.1 Administrasi Negara	Direktorat Rumah Swadaya, Direktorat Jenderal Perumahan	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
54	Analis Kebijakan Ahli Pertama	S.1 Administrasi Publik/S.1 Kebijakan Publik/S.1 Manajemen/S.1 Ekonomi/S.1 Administrasi Negara	Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan, Direktorat Jenderal Perumahan	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
55	Analis Kebijakan Ahli Pertama	D.IV Administrasi Negara/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen Dan Kebijakan Publik/S.1 Administrasi Negara	Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
56	Analis Kebijakan Ahli Pertama	D.IV Administrasi Negara/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi	Biro Perencanaan Anggaran Dan Kerja Sama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
57	Analis Kebijakan Ahli Pertama	,	Pusat Analisis Pelaksanaan Kebijakan, Sekretariat Jenderal	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
58	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	D.IV Manajemen/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen	Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	D.IV Manajemen/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen	Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	1	Paling lama 5 (lima) tahun	

60	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	D.IV Manajemen/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen	Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	D.IV Manajemen/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen	Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
62	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	D.IV Manajemen/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen	Sekretariat Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
63	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	D.IV Manajemen/D.IV Ilmu Administrasi/S.1 Manajemen/S.1 Ilmu Administrasi Publik	Balai Pendidikan Dan Pelatihan Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Wilayah III Jakarta, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
64	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	D.IV Manajemen/D.IV Ilmu Administrasi/S.1 Manajemen/S.1 Ilmu Administrasi Publik	Balai Pendidikan Dan Pelatihan Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Wilayah IX Jayapura, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
65	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	D.IV Manajemen/D.IV Ilmu Administrasi/S.1 Manajemen/S.1 Ilmu Administrasi Publik	Balai Pendidikan Dan Pelatihan Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Wilayah V Yogyakarta, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
66	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	D.IV Manajemen/D.IV Ilmu Administrasi/S.1 Manajemen/S.1 Ilmu Administrasi Publik	Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2	Paling lama 5 (lima) tahun	

67	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	D.IV Manajemen/S.1 Manajemen/S.1 Ilmu Administrasi Publik	Balai Pendidikan Dan Pelatihan Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Wilayah I Medan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
68	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	D.IV Manajemen/S.1 Manajemen/S.1 Ilmu Administrasi Publik	Balai Pendidikan Dan Pelatihan Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Wilayah IV Bandung, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
69	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	D.IV Manajemen/S.1 Manajemen/S.1 Ilmu Administrasi Publik	Balai Pendidikan Dan Pelatihan Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Wilayah VI Surabaya, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
70	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	D.IV Manajemen/S.1 Manajemen/S.1 Ilmu Administrasi Publik	Balai Pendidikan Dan Pelatihan Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Wilayah VII Banjarmasin, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
71	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	D.IV Manajemen/S.1 Manajemen/S.1 Ilmu Administrasi Publik	Balai Pendidikan Dan Pelatihan Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Wilayah VIII Makassar, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	D.IV Manajemen/S.1 Manajemen/S.1 Ilmu Administrasi Publik	Politeknik Pekerjaan Umum, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
73	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	D.IV Manajemen/S.1 Manajemen/S.1 Ilmu Administrasi Publik	Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air Dan Permukiman, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2	Paling lama 5 (lima) tahun	

74	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	D.IV Manajemen/S.1 Manajemen/S.1 Ilmu Administrasi Publik	Pusat Pengembangan Talenta, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4	Paling lama 5 (lima) tahun	
75	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	S.1 Ilmu Administrasi Publik	Balai Pendidikan Dan Pelatihan Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Wilayah II Palembang, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
76	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	S.1 Administrasi Negara	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah - DI Yogyakarta, Direktorat Jenderal Bina Marga	4	Paling lama 5 (lima) tahun	
77	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	S.1 Administrasi Negara	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur - Bali, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
78	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	S.1 Administrasi Negara	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur, Direktorat Jenderal Bina Marga	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
79	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	S.1 Administrasi Negara	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
80	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	S.1 Administrasi Negara	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	S.1 Administrasi Negara	Balai Geoteknik Terowongan Dan Struktur, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
82	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	S.1 Administrasi Negara	Balai Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
83	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	S.1 Administrasi Negara	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	

84	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	S.1 Administrasi Negara	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bangka Belitung, Direktorat Jenderal Bina Marga	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
85	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	S.1 Administrasi Negara	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Banten, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
86	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	S.1 Administrasi Negara	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bengkulu, Direktorat Jenderal Bina Marga	3	Paling lama 5 (lima) tahun	
87	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	S.1 Administrasi Negara	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Gorontalo, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
88	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	S.1 Administrasi Negara	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jambi, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
89	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	S.1 Administrasi Negara	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura, Direktorat Jenderal Bina Marga	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
90	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	S.1 Administrasi Negara	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Selatan, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
91	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	S.1 Administrasi Negara	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Utara, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
92	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	S.1 Administrasi Negara	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
93	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	S.1 Administrasi Negara	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
94	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	S.1 Administrasi Negara	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku Utara, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	

95	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	S.1 Administrasi Negara	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku, Direktorat Jenderal Bina Marga	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
96	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	S.1 Administrasi Negara	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur, Direktorat Jenderal Bina Marga	3	Paling lama 5 (lima) tahun	
97	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	S.1 Administrasi Negara	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Papua Barat, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
98	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	S.1 Administrasi Negara	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
99	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	S.1 Administrasi Negara	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tenggara, Direktorat Jenderal Bina Marga	15	Paling lama 5 (lima) tahun	
100	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	S.1 Administrasi Negara	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Utara, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
101	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	S.1 Administrasi Negara	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wamena, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
102	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	S.1 Administrasi Negara	Balai Perkerasan Dan Lingkungan Jalan, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
103	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	S.1 Administrasi Negara	Direktorat Bina Teknik Jalan Dan Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
104	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	S.1 Administrasi Negara	Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Direktorat Jenderal Bina Marga	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	S.1 Administrasi Negara	Direktorat Kepatuhan Intern, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	S.1 Administrasi Negara	Direktorat Sistem Dan Strategi Penyelenggaraan Jalan Dan Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	

Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	S.1 Administrasi Negara	Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol, Direktorat Jenderal Bina Marga	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	S.1 Administrasi Negara	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	D.IV Administrasi Negara/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen/S.1 Manajemen Dan Kebijakan Publik/S.1 Administrasi Negara	Balai Bahan Dan Struktur Bangunan Gedung, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	D.IV Administrasi Negara/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen/S.1 Manajemen Dan Kebijakan Publik/S.1 Administrasi Negara	Balai Kawasan Permukiman Dan Perumahan, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	D.IV Administrasi Negara/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen/S.1 Manajemen Dan Kebijakan Publik/S.1 Administrasi Negara	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bangka Belitung, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	D.IV Administrasi Negara/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen/S.1 Manajemen Dan Kebijakan Publik/S.1 Administrasi Negara	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jakarta Metropolitan, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	D.IV Administrasi Negara/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen/S.1 Manajemen Dan Kebijakan Publik/S.1 Administrasi Negara	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Selatan, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	D.IV Administrasi Negara/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen/S.1 Manajemen Dan Kebijakan Publik/S.1 Administrasi Negara	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Tengah, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	

	_	-			
Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	Publik/S.1 Manajemen/S.1 Manajemen Dan Kebijakan Publik/S.1 Administrasi Negara	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Timur, Direktorat Jenderal Cipta Karya		Paling lama 5 (lima) tahun	
Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	D.IV Administrasi Negara/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen/S.1 Manajemen Dan Kebijakan Publik/S.1 Administrasi Negara	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua Barat, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	D.IV Administrasi Negara/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen/S.1 Manajemen Dan Kebijakan Publik/S.1 Administrasi Negara	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Utara, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	D.IV Administrasi Negara/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen/S.1 Manajemen Dan Kebijakan Publik/S.1 Administrasi Negara	Balai Teknologi Air Minum, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	Administrasi Publik/S.1 Administrasi	Balai Teknologi Sanitasi, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	D.IV Administrasi Negara/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen/S.1 Manajemen Dan Kebijakan Publik/S.1 Administrasi Negara	Direktorat Bina Penataan Bangunan, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	Publik/S.1 Manajemen/S.1	Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	

	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	D.IV Administrasi Negara/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen/S.1 Manajemen Dan Kebijakan Publik/S.1 Administrasi Negara	Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya		Paling lama 5 (lima) tahun	
123	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	D.IV Administrasi Negara/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen/S.1 Manajemen Dan Kebijakan Publik/S.1 Administrasi Negara	Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Jenderal Cipta Karya		Paling lama 5 (lima) tahun	
124	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	D.IV Administrasi Negara/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen/S.1 Manajemen Dan Kebijakan Publik/S.1 Administrasi Negara	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I, Direktorat Jenderal Perumahan		Paling lama 5 (lima) tahun	
125	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	D.IV Administrasi Negara/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen/S.1 Manajemen Dan Kebijakan Publik/S.1 Administrasi Negara	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa II, Direktorat Jenderal Perumahan		Paling lama 5 (lima) tahun	
126	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	Publik/S.1 Manajemen/S.1	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa III, Direktorat Jenderal Perumahan		Paling lama 5 (lima) tahun	
127	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	D.IV Administrasi Negara/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen/S.1 Manajemen Dan Kebijakan Publik/S.1 Administrasi Negara	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I, Direktorat Jenderal Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	D.IV Administrasi Negara/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen/S.1 Manajemen Dan Kebijakan Publik/S.1 Administrasi Negara	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan II, Direktorat Jenderal Perumahan		Paling lama 5 (lima) tahun	

129	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	Publik/S.1 Manajemen/S.1 Manajemen Dan Kebijakan Publik/S.1 Administrasi Negara	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Maluku, Direktorat Jenderal Perumahan		Paling lama 5 (lima) tahun	
130	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	D.IV Administrasi Negara/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen/S.1 Manajemen Dan Kebijakan Publik/S.1 Administrasi Negara	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nt I, Direktorat Jenderal Perumahan		Paling lama 5 (lima) tahun	
131	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	D.IV Administrasi Negara/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen/S.1 Manajemen Dan Kebijakan Publik/S.1 Administrasi Negara	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II, Direktorat Jenderal Perumahan		Paling lama 5 (lima) tahun	
132	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	Publik/S.1 Manajemen/S.1	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua I, Direktorat Jenderal Perumahan		Paling lama 5 (lima) tahun	
133	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	Publik/S.1 Manajemen/S.1	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II, Direktorat Jenderal Perumahan		Paling lama 5 (lima) tahun	
134	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	D.IV Administrasi Negara/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen/S.1 Manajemen Dan Kebijakan Publik/S.1 Administrasi Negara	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera I, Direktorat Jenderal Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	D.IV Administrasi Negara/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen/S.1 Manajemen Dan Kebijakan Publik/S.1 Administrasi Negara	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera II, Direktorat Jenderal Perumahan		Paling lama 5 (lima) tahun	

Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	D.IV Administrasi Negara/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen/S.1 Manajemen Dan Kebijakan Publik/S.1 Administrasi Negara	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III, Direktorat Jenderal Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	D.IV Administrasi Negara/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen/S.1 Manajemen Dan Kebijakan Publik/S.1 Administrasi Negara	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera IV, Direktorat Jenderal Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	D.IV Administrasi Negara/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen/S.1 Manajemen Dan Kebijakan Publik/S.1 Administrasi Negara	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V, Direktorat Jenderal Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	D.IV Administrasi Negara/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen/S.1 Manajemen Dan Kebijakan Publik/S.1 Administrasi Negara	Direktorat Kepatuhan Intern, Direktorat Jenderal Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	D.IV Administrasi Negara/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen/S.1 Manajemen Dan Kebijakan Publik/S.1 Administrasi Negara	Direktorat Rumah Khusus, Direktorat Jenderal Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	D.IV Administrasi Negara/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen/S.1 Manajemen Dan Kebijakan Publik/S.1 Administrasi Negara	Direktorat Rumah Swadaya, Direktorat Jenderal Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	D.IV Manajemen/S.1 Manajemen/S.1 Ilmu Administrasi Publik	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa IV, Direktorat Jenderal Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	D.IV Manajemen/S.1 Manajemen/S.1 Ilmu Administrasi Publik	Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan, Direktorat Jenderal Perumahan	2	Paling lama 5 (lima) tahun	

	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen Dan Kebijakan Publik/S.1 Administrasi Negara	Biro Pengelolaan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	D.IV Administrasi Negara/D.IV Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen Dan Kebijakan Publik/S.1 Administrasi Negara	Biro Umum, Sekretariat Jenderal	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	Administrasi Publik/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen Dan Kebijakan Publik/S.1 Administrasi Negara	Pusat Data Dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	<u> </u>	Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah, Sekretariat Jenderal	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
148	Arsiparis Ahli Pertama	D.IV Arsiparis/D.IV Kearsipan/S.1 Kearsipan	Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
149	Arsiparis Ahli Pertama	D.IV Arsiparis/D.IV Kearsipan/S.1 Kearsipan	Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
150	Arsiparis Ahli Pertama	D.IV Arsiparis/D.IV Kearsipan/S.1 Kearsipan	Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
151	Arsiparis Ahli Pertama	D.IV Arsiparis/D.IV Kearsipan/S.1 Kearsipan	Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah		Paling lama 5 (lima) tahun	
152	Arsiparis Ahli Pertama	D.IV Arsiparis/D.IV Kearsipan/S.1 Kearsipan	Sekretariat Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	1	Paling lama 5 (lima) tahun	

153	Arsiparis Ahli Pertama	D.IV Kearsipan/S.1 Kearsipan	Politeknik Pekerjaan Umum, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
154	Arsiparis Ahli Pertama	D.IV Kearsipan/S.1 Kearsipan	Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
155	Arsiparis Ahli Pertama	D.IV Kearsipan/S.1 Kearsipan	Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air Dan Permukiman, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
156	Arsiparis Ahli Pertama	D.IV Kearsipan/S.1 Kearsipan	Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
157	Arsiparis Ahli Pertama	D.IV Kearsipan	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta - Jawa Barat, Direktorat Jenderal Bina Marga	10	Paling lama 5 (lima) tahun	
158	Arsiparis Ahli Pertama	D.IV Kearsipan	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah - DI Yogyakarta, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
159	Arsiparis Ahli Pertama	D.IV Kearsipan	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur - Bali, Direktorat Jenderal Bina Marga	10	Paling lama 5 (lima) tahun	
160	Arsiparis Ahli Pertama	D.IV Kearsipan	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur, Direktorat Jenderal Bina Marga	3	Paling lama 5 (lima) tahun	
	Arsiparis Ahli Pertama	D.IV Kearsipan	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
162	Arsiparis Ahli Pertama	D.IV Kearsipan	Balai Geoteknik Terowongan Dan Struktur, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	

	1	T=	1 1		T=	
163	Arsiparis Ahli Pertama	D.IV Kearsipan	Balai Pelaksanaan Jalan	1	Paling lama 5	
			Nasional Aceh, Direktorat		(lima) tahun	
			Jenderal Bina Marga			
164	Arsiparis Ahli Pertama	D.IV Kearsipan	Balai Pelaksanaan Jalan	2	Paling lama 5	
		1	Nasional Banten, Direktorat		(lima) tahun	
			Jenderal Bina Marga			
			50.140.41. 2.114 Mai ga			
165	Arsiparis Ahli Pertama	D.IV Kearsipan	Balai Pelaksanaan Jalan	2	Paling lama 5	
	·	·	Nasional Bengkulu,		(lima) tahun	
			Direktorat Jenderal Bina			
			Marga			
166	Arsiparis Ahli Pertama	D.IV Kearsipan	Balai Pelaksanaan Jalan	1	Paling lama 5	
		·	Nasional Gorontalo,		(lima) tahun	
			Direktorat Jenderal Bina		<u> </u>	
			Marga			
167	Arsiparis Ahli Pertama	D.IV Kearsipan	Balai Pelaksanaan Jalan	1	Paling lama 5	
		1	Nasional Jayapura,		(lima) tahun	
			Direktorat Jenderal Bina		[
			Marga			
168	Arsiparis Ahli Pertama	D.IV Kearsipan	Balai Pelaksanaan Jalan	1	Paling lama 5	
		100000000000000000000000000000000000000	Nasional Kalimantan Barat,	-	(lima) tahun	
			Direktorat Jenderal Bina		()	
			Marga			
169	Arsiparis Ahli Pertama	D.IV Kearsipan	Balai Pelaksanaan Jalan	2	Paling lama 5	
			Nasional Kalimantan	_	(lima) tahun	
			Selatan, Direktorat Jenderal		(iiiia) tallall	
			Bina Marga			
170	Arsiparis Ahli Pertama	D.IV Kearsipan	Balai Pelaksanaan Jalan	3	Paling lama 5	
''			Nasional Kalimantan Utara,	J	(lima) tahun	
			Direktorat Jenderal Bina		(iiiia) tallall	
			Marga			
171	Arsiparis Ahli Pertama	D.IV Kearsipan	Balai Pelaksanaan Jalan	1	Paling lama 5	
'''	, a sipario / anii i ortania	2V Roardipari	Nasional Kepulauan Riau,	'	(lima) tahun	
			Direktorat Jenderal Bina		(iiiia) tanun	
172	Arsiparis Ahli Pertama	D.IV Kearsipan	Marga Balai Pelaksanaan Jalan	3	Paling lama 5	
''	misipans Anii Feriania	D.IV Nearsipari	Nasional Lampung,	J	(lima) tahun	
					(iiiiia) tallull	
			Direktorat Jenderal Bina			
170	Avainavia Abli Davisires	D IV Kaarainan	Marga	4	Daling lama 5	
173	Arsiparis Ahli Pertama	D.IV Kearsipan	Balai Pelaksanaan Jalan	Т	Paling lama 5	
1			Nasional Maluku Utara,		(lima) tahun	
1			Direktorat Jenderal Bina			
			Marga			

4=:	I	In many	12			
174	Arsiparis Ahli Pertama	D.IV Kearsipan	Balai Pelaksanaan Jalan	1	Paling lama 5	
			Nasional Maluku, Direktorat		(lima) tahun	
			Jenderal Bina Marga			
175	Arsiparis Ahli Pertama	D.IV Kearsipan	Balai Pelaksanaan Jalan	1	Paling lama 5	
			Nasional Riau, Direktorat		(lima) tahun	
			Jenderal Bina Marga			
176	Arsiparis Ahli Pertama	D.IV Kearsipan	Balai Pelaksanaan Jalan	1	Paling lama 5	
	·	· ·	Nasional Sulawesi Barat,		(lima) tahun	
			Direktorat Jenderal Bina			
			Marga			
177	Arsiparis Ahli Pertama	D.IV Kearsipan	Balai Pelaksanaan Jalan	1	Paling lama 5	
			Nasional Sulawesi Tengah,		(lima) tahun	
			Direktorat Jenderal Bina			
			Marga			
178	Arsiparis Ahli Pertama	D.IV Kearsipan	Balai Pelaksanaan Jalan	2	Paling lama 5	
., 5			Nasional Sulawesi	_	(lima) tahun	
			Tenggara, Direktorat		(mila) tarian	
			Jenderal Bina Marga			
179	Arsiparis Ahli Pertama	D.IV Kearsipan	Balai Pelaksanaan Jalan	2	Paling lama 5	
1/9	misipans Anii Ferlania	D.IV Realsipall	Nasional Sumatera Barat,	4	(lima) tahun	
			Direktorat Jenderal Bina		(iiiiia) taiiuii	
100	Arsiparis Ahli Pertama	D IV Koarsinan	Marga Direktorat Bina Teknik Jalan	1	Paling lama 5	
180	Arsiparis Arili Pertama	D.IV Kearsipan		1	-	
			Dan Jembatan, Direktorat		(lima) tahun	
			Jenderal Bina Marga			
101	Anainania Abli Dantana	D IV Kaarainar	Divolatement Inter- Deben	4	Deline less 5	
181	Arsiparis Ahli Pertama	D.IV Kearsipan	Direktorat Jalan Bebas	4	Paling lama 5	
			Hambatan, Direktorat		(lima) tahun	
400	Annin aria Abil Dant	D N/ Karasinan	Jenderal Bina Marga		Dallan Janes 5	
182	Arsiparis Ahli Pertama	D.IV Kearsipan	Direktorat Kepatuhan Intern,	1	Paling lama 5	
			Direktorat Jenderal Bina		(lima) tahun	
			Marga			
183	Arsiparis Ahli Pertama	D.IV Kearsipan	Direktorat Pembangunan	4	Paling lama 5	
			Jalan, Direktorat Jenderal		(lima) tahun	
			Bina Marga			
184	Arsiparis Ahli Pertama	D.IV Kearsipan	Direktorat Pembangunan	1	Paling lama 5	
			Jembatan, Direktorat		(lima) tahun	
			Jenderal Bina Marga			
185	Arsiparis Ahli Pertama	D.IV Kearsipan	Direktorat Preservasi Jalan	4	Paling lama 5	
			Dan Jembatan Wilayah I,		(lima) tahun	
			Direktorat Jenderal Bina			
			Marga			
	I	I .	···-·· g-·		1	

106	Arainaria Ahli Dartama	D IV Kooroinan	Direktorat Sistem Dan	1	Doling Ioma E	1
186	Arsiparis Ahli Pertama	D.IV Kearsipan	Strategi Penyelenggaraan	T	Paling lama 5 (lima) tahun	
			Jalan Dan Jembatan,		(IIIIIa) tariuri	
			Direktorat Jenderal Bina			
			Marga			
187	Arsiparis Ahli Pertama	D.IV Kearsipan	Sekretariat Badan Pengatur	1	Paling lama 5	
	·	·	Jalan Tol, Direktorat		(lima) tahun	
			Jenderal Bina Marga			
100	A ALUED /	D 11/4			D !!	
188	Arsiparis Ahli Pertama	D.IV Kearsipan	Sekretariat Direktorat	1	Paling lama 5	
			Jenderal Bina Marga,		(lima) tahun	
			Direktorat Jenderal Bina Marga			
189	Arsiparis Ahli Pertama	D.IV Arsiparis/D.IV Kearsipan/S.1	Direktorat Prasarana	1	Paling lama 5	
		Arsiparis/S.1 Kearsipan	Strategis, Direktorat		(lima) tahun	
		, worker of the real or pair.	Jenderal Cipta Karya		(
190	Arsiparis Ahli Pertama	S.1 Administrasi Publik/S.1	Direktorat Pelaksanaan	1	Paling lama 5	
	·	Kearsipan/D.IV Pengelolaan Arsip	Pembiayaan Infrastruktur		(lima) tahun	
		Dan Rekaman Informasi	Jalan Dan Jembatan,			
			Direktorat Jenderal			
			Pembiayaan Infrastruktur			
			Pekerjaan Umum Dan			
			Perumahan			
191	Arsiparis Ahli Pertama	S.1 Administrasi Publik/S.1	Direktorat Pelaksanaan	1	Paling lama 5	
		Kearsipan/D.IV Pengelolaan Arsip	Pembiayaan Infrastruktur		(lima) tahun	
		Dan Rekaman Informasi	Permukiman, Direktorat			
			Jenderal Pembiayaan			
			Infrastruktur Pekerjaan			
			Umum Dan Perumahan			
192	Arsiparis Ahli Pertama	S.1 Administrasi Publik/S.1	Direktorat Pelaksanaan	1	Paling lama 5	
		Kearsipan/D.IV Pengelolaan Arsip	Pembiayaan Infrastruktur		(lima) tahun	
		Dan Rekaman Informasi	Sda, Direktorat Jenderal			
			Pembiayaan Infrastruktur			
			Pekerjaan Umum Dan			
193	Arsiparis Ahli Pertama	S.1 Administrasi Publik/S.1	Perumahan Direktorat Pelaksanaan	1	Paling lama 5	
193	Aisipans Aill Foliaina	Kearsipan/D.IV Pengelolaan Arsip	Pembiayaan Perumahan,	'	(lima) tahun	
		Dan Rekaman Informasi	Direktorat Jenderal		(mina) tanun	
			Pembiayaan Infrastruktur			
			Pekerjaan Umum Dan			
			Perumahan			
L			i Gramanan		1	

404	Anata aria Alak B	0.4 Administration (D. 1997)	Dischtanat Dam		In-Paris 5	1
	Arsiparis Ahli Pertama	S.1 Administrasi Publik/S.1 Kearsipan/D.IV Pengelolaan Arsip Dan Rekaman Informasi	Direktorat Perumusan Kebijakan Dan Evaluasi, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
195	Arsiparis Ahli Pertama	S.1 Administrasi Publik/S.1 Kearsipan/D.IV Pengelolaan Arsip Dan Rekaman Informasi	Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
196	Arsiparis Ahli Pertama	S.1 Manajemen/S.1 Administrasi/S.1 Sosial/S.1 Kearsipan	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I, Direktorat Jenderal Perumahan	2	Paling lama 5 (lima) tahun	S.1 Sosial yang dimaksud meliputi S.1 Ilmu Pemerintahan/Komunikasi/Ekonomi -
197	Arsiparis Ahli Pertama	S.1 Manajemen/S.1 Administrasi/S.1 Sosial/S.1 Kearsipan	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa II, Direktorat Jenderal Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	S.1 Sosial yang dimaksud meliputi S.1 Ilmu Pemerintahan/Komunikasi/Ekonomi -
198	Arsiparis Ahli Pertama	S.1 Manajemen/S.1 Administrasi/S.1 Sosial/S.1 Kearsipan	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa III, Direktorat Jenderal Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	S.1 Sosial yang dimaksud meliputi S.1 Ilmu Pemerintahan/Komunikasi/Ekonomi -
199	Arsiparis Ahli Pertama	S.1 Manajemen/S.1 Administrasi/S.1 Sosial/S.1 Kearsipan	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa IV, Direktorat Jenderal Perumahan	2	Paling lama 5 (lima) tahun	S.1 Sosial yang dimaksud meliputi S.1 Ilmu Pemerintahan/Komunikasi/Ekonomi -
200	Arsiparis Ahli Pertama	S.1 Manajemen/S.1 Administrasi/S.1 Sosial/S.1 Kearsipan	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I, Direktorat Jenderal Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	S.1 Sosial yang dimaksud meliputi S.1 Ilmu Pemerintahan/Komunikasi/Ekonomi -
201	Arsiparis Ahli Pertama	S.1 Manajemen/S.1 Administrasi/S.1 Sosial/S.1 Kearsipan	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan II, Direktorat Jenderal Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	S.1 Sosial yang dimaksud meliputi S.1 Ilmu Pemerintahan/Komunikasi/Ekonomi -

202	Arsiparis Ahli Pertama	S.1 Manajemen/S.1 Administrasi/S.1 Sosial/S.1 Kearsipan	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Maluku, Direktorat Jenderal Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	S.1 Sosial yang dimaksud meliputi S.1 Ilmu Pemerintahan/Komunikasi/Ekonomi -
203	Arsiparis Ahli Pertama	S.1 Manajemen/S.1 Administrasi/S.1 Sosial/S.1 Kearsipan	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I, Direktorat Jenderal Perumahan	2	Paling lama 5 (lima) tahun	S.1 Sosial yang dimaksud meliputi S.1 Ilmu Pemerintahan/Komunikasi/Ekonomi -
204	Arsiparis Ahli Pertama		Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II, Direktorat Jenderal Perumahan	2	Paling lama 5 (lima) tahun	S.1 Sosial yang dimaksud meliputi S.1 Ilmu Pemerintahan/Komunikasi/Ekonomi -
205	Arsiparis Ahli Pertama		Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua I, Direktorat Jenderal Perumahan	2	Paling lama 5 (lima) tahun	S.1 Sosial yang dimaksud meliputi S.1 Ilmu Pemerintahan/Komunikasi/Ekonomi -
206	Arsiparis Ahli Pertama	Sosial/S.1 Kearsipan	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II, Direktorat Jenderal Perumahan	2	Paling lama 5 (lima) tahun	S.1 Sosial yang dimaksud meliputi S.1 Ilmu Pemerintahan/Komunikasi/Ekonomi -
207	Arsiparis Ahli Pertama	S.1 Manajemen/S.1 Administrasi/S.1 Sosial/S.1 Kearsipan	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera I, Direktorat Jenderal Perumahan	2	Paling lama 5 (lima) tahun	S.1 Sosial yang dimaksud meliputi S.1 Ilmu Pemerintahan/Komunikasi/Ekonomi -
208	Arsiparis Ahli Pertama	S.1 Manajemen/S.1 Administrasi/S.1 Sosial/S.1 Kearsipan	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera II, Direktorat Jenderal Perumahan	3	Paling lama 5 (lima) tahun	S.1 Sosial yang dimaksud meliputi S.1 Ilmu Pemerintahan/Komunikasi/Ekonomi -
209	Arsiparis Ahli Pertama	S.1 Manajemen/S.1 Administrasi/S.1 Sosial/S.1 Kearsipan	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III, Direktorat Jenderal Perumahan	2	Paling lama 5 (lima) tahun	S.1 Sosial yang dimaksud meliputi S.1 Ilmu Pemerintahan/Komunikasi/Ekonomi -
210	Arsiparis Ahli Pertama	Sosial/S.1 Kearsipan	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera IV, Direktorat Jenderal Perumahan	2	Paling lama 5 (lima) tahun	S.1 Sosial yang dimaksud meliputi S.1 Ilmu Pemerintahan/Komunikasi/Ekonomi -

211	Arsiparis Ahli Pertama	S.1 Manajemen/S.1 Administrasi/S.1 Sosial/S.1 Kearsipan	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V, Direktorat Jenderal Perumahan	2	Paling lama 5 (lima) tahun	S.1 Sosial yang dimaksud meliputi S.1 Ilmu Pemerintahan/Komunikasi/Ekonomi -
212	Arsiparis Ahli Pertama	S.1 Manajemen/S.1 Administrasi/S.1 Sosial/S.1 Kearsipan	Direktorat Kepatuhan Intern, Direktorat Jenderal Perumahan	2	Paling lama 5 (lima) tahun	S.1 Sosial yang dimaksud meliputi S.1 Ilmu Pemerintahan/Komunikasi/Ekonomi -
213	Arsiparis Ahli Pertama	S.1 Manajemen/S.1 Administrasi/S.1 Sosial/S.1 Kearsipan	Direktorat Rumah Khusus, Direktorat Jenderal Perumahan	3	Paling lama 5 (lima) tahun	S.1 Sosial yang dimaksud meliputi S.1 Ilmu Pemerintahan/Komunikasi/Ekonomi -
214	Arsiparis Ahli Pertama	S.1 Manajemen/S.1 Administrasi/S.1 Sosial/S.1 Kearsipan	Direktorat Rumah Susun, Direktorat Jenderal Perumahan	2	Paling lama 5 (lima) tahun	S.1 Sosial yang dimaksud meliputi S.1 Ilmu Pemerintahan/Komunikasi/Ekonomi -
215	Arsiparis Ahli Pertama	S.1 Manajemen/S.1 Administrasi/S.1 Sosial/S.1 Kearsipan	Direktorat Rumah Umum Dan Komersial, Direktorat Jenderal Perumahan	3	Paling lama 5 (lima) tahun	S.1 Sosial yang dimaksud meliputi S.1 Ilmu Pemerintahan/Komunikasi/Ekonomi -
216	Arsiparis Ahli Pertama	S.1 Manajemen/S.1 Administrasi/S.1 Sosial/S.1 Kearsipan	Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan, Direktorat Jenderal Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	S.1 Sosial yang dimaksud meliputi S.1 Ilmu Pemerintahan/Komunikasi/Ekonomi -
217	Arsiparis Ahli Pertama	S.1 Kearsipan/S.1 Kesekretariatan/S.1 Manajemen Administrasi	Biro Pengelolaan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
218	Arsiparis Ahli Pertama	S.1 Kearsipan/S.1 Kesekretariatan/S.1 Manajemen	Biro Perencanaan Anggaran Dan Kerja Sama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
219	Arsiparis Ahli Pertama	S.1 Manajemen/S.1 Administrasi/S.1 Sosial/S.1 Kearsipan	Pusat Analisis Pelaksanaan Kebijakan, Sekretariat Jenderal	1	Paling lama 5 (lima) tahun	S.1 Sosial yang dimaksud meliputi S.1 Ilmu Pemerintahan/Komunikasi/Ekonomi -
220	Asesor SDM Aparatur Ahli Pertama	S.1 Psikologi	Balai Penilaian Kompetensi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	Paling lama 5 (lima) tahun	

	Asesor SDM Aparatur Ahli Pertama	S.1 Psikologi	Pusat Pengembangan Talenta, Badan Pengembangan Sumber	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
222	Pembina Jasa Konstruksi	D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik	Daya Manusia Balai Jasa Konstruksi	3	Paling lama 5	
	Ahli Pertama	Sipil/D.IV Jasa Konstruksi/D.IV Manajemen Proyek Konstruksi	Wilayah I Aceh, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	3	(lima) tahun	
	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama	D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Sipil/D.IV Jasa Konstruksi/D.IV Manajemen Proyek Konstruksi	Balai Jasa Konstruksi Wilayah II Palembang, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	3	Paling lama 5 (lima) tahun	
	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama	D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Sipil/D.IV Jasa Konstruksi/D.IV Manajemen Proyek Konstruksi	Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Jakarta, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	3	Paling lama 5 (lima) tahun	
	Ahli Pertama	D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Sipil/D.IV Jasa Konstruksi/D.IV Manajemen Proyek Konstruksi	Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	3	Paling lama 5 (lima) tahun	
	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama	D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Sipil/D.IV Jasa Konstruksi/D.IV Manajemen Proyek Konstruksi	Direktorat Bina Kelembagaan Dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama	D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Sipil/D.IV Jasa Konstruksi/D.IV Manajemen Proyek Konstruksi	Direktorat Keberlanjutan Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	5	Paling lama 5 (lima) tahun	
228	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama	D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Sipil/D.IV Jasa Konstruksi/D.IV Manajemen Proyek Konstruksi	Direktorat Kompetensi Dan ProduktlVltas Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	3	Paling lama 5 (lima) tahun	
229	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama	D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Sipil/D.IV Jasa Konstruksi/D.IV Manajemen Proyek Konstruksi	Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	3	Paling lama 5 (lima) tahun	
	Ahli Pertama	D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Sipil/D.IV Jasa Konstruksi/D.IV Manajemen Proyek Konstruksi	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi		Paling lama 5 (lima) tahun	
	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama	D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Sipil/D.IV Jasa Konstruksi/D.IV Manajemen Proyek Konstruksi	Sekretariat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	3	Paling lama 5 (lima) tahun	

	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	Lingkungan/D.IV Hukum/D.IV Teknik Arsitektur/D.IV Administrasi Publik/D.IV Perencanaan Wilayah Dan Kota/D.IV Teknik Sipil/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen/S.1 Hukum/S.1 Teknik Arsitektur/S.1 Teknik Sipil/S.1 Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Teknik Lingkungan/S.1 Ekonomi Studi Pembangunan	Balai Pendidikan Dan Pelatihan Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Wilayah I Medan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	Paling lama 5 (lima) tahun	D.IV Hukum yang dimaksud adalah S.1/D-IV Hukum Umum S.1 Hukum yang dimaksud adalah S.1/D-IV Hukum Umum
233	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	D.IV Manajemen/D.IV Teknik Lingkungan/D.IV Hukum/D.IV Teknik Arsitektur/D.IV Administrasi Publik/D.IV Perencanaan Wilayah Dan Kota/D.IV Teknik Sipil/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen/S.1 Hukum/S.1 Teknik Arsitektur/S.1 Teknik Sipil/S.1 Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Teknik Lingkungan/S.1 Ekonomi Studi Pembangunan	Balai Pendidikan Dan Pelatihan Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Wilayah II Palembang, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	Paling lama 5 (lima) tahun	D.IV Hukum yang dimaksud adalah S.1/D-IV Hukum Umum S.1 Hukum yang dimaksud adalah S.1/D-IV Hukum Umum
234	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	D.IV Manajemen/D.IV Teknik Lingkungan/D.IV Hukum/D.IV Teknik Arsitektur/D.IV Administrasi Publik/D.IV Perencanaan Wilayah Dan Kota/D.IV Teknik Sipil/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen/S.1 Hukum/S.1 Teknik Arsitektur/S.1 Teknik Sipil/S.1 Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Teknik Lingkungan/S.1 Ekonomi Studi Pembangunan	Balai Pendidikan Dan Pelatihan Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Wilayah III Jakarta, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1		D.IV Hukum yang dimaksud adalah S.1/D-IV Hukum Umum S.1 Hukum yang dimaksud adalah S.1/D-IV Hukum Umum

	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	Lingkungan/D.IV Hukum/D.IV Teknik Arsitektur/D.IV Administrasi Publik/D.IV Perencanaan Wilayah Dan Kota/D.IV Teknik Sipil/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen/S.1 Hukum/S.1 Teknik Arsitektur/S.1 Teknik Sipil/S.1 Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Teknik Lingkungan/S.1 Ekonomi Studi Pembangunan	Balai Pendidikan Dan Pelatihan Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Wilayah IV Bandung, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	Paling lama 5 (lima) tahun	D.IV Hukum yang dimaksud adalah S.1/D-IV Hukum Umum S.1 Hukum yang dimaksud adalah S.1/D-IV Hukum Umum
236	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	Lingkungan/D.IV Hukum/D.IV Teknik Arsitektur/D.IV Administrasi Publik/D.IV Perencanaan Wilayah Dan Kota/D.IV Teknik Sipil/S.1	Balai Pendidikan Dan Pelatihan Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Wilayah IX Jayapura, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	Paling lama 5 (lima) tahun	D.IV Hukum yang dimaksud adalah S.1/D-IV Hukum Umum S.1 Hukum yang dimaksud adalah S.1/D-IV Hukum Umum
237	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	Lingkungan/D.IV Hukum/D.IV Teknik Arsitektur/D.IV Administrasi Publik/D.IV Perencanaan Wilayah	Balai Pendidikan Dan Pelatihan Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Wilayah V Yogyakarta, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1		D.IV Hukum yang dimaksud adalah S.1/D-IV Hukum Umum S.1 Hukum yang dimaksud adalah S.1/D-IV Hukum Umum

	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	Lingkungan/D.IV Hukum/D.IV Teknik Arsitektur/D.IV Administrasi Publik/D.IV Perencanaan Wilayah Dan Kota/D.IV Teknik Sipil/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen/S.1 Hukum/S.1 Teknik Arsitektur/S.1 Teknik Sipil/S.1 Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Teknik Lingkungan/S.1 Ekonomi Studi Pembangunan	Balai Pendidikan Dan Pelatihan Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Wilayah VI Surabaya, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	Paling lama 5 (lima) tahun	D.IV Hukum yang dimaksud adalah S.1/D-IV Hukum Umum S.1 Hukum yang dimaksud adalah S.1/D-IV Hukum Umum
239	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	Lingkungan/D.IV Hukum/D.IV Teknik Arsitektur/D.IV Administrasi Publik/D.IV Perencanaan Wilayah Dan Kota/D.IV Teknik Sipil/S.1	Balai Pendidikan Dan Pelatihan Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Wilayah VII Banjarmasin, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	Paling lama 5 (lima) tahun	D.IV Hukum yang dimaksud adalah S.1/D-IV Hukum Umum S.1 Hukum yang dimaksud adalah S.1/D-IV Hukum Umum
240	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	Lingkungan/D.IV Hukum/D.IV Teknik Arsitektur/D.IV Administrasi Publik/D.IV Perencanaan Wilayah	Balai Pendidikan Dan Pelatihan Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Wilayah VIII Makassar, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1		D.IV Hukum yang dimaksud adalah S.1/D-IV Hukum Umum S.1 Hukum yang dimaksud adalah S.1/D-IV Hukum Umum

241	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	D.IV Manajemen/D.IV Teknik Lingkungan/D.IV Hukum/D.IV Teknik Arsitektur/D.IV Administrasi Publik/D.IV Perencanaan Wilayah Dan Kota/D.IV Teknik Sipil/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen/S.1 Hukum/S.1 Teknik Arsitektur/S.1 Teknik Sipil/S.1 Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Teknik Lingkungan/S.1 Ekonomi Studi Pembangunan	Politeknik Pekerjaan Umum, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	Paling lama 5 (lima) tahun	D.IV Hukum yang dimaksud adalah S.1/D-IV Hukum Umum S.1 Hukum yang dimaksud adalah S.1/D-IV Hukum Umum
242	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	D.IV Manajemen/D.IV Teknik Lingkungan/D.IV Hukum/D.IV Teknik Arsitektur/D.IV Administrasi Publik/D.IV Perencanaan Wilayah Dan Kota/D.IV Teknik Sipil/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen/S.1 Hukum/S.1 Teknik Arsitektur/S.1 Teknik Sipil/S.1 Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Teknik Lingkungan/S.1 Ekonomi Studi Pembangunan	Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	Paling lama 5 (lima) tahun	D.IV Hukum yang dimaksud adalah S.1/D-IV Hukum Umum S.1 Hukum yang dimaksud adalah S.1/D-IV Hukum Umum
243	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	Lingkungan/D.IV Hukum/D.IV Teknik Arsitektur/D.IV Administrasi	Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air Dan Permukiman, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	Paling lama 5 (lima) tahun	D.IV Hukum yang dimaksud adalah S.1/D-IV Hukum Umum S.1 Hukum yang dimaksud adalah S.1/D-IV Hukum Umum

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	D.IV Manajemen/D.IV Teknik Lingkungan/D.IV Hukum/D.IV Teknik Arsitektur/D.IV Administrasi Publik/D.IV Perencanaan Wilayah Dan Kota/D.IV Teknik Sipil/S.1 Administrasi Publik/S.1 Manajemen/S.1 Hukum/S.1 Teknik Arsitektur/S.1 Teknik Sipil/S.1 Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Teknik Lingkungan/S.1 Ekonomi Studi Pembangunan	Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	Paling lama 5 (lima) tahun	D.IV Hukum yang dimaksud adalah S.1/D-IV Hukum Umum S.1 Hukum yang dimaksud adalah S.1/D-IV Hukum Umum
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Sipil	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Bali, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	Ekonomi/S.1 Hukum/S.1	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Bangka Belitung, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	2	Paling lama 5 (lima) tahun	S.1 Hukum yang dimaksud adalah S.1 Hukum Umum
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	S.1 Akuntansi/S.1 Manajemen/S.1 Ekonomi/S.1 Hukum/S.1 Administrasi Negara/S.1 Teknik Sipil	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Banten, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	2	Paling lama 5 (lima) tahun	S.1 Hukum yang dimaksud adalah S.1 Hukum Umum
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	S.1 Akuntansi/S.1 Manajemen/S.1 Ekonomi/S.1 Hukum/S.1 Administrasi Negara/S.1 Teknik Sipil	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Bengkulu, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	2	Paling lama 5 (lima) tahun	S.1 Hukum yang dimaksud adalah S.1 Hukum Umum
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	S.1 Akuntansi/S.1 Manajemen/S.1 Ekonomi/S.1 Hukum/S.1 Administrasi Negara/S.1 Teknik Sipil	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah DKI Jakarta, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	15	Paling lama 5 (lima) tahun	S.1 Hukum yang dimaksud adalah S.1 Hukum Umum
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	S.1 Akuntansi/S.1 Manajemen/S.1 Ekonomi/S.1 Hukum/S.1 Administrasi Negara/S.1 Teknik Sipil	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Gorontalo, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	2	Paling lama 5 (lima) tahun	S.1 Hukum yang dimaksud adalah S.1 Hukum Umum

251	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	Ekonomi/S.1 Hukum/S.1	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Barat, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi		Paling lama 5 (lima) tahun	S.1 Hukum yang dimaksud adalah S.1 Hukum Umum
252	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	Ekonomi/S.1 Hukum/S.1 Administrasi Negara/S.1 Teknik Sipil	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Tengah, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	2	Paling lama 5 (lima) tahun	S.1 Hukum yang dimaksud adalah S.1 Hukum Umum
253	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	Ekonomi/S.1 Hukum/S.1 Administrasi Negara/S.1 Teknik Sipil	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Timur, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	3	Paling lama 5 (lima) tahun	S.1 Hukum yang dimaksud adalah S.1 Hukum Umum
254	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	S.1 Akuntansi/S.1 Manajemen/S.1 Ekonomi/S.1 Hukum/S.1 Administrasi Negara/S.1 Teknik Sipil	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Utara, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi		Paling lama 5 (lima) tahun	S.1 Hukum yang dimaksud adalah S.1 Hukum Umum
255	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	S.1 Akuntansi/S.1 Manajemen/S.1 Ekonomi/S.1 Hukum/S.1 Administrasi Negara/S.1 Teknik Sipil	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kepulauan Riau, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	2	Paling lama 5 (lima) tahun	S.1 Hukum yang dimaksud adalah S.1 Hukum Umum
256	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	S.1 Akuntansi/S.1 Manajemen/S.1 Ekonomi/S.1 Hukum/S.1 Administrasi Negara/S.1 Teknik Sipil	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Maluku Utara, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	3	Paling lama 5 (lima) tahun	S.1 Hukum yang dimaksud adalah S.1 Hukum Umum
257	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	Ekonomi/S.1 Hukum/S.1 Administrasi Negara/S.1 Teknik Sipil	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Maluku, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi		Paling lama 5 (lima) tahun	S.1 Hukum yang dimaksud adalah S.1 Hukum Umum
258	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	Ekonomi/S.1 Hukum/S.1 Administrasi Negara/S.1 Teknik Sipil	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Papua, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi		Paling lama 5 (lima) tahun	S.1 Hukum yang dimaksud adalah S.1 Hukum Umum

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	Ekonomi/S.1 Hukum/S.1 Administrasi Negara/S.1 Teknik Sipil	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Riau, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	3	Paling lama 5 (lima) tahun	S.1 Hukum yang dimaksud adalah S.1 Hukum Umum
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	S.1 Akuntansi/S.1 Manajemen/S.1 Ekonomi/S.1 Hukum/S.1 Administrasi Negara/S.1 Teknik Sipil	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Barat, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	3	Paling lama 5 (lima) tahun	S.1 Hukum yang dimaksud adalah S.1 Hukum Umum
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	S.1 Akuntansi/S.1 Manajemen/S.1 Ekonomi/S.1 Hukum/S.1 Administrasi Negara/S.1 Teknik Sipil	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Selatan, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi		Paling lama 5 (lima) tahun	S.1 Hukum yang dimaksud adalah S.1 Hukum Umum
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	Ekonomi/S.1 Hukum/S.1	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Tengah, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi		Paling lama 5 (lima) tahun	S.1 Hukum yang dimaksud adalah S.1 Hukum Umum
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	Ekonomi/S.1 Hukum/S.1 Administrasi Negara/S.1 Teknik Sipil	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Tenggara, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi		Paling lama 5 (lima) tahun	S.1 Hukum yang dimaksud adalah S.1 Hukum Umum
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama		Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Papua Barat, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	3	Paling lama 5 (lima) tahun	S.1 Hukum yang dimaksud adalah S.1 F
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	Wilayah/S.1 Ekonomi/S.1	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah D.I. Yogyakarta, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	2	Paling lama 5 (lima) tahun	S.1 Hukum yang dimaksud adalah S.1 Hukum Umum
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	S.1 Manajemen/S.1 Perencanaan Wilayah/S.1 Ekonomi/S.1 Hukum/S.1 Teknik Arsitektur/S.1 Teknik Lingkungan/S.1 Administrasi	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Timur, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi		Paling lama 5 (lima) tahun	S.1 Hukum yang dimaksud adalah S.1 Hukum Umum

268	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	S.1 Manajemen/S.1 Perencanaan Wilayah/S.1 Ekonomi/S.1 Hukum/S.1 Teknik Arsitektur/S.1 Teknik Lingkungan/S.1 Administrasi D.IV Manajemen/S.1 Manajemen	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Utara, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Biro Umum, Sekretariat Jenderal Biro Perencanaan Anggaran Dan Kerja Sama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal	3 2	Paling lama 5 (lima) tahun Paling lama 5 (lima) tahun Paling lama 5 (lima) tahun	S.1 Hukum yang dimaksud adalah S.1 Hukum Umum
270	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama	D.IV Desain Grafis/D.IV Desain Komunikasi Visual/D.IV Teknologi Pendidikan/D.IV Teknologi Informasi/D.IV Teknik Informatika/D.IV Pendidikan Desain Komunikasi Visual/D.IV Pendidikan Teknik Informatika/D.IV Pendidikan Multimedia/S.1 Desain Grafis/S.1 Teknik Informatika/S.1 Pendidikan Teknik Sipil/S.1 Pendidikan Teknik Bangunan/S.1 Pendidikan Teknik Informatika/S.1 Desain Komunikasi Visual/S.1 Momunikasi Visual/S.1 Komputer/S.1 Komunikasi/S.1 Teknologi Informasi/S.1 Pendidikan Desain Komunikasi Visual/S.1 Multimedia/S.1 Pendidikan Desain Grafis/S.1 Pendidikan Desain Grafis/S.1 Pendidikan Multimedia/D.IV Multimedia/D.IV Seni/D.IV Pendidikan Teknik Bangunan/D.IV Pendidikan Teknik Sipil/S.1 Teknologi Komputer/D.IV Komputer/D.IV Komunikasi	Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5	Paling lama 5 (lima) tahun	S.1 Seni untuk Program Studi S.1 Desain Grafis/Desain Komunikasi Visual/Desain Produk dengan gelar akademik Sarjana Seni D.IV Seni untuk Program Studi D.IV Desain Grafis/Desain Komunikasi Visual/Desain Produk dengan gelar akademik Sarjana Sains Terapan Seni -

	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama	D.IV Desain Grafis/D.IV Desain Komunikasi Visual/D.IV Teknologi Pendidikan/D.IV Teknologi Informasi/D.IV Teknik Informatika/D.IV Pendidikan Desain Komunikasi Visual/D.IV Pendidikan Teknik Informatika/D.IV Pendidikan Multimedia/S.1 Desain Grafis/S.1 Teknik Informatika/S.1 Pendidikan Teknik Sipil/S.1 Pendidikan Teknik Bangunan/S.1 Pendidikan Teknik Informatika/S.1 Teknologi Pendidikan/S.1 Seni/S.1 Desain Komunikasi Visual/S.1 Komputer/S.1 Komunikasi/S.1 Teknologi Informasi/S.1 Pendidikan Desain Komunikasi Visual/S.1 Multimedia/S.1 Pendidikan Desain Grafis/S.1 Pendidikan Multimedia/D.IV Multimedia/D.IV Seni/D.IV Pendidikan Teknik Bangunan/D.IV Pendidikan Teknik Sipil/S.1 Teknologi Komputer/D.IV Komputer/D.IV Komunikasi	Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air Dan Permukiman, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Paling lama 5 (lima) tahun	S.1 Seni untuk Program Studi S.1 Desain Grafis/Desain Komunikasi Visual/Desain Produk dengan gelar akademik Sarjana Seni D.IV Seni untuk Program Studi D.IV Desain Grafis/Desain Komunikasi Visual/Desain Produk dengan gelar akademik Sarjana Sains Terapan Seni -
272	Perekayasa Ahli Pertama	·	Balai Bahan Jalan, Direktorat Jenderal Bina Marga	Paling lama 5 (lima) tahun	
273	Perencana Ahli Pertama	S.1 Ekonomi/S.1 Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Teknik/S.1 Studi Pembangunan	Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Paling lama 5 (lima) tahun	S.1 Teknik yang dimaksud adalah S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Arsitektur/S.1 Teknik Lingkungan
274	Perencana Ahli Pertama	S.1 Perencanaan Wilayah Kota/S.1 Teknik Arsitektur/S.1 Teknik Sipil/S.1 Arsitektur/S.1 Teknik Lingkungan	Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Paling lama 5 (lima) tahun	
275	Perencana Ahli Pertama	S.1 Perencanaan Wilayah Kota/S.1 Teknik Arsitektur/S.1 Teknik Sipil/S.1 Arsitektur/S.1 Teknik Lingkungan	Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Paling lama 5 (lima) tahun	

276	Perencana Ahli Pertama	Teknik Arsitektur/S.1 Teknik Sipil/S.1 Arsitektur/S.1 Teknik	Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	2	Paling lama 5 (lima) tahun
277	Perencana Ahli Pertama	Teknik Sipil/S.1 Arsitektur/S.1 Teknik Lingkungan	Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	2	Paling lama 5 (lima) tahun
278	Perencana Ahli Pertama	D.IV Teknik Lingkungan/D.IV Teknik Arsitektur/D.IV Perencanaan Wilayah Dan Kota/D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Arsitektur/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Lingkungan	Balai Penilaian Kompetensi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	Paling lama 5 (lima) tahun
279	Perencana Ahli Pertama	D.IV Teknik Lingkungan/D.IV Teknik Arsitektur/D.IV Perencanaan Wilayah Dan Kota/D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Arsitektur/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Lingkungan	Politeknik Pekerjaan Umum, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	Paling lama 5 (lima) tahun
280	Perencana Ahli Pertama	Wilayah Dan Kota/D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Arsitektur/S.1	Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air Dan Permukiman, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	Paling lama 5 (lima) tahun
281	Perencana Ahli Pertama	D.IV Teknik Lingkungan/D.IV Teknik Arsitektur/D.IV Perencanaan Wilayah Dan Kota/D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Arsitektur/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Lingkungan	Pusat Pengembangan Talenta, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	Paling lama 5 (lima) tahun
282	Perencana Ahli Pertama	D.IV Teknik Lingkungan/D.IV Teknik Arsitektur/D.IV Perencanaan Wilayah Dan Kota/D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Arsitektur/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Lingkungan	Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	Paling lama 5 (lima) tahun
283	Perencana Ahli Pertama	Wilayah/Ś.1 Ekonomi/S.1 Teknik	Balai Bahan Jalan, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun

284	Perencana Ahli Pertama	S.1 Manajemen/S.1 Perencanaan Wilayah/S.1 Ekonomi/S.1 Teknik Sipil	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta - Jawa Barat, Direktorat Jenderal Bina Marga	9	Paling lama 5 (lima) tahun	
285	Perencana Ahli Pertama	S.1 Manajemen/S.1 Perencanaan Wilayah/S.1 Ekonomi/S.1 Teknik Sipil	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur - Bali, Direktorat Jenderal Bina Marga	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
	Perencana Ahli Pertama	S.1 Manajemen/S.1 Perencanaan Wilayah/S.1 Ekonomi/S.1 Teknik Sipil	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan, Direktorat Jenderal Bina Marga	5	Paling lama 5 (lima) tahun	
	Perencana Ahli Pertama	S.1 Manajemen/S.1 Perencanaan Wilayah/S.1 Ekonomi/S.1 Teknik Sipil	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan, Direktorat Jenderal Bina Marga	5	Paling lama 5 (lima) tahun	
288	Perencana Ahli Pertama	S.1 Manajemen/S.1 Perencanaan Wilayah/S.1 Ekonomi/S.1 Teknik Sipil	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
289	Perencana Ahli Pertama	S.1 Manajemen/S.1 Perencanaan Wilayah/S.1 Ekonomi/S.1 Teknik Sipil	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh, Direktorat Jenderal Bina Marga	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
290	Perencana Ahli Pertama	S.1 Manajemen/S.1 Perencanaan Wilayah/S.1 Ekonomi/S.1 Teknik Sipil	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bangka Belitung, Direktorat Jenderal Bina Marga	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
291	Perencana Ahli Pertama	S.1 Manajemen/S.1 Perencanaan Wilayah/S.1 Ekonomi/S.1 Teknik Sipil	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Gorontalo, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
292	Perencana Ahli Pertama	S.1 Manajemen/S.1 Perencanaan Wilayah/S.1 Ekonomi/S.1 Teknik Sipil	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat, Direktorat Jenderal Bina Marga	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
293	Perencana Ahli Pertama	S.1 Manajemen/S.1 Perencanaan Wilayah/S.1 Ekonomi/S.1 Teknik Sipil	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Selatan, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
294	Perencana Ahli Pertama	S.1 Manajemen/S.1 Perencanaan Wilayah/S.1 Ekonomi/S.1 Teknik Sipil	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Tengah, Direktorat Jenderal Bina Marga	2	Paling lama 5 (lima) tahun	

	Perencana Ahli Pertama	S.1 Manajemen/S.1 Perencanaan Wilayah/S.1 Ekonomi/S.1 Teknik Sipil	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
296	Perencana Ahli Pertama	S.1 Manajemen/S.1 Perencanaan Wilayah/S.1 Ekonomi/S.1 Teknik Sipil	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku, Direktorat Jenderal Bina Marga	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
	Perencana Ahli Pertama	S.1 Manajemen/S.1 Perencanaan Wilayah/S.1 Ekonomi/S.1 Teknik Sipil	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Barat, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
	Perencana Ahli Pertama	S.1 Manajemen/S.1 Perencanaan Wilayah/S.1 Ekonomi/S.1 Teknik Sipil	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur, Direktorat Jenderal Bina Marga	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
	Perencana Ahli Pertama	S.1 Manajemen/S.1 Perencanaan Wilayah/S.1 Ekonomi/S.1 Teknik Sipil	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Papua Barat, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
300	Perencana Ahli Pertama	S.1 Manajemen/S.1 Perencanaan Wilayah/S.1 Ekonomi/S.1 Teknik Sipil	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau, Direktorat Jenderal Bina Marga	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
301	Perencana Ahli Pertama	S.1 Manajemen/S.1 Perencanaan Wilayah/S.1 Ekonomi/S.1 Teknik Sipil	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Barat, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
302	Perencana Ahli Pertama	S.1 Manajemen/S.1 Perencanaan Wilayah/S.1 Ekonomi/S.1 Teknik Sipil	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tengah, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
303	Perencana Ahli Pertama	S.1 Manajemen/S.1 Perencanaan Wilayah/S.1 Ekonomi/S.1 Teknik Sipil	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat, Direktorat Jenderal Bina Marga	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
304	Perencana Ahli Pertama	S.1 Manajemen/S.1 Perencanaan Wilayah/S.1 Ekonomi/S.1 Teknik Sipil	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wamena, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
305	Perencana Ahli Pertama	S.1 Manajemen/S.1 Perencanaan Wilayah/S.1 Ekonomi/S.1 Teknik Sipil	Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
306	Perencana Ahli Pertama	S.1 Manajemen/S.1 Perencanaan Wilayah/S.1 Ekonomi/S.1 Teknik Sipil	Direktorat Kepatuhan Intern, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	

		In	I== ·			Ţ
307	Perencana Ahli Pertama	S.1 Manajemen/S.1 Perencanaan	Direktorat Pembangunan	2	Paling lama 5	
		Wilayah/S.1 Ekonomi/S.1 Teknik	Jembatan, Direktorat		(lima) tahun	
		Sipil	Jenderal Bina Marga			
308	Perencana Ahli Pertama	S.1 Manajemen/S.1 Perencanaan	Direktorat Preservasi Jalan	1	Paling lama 5	
		Wilayah/S.1 Ekonomi/S.1 Teknik	Dan Jembatan Wilayah I,		(lima) tahun	
		Sipil	Direktorat Jenderal Bina		,	
		·	Marga			
309	Perencana Ahli Pertama	S.1 Manajemen/S.1 Perencanaan	Direktorat Sistem Dan	1	Paling lama 5	
		Wilayah/S.1 Ekonomi/S.1 Teknik	Strategi Penyelenggaraan		(lima) tahun	
		Sipil	Jalan Dan Jembatan,		(
		[Direktorat Jenderal Bina			
			Marga			
310	Perencana Ahli Pertama	D.IV Planologi/D.IV Perencanaan	Balai Kawasan Permukiman	2	Paling lama 5	
		Wilayah Dan Kota/S.1	Dan Perumahan, Direktorat	_	(lima) tahun	
		Manajemen/S.1 Perencanaan	Jenderal Cipta Karya		(mina) tanun	
			Jenuerai Cipia Karya			
		Wilayah/S.1 Ekonomi/S.1 Teknik				
		Sipil/S.1 Teknik Pengairan/S.1				
		Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1				
		Administrasi/S.1 Planologi				
011	D 41 !! D /	D IV/DL 1 1/D IV/D	D 1 : D		D !:	
311	Perencana Ahli Pertama	D.IV Planologi/D.IV Perencanaan	Balai Prasarana	2	Paling lama 5	
		Wilayah Dan Kota/S.1	Permukiman Wilayah		(lima) tahun	
		Manajemen/S.1 Perencanaan	Bengkulu, Direktorat			
		Wilayah/S.1 Ekonomi/S.1 Teknik	Jenderal Cipta Karya			
		Sipil/S.1 Teknik Pengairan/S.1				
		Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1				
		Administrasi/S.1 Planologi				
312	Perencana Ahli Pertama	D.IV Planologi/D.IV Perencanaan	Balai Prasarana	2	Paling lama 5	
		Wilayah Dan Kota/S.1	Permukiman Wilayah		(lima) tahun	
		Manajemen/S.1 Perencanaan	Gorontalo, Direktorat		,	
		Wilayah/S.1 Ekonomi/S.1 Teknik	Jenderal Cipta Karya			
		Sipil/S.1 Teknik Pengairan/S.1				
		Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1				
		Administrasi/S.1 Planologi				
		, taministrasi/o. i i lanologi				
313	Perencana Ahli Pertama	D.IV Planologi/D.IV Perencanaan	Balai Prasarana	2	Paling lama 5	
013		Wilayah Dan Kota/S.1	Permukiman Wilayah	2	(lima) tahun	
					(IIIIIa) lallull	
		Manajemen/S.1 Perencanaan	Jakarta Metropolitan,			
		Wilayah/S.1 Ekonomi/S.1 Teknik	Direktorat Jenderal Cipta			
		Sipil/S.1 Teknik Pengairan/S.1	Karya			
		Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1				
		Administrasi/S.1 Planologi				

314	Perencana Ahli Pertama	D.IV Planologi/D.IV Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Manajemen/S.1 Perencanaan Wilayah/S.1 Ekonomi/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan/S.1 Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Administrasi/S.1 Planologi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
315	Perencana Ahli Pertama	D.IV Planologi/D.IV Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Manajemen/S.1 Perencanaan Wilayah/S.1 Ekonomi/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan/S.1 Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Administrasi/S.1 Planologi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Barat, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
316	Perencana Ahli Pertama	D.IV Planologi/D.IV Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Manajemen/S.1 Perencanaan Wilayah/S.1 Ekonomi/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan/S.1 Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Administrasi/S.1 Planologi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Selatan, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
317	Perencana Ahli Pertama	D.IV Planologi/D.IV Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Manajemen/S.1 Perencanaan Wilayah/S.1 Ekonomi/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan/S.1 Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Administrasi/S.1 Planologi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Tengah, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
318	Perencana Ahli Pertama	D.IV Planologi/D.IV Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Manajemen/S.1 Perencanaan Wilayah/S.1 Ekonomi/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan/S.1 Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Administrasi/S.1 Planologi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Timur, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	

319	Perencana Ahli Pertama	D.IV Planologi/D.IV Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Manajemen/S.1 Perencanaan Wilayah/S.1 Ekonomi/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan/S.1 Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Administrasi/S.1 Planologi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Utara, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
320	Perencana Ahli Pertama	D.IV Planologi/D.IV Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Manajemen/S.1 Perencanaan Wilayah/S.1 Ekonomi/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan/S.1 Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Administrasi/S.1 Planologi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kepulauan Riau, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
321	Perencana Ahli Pertama	D.IV Planologi/D.IV Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Manajemen/S.1 Perencanaan Wilayah/S.1 Ekonomi/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan/S.1 Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Administrasi/S.1 Planologi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Lampung, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
322	Perencana Ahli Pertama	D.IV Planologi/D.IV Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Manajemen/S.1 Perencanaan Wilayah/S.1 Ekonomi/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan/S.1 Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Administrasi/S.1 Planologi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Maluku Utara, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
323	Perencana Ahli Pertama	D.IV Planologi/D.IV Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Manajemen/S.1 Perencanaan Wilayah/S.1 Ekonomi/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan/S.1 Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Administrasi/S.1 Planologi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Maluku, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	

324	Perencana Ahli Pertama	D.IV Planologi/D.IV Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Manajemen/S.1 Perencanaan Wilayah/S.1 Ekonomi/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan/S.1 Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Administrasi/S.1 Planologi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Barat, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
325	Perencana Ahli Pertama	D.IV Planologi/D.IV Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Manajemen/S.1 Perencanaan Wilayah/S.1 Ekonomi/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan/S.1 Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Administrasi/S.1 Planologi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Timur, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
326	Perencana Ahli Pertama	D.IV Planologi/D.IV Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Manajemen/S.1 Perencanaan Wilayah/S.1 Ekonomi/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan/S.1 Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Administrasi/S.1 Planologi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua Barat, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
327	Perencana Ahli Pertama	D.IV Planologi/D.IV Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Manajemen/S.1 Perencanaan Wilayah/S.1 Ekonomi/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan/S.1 Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Administrasi/S.1 Planologi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
328	Perencana Ahli Pertama	D.IV Planologi/D.IV Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Manajemen/S.1 Perencanaan Wilayah/S.1 Ekonomi/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan/S.1 Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Administrasi/S.1 Planologi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Riau, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	

329	Perencana Ahli Pertama	D.IV Planologi/D.IV Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Manajemen/S.1 Perencanaan Wilayah/S.1 Ekonomi/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan/S.1 Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Administrasi/S.1 Planologi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Barat, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
330	Perencana Ahli Pertama	D.IV Planologi/D.IV Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Manajemen/S.1 Perencanaan Wilayah/S.1 Ekonomi/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan/S.1 Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Administrasi/S.1 Planologi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Selatan, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
331	Perencana Ahli Pertama	D.IV Planologi/D.IV Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Manajemen/S.1 Perencanaan Wilayah/S.1 Ekonomi/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan/S.1 Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Administrasi/S.1 Planologi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Tengah, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
332	Perencana Ahli Pertama	D.IV Planologi/D.IV Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Manajemen/S.1 Perencanaan Wilayah/S.1 Ekonomi/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan/S.1 Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Administrasi/S.1 Planologi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Tenggara, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
333	Perencana Ahli Pertama	D.IV Planologi/D.IV Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Manajemen/S.1 Perencanaan Wilayah/S.1 Ekonomi/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan/S.1 Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Administrasi/S.1 Planologi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	

334	Perencana Ahli Pertama	Manajemen/S.1 Perencanaan Wilayah/S.1 Ekonomi/S.1 Teknik	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Selatan, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
335	Perencana Ahli Pertama	D.IV Planologi/D.IV Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Manajemen/S.1 Perencanaan Wilayah/S.1 Ekonomi/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan/S.1 Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Administrasi/S.1 Planologi	Balai Sains Bangunan, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
336	Perencana Ahli Pertama	D.IV Planologi/D.IV Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Manajemen/S.1 Perencanaan Wilayah/S.1 Ekonomi/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan/S.1 Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Administrasi/S.1 Planologi	Direktorat Air Minum, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
337	Perencana Ahli Pertama	D.IV Planologi/D.IV Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Manajemen/S.1 Perencanaan Wilayah/S.1 Ekonomi/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan/S.1 Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Administrasi/S.1 Planologi	Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
338	Perencana Ahli Pertama	Wilayah/Ś.1 Ekonomi/S.1 Teknik	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kepulauan Riau, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
339	Perencana Ahli Pertama	,	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	

	Perencana Ahli Pertama	Wilayah/Ś.1 Ekonomi/S.1 Teknik Sipil	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan Dan Jembatan, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
341	Perencana Ahli Pertama	S.1 Manajemen/S.1 Perencanaan Wilayah/S.1 Ekonomi/S.1 Teknik Sipil	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
		Wilayah/Ś.1 Ekonomi/S.1 Teknik Sipil	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
343	Perencana Ahli Pertama	S.1 Manajemen/S.1 Perencanaan Wilayah/S.1 Ekonomi/S.1 Teknik Sipil	Direktorat Pengembangan Sistem Dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
344	Perencana Ahli Pertama	D.IV Planologi/D.IV Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Manajemen/S.1 Perencanaan Wilayah/S.1 Ekonomi/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan/S.1 Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Administrasi/S.1 Planologi	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I, Direktorat Jenderal Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
345	Perencana Ahli Pertama	Wilayah Dan Kota/S.1 Perencanaan	Direktorat Rumah Khusus, Direktorat Jenderal Perumahan	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
346	Perencana Ahli Pertama	D.IV Planologi/D.IV Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Planologi	Direktorat Rumah Umum Dan Komersial, Direktorat Jenderal Perumahan	2	Paling lama 5 (lima) tahun	

347	Perencana Ahli Pertama	S.1 Ekonomi/S.1 Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Teknik/S.1 Studi Pembangunan	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I, Direktorat Jenderal Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	S.1 Teknik yang dimaksud adalah S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Arsitektur/S.1 Teknik Lingkungan
	Perencana Ahli Pertama	S.1 Ekonomi/S.1 Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Teknik/S.1 Studi Pembangunan	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan II, Direktorat Jenderal Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	S.1 Teknik yang dimaksud adalah S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Arsitektur/S.1 Teknik Lingkungan
349	Perencana Ahli Pertama	S.1 Ekonomi/S.1 Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Teknik/S.1 Studi Pembangunan	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Maluku, Direktorat Jenderal Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	S.1 Teknik yang dimaksud adalah S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Arsitektur/S.1 Teknik Lingkungan
350	Perencana Ahli Pertama	S.1 Ekonomi/S.1 Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Teknik/S.1 Studi Pembangunan	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II, Direktorat Jenderal Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	S.1 Teknik yang dimaksud adalah S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Arsitektur/S.1 Teknik Lingkungan
351	Perencana Ahli Pertama	S.1 Ekonomi/S.1 Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Teknik/S.1 Studi Pembangunan	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua I, Direktorat Jenderal Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	S.1 Teknik yang dimaksud adalah S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Arsitektur/S.1 Teknik Lingkungan
352	Perencana Ahli Pertama	S.1 Ekonomi/S.1 Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Teknik/S.1 Studi Pembangunan	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II, Direktorat Jenderal Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	S.1 Teknik yang dimaksud adalah S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Arsitektur/S.1 Teknik Lingkungan
353	Perencana Ahli Pertama	S.1 Ekonomi/S.1 Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Teknik/S.1 Studi Pembangunan	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera I, Direktorat Jenderal Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	S.1 Teknik yang dimaksud adalah S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Arsitektur/S.1 Teknik Lingkungan
354	Perencana Ahli Pertama	S.1 Ekonomi/S.1 Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Teknik/S.1 Studi Pembangunan	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera II, Direktorat Jenderal Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	S.1 Teknik yang dimaksud adalah S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Arsitektur/S.1 Teknik Lingkungan
355	Perencana Ahli Pertama	S.1 Ekonomi/S.1 Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Teknik/S.1 Studi Pembangunan	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III, Direktorat Jenderal Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	S.1 Teknik yang dimaksud adalah S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Arsitektur/S.1 Teknik Lingkungan
356	Perencana Ahli Pertama	S.1 Ekonomi/S.1 Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Teknik/S.1 Studi Pembangunan	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera IV, Direktorat Jenderal Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	S.1 Teknik yang dimaksud adalah S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Arsitektur/S.1 Teknik Lingkungan
357	Perencana Ahli Pertama	S.1 Ekonomi/S.1 Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Teknik/S.1 Studi Pembangunan	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V, Direktorat Jenderal Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	S.1 Teknik yang dimaksud adalah S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Arsitektur/S.1 Teknik Lingkungan

358	Perencana Ahli Pertama	S.1 Ekonomi/S.1 Perencanaan	Direktorat Kepatuhan Intern,	1	Paling lama 5	S.1 Teknik yang dimaksud adalah S.1
		Wilayah Dan Kota/S.1 Teknik/S.1 Studi Pembangunan	Direktorat Jenderal Perumahan		(lima) tahun	Teknik Sipil/S.1 Teknik Arsitektur/S.1 Teknik Lingkungan
359	Perencana Ahli Pertama	S.1 Ekonomi/S.1 Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Teknik/S.1	Direktorat Rumah Susun, Direktorat Jenderal Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	S.1 Teknik yang dimaksud adalah S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Arsitektur/S.1 Teknik Lingkungan
360	Perencana Ahli Pertama		Biro Hukum, Sekretariat Jenderal	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
361	Perencana Ahli Pertama	D.IV Planologi/D.IV Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Planologi	Biro Perencanaan Anggaran Dan Kerja Sama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal	3	Paling lama 5 (lima) tahun	
362	Perencana Ahli Pertama	D.IV Planologi/D.IV Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Perencanaan Wilayah Dan Kota/S.1 Planologi	Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah, Sekretariat Jenderal	4	Paling lama 5 (lima) tahun	
	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	S.1 Komunikasi	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Banten, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	S.1 Komunikasi	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah DKI Jakarta, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	S.1 Komunikasi	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Barat, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	3	Paling lama 5 (lima) tahun	
	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	S.1 Komunikasi	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Timur, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	S.1 Komunikasi	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Timur, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	1	Paling lama 5 (lima) tahun	

•	S.1 Manajemen Komunikasi/S.1 Desain Komunikasi Visual/S.1 Jurnalistik/S.1 Komunikasi/S.1 Hubungan Masyarakat	Balai Bahan Jalan, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
,		Balai Geoteknik Terowongan Dan Struktur, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	S.1 Manajemen Komunikasi/S.1 Desain Komunikasi Visual/S.1 Jurnalistik/S.1 Komunikasi/S.1 Hubungan Masyarakat	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur, Direktorat Jenderal Bina Marga	3	Paling lama 5 (lima) tahun	
Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	D.IV Hubungan Masyarakat/D.IV Desain Komunikasi Visual/S.1 Desain Grafis/S.1 Manajemen Komunikasi/S.1 Desain Komunikasi Visual/S.1 Ilmu Komunikasi/S.1 Jurnalistik/S.1 Hubungan Masyarakat/D.IV Jurnalistik/D.IV Manajemen Komunikasi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Banten, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	D.IV Hubungan Masyarakat/D.IV Desain Komunikasi Visual/S.1 Desain Grafis/S.1 Manajemen Komunikasi/S.1 Desain Komunikasi Visual/S.1 Ilmu Komunikasi/S.1 Jurnalistik/S.1 Hubungan Masyarakat/D.IV Jurnalistik/D.IV Manajemen Komunikasi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bengkulu, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	D.IV Hubungan Masyarakat/D.IV Desain Komunikasi Visual/S.1 Desain Grafis/S.1 Manajemen Komunikasi/S.1 Desain Komunikasi Visual/S.1 Ilmu Komunikasi/S.1 Jurnalistik/S.1 Hubungan Masyarakat/D.IV Jurnalistik/D.IV Manajemen Komunikasi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah D.I. Yogyakarta, Direktorat Jenderal Cipta Karya	3	Paling lama 5 (lima) tahun	

Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	D.IV Hubungan Masyarakat/D.IV Desain Komunikasi Visual/S.1 Desain Grafis/S.1 Manajemen Komunikasi/S.1 Desain Komunikasi Visual/S.1 Ilmu Komunikasi/S.1 Jurnalistik/S.1 Hubungan Masyarakat/D.IV Jurnalistik/D.IV Manajemen Komunikasi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Gorontalo, Direktorat Jenderal Cipta Karya		Paling lama 5 (lima) tahun	
Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Desain Grafis/S.1 Manajemen	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jambi, Direktorat Jenderal Cipta Karya		Paling lama 5 (lima) tahun	
Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	D.IV Hubungan Masyarakat/D.IV Desain Komunikasi Visual/S.1 Desain Grafis/S.1 Manajemen Komunikasi/S.1 Desain Komunikasi Visual/S.1 Ilmu Komunikasi/S.1 Jurnalistik/S.1 Hubungan Masyarakat/D.IV Jurnalistik/D.IV Manajemen Komunikasi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Barat, Direktorat Jenderal Cipta Karya		Paling lama 5 (lima) tahun	
Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	D.IV Hubungan Masyarakat/D.IV Desain Komunikasi Visual/S.1 Desain Grafis/S.1 Manajemen Komunikasi/S.1 Desain Komunikasi Visual/S.1 Ilmu Komunikasi/S.1 Jurnalistik/S.1 Hubungan Masyarakat/D.IV Jurnalistik/D.IV Manajemen Komunikasi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah, Direktorat Jenderal Cipta Karya	3	Paling lama 5 (lima) tahun	
Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	S.1 Komunikasi	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I, Direktorat Jenderal Perumahan		Paling lama 5 (lima) tahun	
Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama		Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II, Direktorat Jenderal Perumahan		Paling lama 5 (lima) tahun	

380	Pranata Hubungan	S.1 Komunikasi	Balai Pelaksana Penyediaan	1	Paling lama 5	
	Masyarakat Ahli Pertama		Perumahan Sumatera I, Direktorat Jenderal Perumahan		(lima) tahun	
	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	S.1 Komunikasi	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera II, Direktorat Jenderal Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
382	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	S.1 Komunikasi	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III, Direktorat Jenderal Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
		S.1 Manajemen Komunikasi/S.1 Desain Komunikasi Visual/S.1 Jurnalistik/S.1 Komunikasi/S.1 Hubungan Masyarakat	Direktorat Rumah Susun, Direktorat Jenderal Perumahan	3	Paling lama 5 (lima) tahun	
384	Pranata Komputer Ahli Pertama	D.IV Teknologi Informasi/D.IV Teknik Informatika/S.1 Teknik Informatika/S.1 Teknologi Informasi	Politeknik Pekerjaan Umum, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
385	Pranata Komputer Ahli Pertama	D.IV Teknologi Informasi/D.IV Teknik Informatika/S.1 Teknik Informatika/S.1 Teknologi Informasi	Pusat Pengembangan Kompetensi Jalan, Perumahan, Permukiman, Dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
386	Pranata Komputer Ahli Pertama	D.IV Teknologi Informasi/D.IV Teknik Informatika/S.1 Teknik Informatika/S.1 Teknologi Informasi	Pusat Pengembangan Talenta, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
387	Pranata Komputer Ahli Pertama	D.IV Ilmu Komputer/D.IV Sistem Dan Teknologi Informasi/D.IV Rekayasa Perangkat Lunak/D.IV Teknik Informatika/D.IV Sistem Informasi/S.1 Sistem Dan Teknologi Informasi/S.1 Sistem Informasi/S.1 Rekayasa Perangkat Lunak/S.1 Teknik Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Barat, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	1	Paling lama 5 (lima) tahun	

Pranata Komputer Ahli Pertama	Dan Teknologi Informasi/D.IV	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Nusa Tenggara Timur, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
Pranata Komputer Ahli Pertama	D.IV Rekayasa Perangkat Lunak/S.1 Teknik Informatika/S.1 Teknik Komputer	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Timur, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
Pranata Komputer Ahli Pertama	D.IV Rekayasa Perangkat Lunak/S.1 Teknik Informatika/S.1 Teknik Komputer	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Selatan, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
Pranata Komputer Ahli Pertama		Jasa Konstruksi Wilayah Nusa Tenggara Barat, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
Pranata Komputer Ahli Pertama	S.1 Sistem Informasi/S.1 Teknik Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta - Jawa Barat, Direktorat Jenderal Bina Marga	6	Paling lama 5 (lima) tahun	
Pranata Komputer Ahli Pertama	S.1 Sistem Informasi/S.1 Teknik Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah - DI Yogyakarta, Direktorat Jenderal Bina Marga	5	Paling lama 5 (lima) tahun	
Pranata Komputer Ahli Pertama	S.1 Sistem Informasi/S.1 Teknik Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan, Direktorat Jenderal Bina Marga		Paling lama 5 (lima) tahun	
Pranata Komputer Ahli Pertama	S.1 Sistem Informasi/S.1 Teknik Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan, Direktorat Jenderal Bina Marga		Paling lama 5 (lima) tahun	
Pranata Komputer Ahli Pertama	S.1 Sistem Informasi/S.1 Teknik Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Balai Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga	2	Paling lama 5 (lima) tahun	

397	Pranata Komputer Ahli Pertama	S.1 Sistem Informasi/S.1 Teknik Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh, Direktorat	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
398	Pranata Komputer Ahli Pertama	S.1 Sistem Informasi/S.1 Teknik Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bangka Belitung, Direktorat Jenderal Bina Marga	8	Paling lama 5 (lima) tahun	
	Pranata Komputer Ahli Pertama	S.1 Sistem Informasi/S.1 Teknik Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Banten, Direktorat Jenderal Bina Marga	3	Paling lama 5 (lima) tahun	
	Pranata Komputer Ahli Pertama	S.1 Sistem Informasi/S.1 Teknik Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bengkulu, Direktorat Jenderal Bina Marga	5	Paling lama 5 (lima) tahun	
	Pranata Komputer Ahli Pertama	S.1 Sistem Informasi/S.1 Teknik Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Gorontalo, Direktorat Jenderal Bina Marga	3	Paling lama 5 (lima) tahun	
402	Pranata Komputer Ahli Pertama	S.1 Sistem Informasi/S.1 Teknik Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura, Direktorat Jenderal Bina Marga	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
	Pranata Komputer Ahli Pertama	S.1 Sistem Informasi/S.1 Teknik Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
404	Pranata Komputer Ahli Pertama	S.1 Sistem Informasi/S.1 Teknik Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Selatan, Direktorat Jenderal Bina Marga	3	Paling lama 5 (lima) tahun	
405	Pranata Komputer Ahli Pertama	S.1 Sistem Informasi/S.1 Teknik Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Tengah, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
406	Pranata Komputer Ahli Pertama	S.1 Sistem Informasi/S.1 Teknik Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Utara, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
	Pranata Komputer Ahli Pertama	S.1 Sistem Informasi/S.1 Teknik Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau, Direktorat Jenderal Bina Marga	3	Paling lama 5 (lima) tahun	

	Pranata Komputer Ahli Pertama	S.1 Sistem Informasi/S.1 Teknik Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung, Direktorat Jenderal Bina Marga	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
	Pranata Komputer Ahli Pertama	S.1 Sistem Informasi/S.1 Teknik Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku Utara, Direktorat Jenderal Bina Marga	3	Paling lama 5 (lima) tahun	
	Pranata Komputer Ahli Pertama	S.1 Sistem Informasi/S.1 Teknik Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku, Direktorat Jenderal Bina Marga	3	Paling lama 5 (lima) tahun	
	Pranata Komputer Ahli Pertama	S.1 Sistem Informasi/S.1 Teknik Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Barat, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
	Pranata Komputer Ahli Pertama	S.1 Sistem Informasi/S.1 Teknik Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur, Direktorat Jenderal Bina Marga	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
413	Pranata Komputer Ahli Pertama	S.1 Sistem Informasi/S.1 Teknik Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Papua Barat, Direktorat Jenderal Bina Marga	3	Paling lama 5 (lima) tahun	
	Pranata Komputer Ahli Pertama	S.1 Sistem Informasi/S.1 Teknik Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
415	Pranata Komputer Ahli Pertama	S.1 Sistem Informasi/S.1 Teknik Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Barat, Direktorat Jenderal Bina Marga	3	Paling lama 5 (lima) tahun	
416	Pranata Komputer Ahli Pertama	S.1 Sistem Informasi/S.1 Teknik Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tengah, Direktorat Jenderal Bina Marga	3	Paling lama 5 (lima) tahun	
417	Pranata Komputer Ahli Pertama	S.1 Sistem Informasi/S.1 Teknik Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tenggara, Direktorat Jenderal Bina Marga	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
	Pranata Komputer Ahli Pertama	S.1 Sistem Informasi/S.1 Teknik Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Utara, Direktorat Jenderal Bina Marga	2	Paling lama 5 (lima) tahun	

	Pranata Komputer Ahli Pertama	S.1 Sistem Informasi/S.1 Teknik Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat, Direktorat Jenderal Bina Marga	5	Paling lama 5 (lima) tahun	
	Pranata Komputer Ahli Pertama	S.1 Sistem Informasi/S.1 Teknik Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wamena, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
	Pranata Komputer Ahli Pertama	S.1 Sistem Informasi/S.1 Teknik Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Balai Perkerasan Dan Lingkungan Jalan, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
	Pranata Komputer Ahli Pertama	S.1 Sistem Informasi/S.1 Teknik Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Direktorat Bina Teknik Jalan Dan Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga	4	Paling lama 5 (lima) tahun	
	Pranata Komputer Ahli Pertama	S.1 Sistem Informasi/S.1 Teknik Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Direktorat Jenderal Bina Marga	4	Paling lama 5 (lima) tahun	
424	Pranata Komputer Ahli Pertama	S.1 Sistem Informasi/S.1 Teknik Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Direktorat Kepatuhan Intern, Direktorat Jenderal Bina Marga	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
425	Pranata Komputer Ahli Pertama	S.1 Sistem Informasi/S.1 Teknik Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Direktorat Pembangunan Jalan, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
	Pranata Komputer Ahli Pertama	S.1 Sistem Informasi/S.1 Teknik Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Direktorat Pembangunan Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga	6	Paling lama 5 (lima) tahun	
	Pranata Komputer Ahli Pertama	S.1 Sistem Informasi/S.1 Teknik Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Direktorat Preservasi Jalan Dan Jembatan Wilayah I, Direktorat Jenderal Bina Marga	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
428	Pranata Komputer Ahli Pertama	S.1 Sistem Informasi/S.1 Teknik Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Direktorat Sistem Dan Strategi Penyelenggaraan Jalan Dan Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
	Pranata Komputer Ahli Pertama	S.1 Sistem Informasi/S.1 Teknik Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
	Pranata Komputer Ahli Pertama	S.1 Sistem Informasi/S.1 Teknik Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	

 	<u> </u>	I		<u></u>	
Pranata Komputer Ahli Pertama	S.1 Sistem Informasi/S.1 Teknik Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
Pranata Komputer Ahli Pertama	S.1 Sistem Informasi/S.1 Teknik Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Direktorat Pengembangan Sistem Dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
Pranata Komputer Ahli Pertama	S.1 Sistem Informasi/S.1 Teknik Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
Pranata Komputer Ahli Pertama	D.IV Ilmu Komputer/D.IV Sistem Dan Teknologi Informasi/D.IV Rekayasa Perangkat Lunak/D.IV Teknik Informatika/D.IV Sistem Informasi/S.1 Sistem Dan Teknologi Informasi/S.1 Sistem Informasi/S.1 Rekayasa Perangkat Lunak/S.1 Teknik Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I, Direktorat Jenderal Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
Pranata Komputer Ahli Pertama	D.IV Ilmu Komputer/D.IV Sistem Dan Teknologi Informasi/D.IV Rekayasa Perangkat Lunak/D.IV Teknik Informatika/D.IV Sistem Informasi/S.1 Sistem Dan Teknologi Informasi/S.1 Sistem Informasi/S.1 Rekayasa Perangkat Lunak/S.1 Teknik Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa II, Direktorat Jenderal Perumahan	2	Paling lama 5 (lima) tahun	

Pranata Komputer Ahli Pertama	Dan Teknologi Informasi/D.IV Rekayasa Perangkat Lunak/D.IV	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I, Direktorat Jenderal Perumahan		Paling lama 5 (lima) tahun	
Pranata Komputer Ahli Pertama	Rekayasa Perangkat Lunak/D.IV Teknik Informatika/D.IV Sistem Informasi/S.1 Sistem Dan Teknologi Informasi/S.1 Sistem Informasi/S.1 Rekayasa Perangkat Lunak/S.1 Teknik Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan II, Direktorat Jenderal Perumahan		Paling lama 5 (lima) tahun	
Pranata Komputer Ahli Pertama	D.IV Ilmu Komputer/D.IV Sistem Dan Teknologi Informasi/D.IV Rekayasa Perangkat Lunak/D.IV Teknik Informatika/D.IV Sistem Informasi/S.1 Sistem Dan Teknologi Informasi/S.1 Sistem Informasi/S.1 Rekayasa Perangkat Lunak/S.1 Teknik Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I, Direktorat Jenderal Perumahan		Paling lama 5 (lima) tahun	
Pranata Komputer Ahli Pertama	Rekayasa Perangkat Lunak/D.IV	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua I, Direktorat Jenderal Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
Pranata Komputer Ahli Pertama	D.IV Ilmu Komputer/D.IV Sistem Dan Teknologi Informasi/D.IV Rekayasa Perangkat Lunak/D.IV	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi III, Direktorat Jenderal Perumahan		Paling lama 5 (lima) tahun	

Pranata Komputer Ahli Pertama	Dan Teknologi Informasi/D.IV Rekayasa Perangkat Lunak/D.IV Teknik Informatika/D.IV Sistem Informasi/S.1 Sistem Dan Teknologi Informasi/S.1 Sistem Informasi/S.1 Rekayasa Perangkat Lunak/S.1 Teknik Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera IV, Direktorat Jenderal Perumahan		Paling lama 5 (lima) tahun	
Pranata Komputer Ahli Pertama	Rekayasa Perangkat Lunak/D.IV	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V, Direktorat Jenderal Perumahan		Paling lama 5 (lima) tahun	
Pranata Komputer Ahli Pertama	D.IV Ilmu Komputer/D.IV Sistem Dan Teknologi Informasi/D.IV Rekayasa Perangkat Lunak/D.IV Teknik Informatika/D.IV Sistem Informasi/S.1 Sistem Dan Teknologi Informasi/S.1 Sistem Informasi/S.1 Rekayasa Perangkat Lunak/S.1 Teknik Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Direktorat Kepatuhan Intern, Direktorat Jenderal Perumahan		Paling lama 5 (lima) tahun	
Pranata Komputer Ahli Pertama	D.IV Ilmu Komputer/D.IV Sistem Dan Teknologi Informasi/D.IV Rekayasa Perangkat Lunak/D.IV Teknik Informatika/D.IV Sistem Informasi/S.1 Sistem Dan Teknologi Informasi/S.1 Sistem Informasi/S.1 Rekayasa Perangkat Lunak/S.1 Teknik Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Direktorat Rumah Susun, Direktorat Jenderal Perumahan	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
Pranata Komputer Ahli Pertama	D.IV Ilmu Komputer/D.IV Sistem Dan Teknologi Informasi/D.IV	Direktorat Rumah Swadaya, Direktorat Jenderal Perumahan		Paling lama 5 (lima) tahun	

Pranata Komputer Ahli Pertama	S.1 Sistem Informasi/S.1 Teknik Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa III, Direktorat Jenderal Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
Pranata Komputer Ahli Pertama	S.1 Sistem Informasi/S.1 Teknik Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa IV, Direktorat Jenderal Perumahan	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
Pranata Komputer Ahli Pertama	S.1 Sistem Informasi/S.1 Teknik Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Direktorat Rumah Khusus, Direktorat Jenderal Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
Pranata Komputer Ahli Pertama	S.1 Sistem Informasi/S.1 Teknik Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Direktorat Rumah Susun, Direktorat Jenderal Perumahan	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
Pranata Komputer Ahli Pertama	S.1 Sistem Informasi/S.1 Teknik Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan, Direktorat Jenderal Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
Pranata Komputer Ahli Pertama	D.IV Ilmu Komputer/D.IV Sistem Dan Teknologi Informasi/D.IV Rekayasa Perangkat Lunak/D.IV Teknik Informatika/D.IV Sistem Informasi/S.1 Sistem Dan Teknologi Informasi/S.1 Sistem Informasi/S.1 Rekayasa Perangkat Lunak/S.1 Teknik Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
Pranata Komputer Ahli Pertama	D.IV Ilmu Komputer/D.IV Sistem Dan Teknologi Informasi/D.IV Rekayasa Perangkat Lunak/D.IV Teknik Informatika/D.IV Sistem Informasi/S.1 Sistem Dan Teknologi Informasi/S.1 Sistem Informasi/S.1 Rekayasa Perangkat Lunak/S.1 Teknik Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
Pranata Komputer Ahli Pertama	D.IV Ilmu Komputer/D.IV Sistem Dan Teknologi Informasi/D.IV Rekayasa Perangkat Lunak/D.IV Teknik Informatika/D.IV Sistem Informasi/S.1 Sistem Dan Teknologi Informasi/S.1 Sistem Informasi/S.1 Rekayasa Perangkat Lunak/S.1 Teknik Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	1	Paling lama 5 (lima) tahun	

	I	T	1		T	,
454	Pranata Komputer Ahli	D.IV Ilmu Komputer/D.IV Sistem	Balai Besar Wilayah Sungai	2	Paling lama 5	
	Pertama	Dan Teknologi Informasi/D.IV	Sumatera VIII, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air		(lima) tahun	
		Rekayasa Perangkat Lunak/D.IV Teknik Informatika/D.IV Sistem	Jenderal Sumber Daya Ali			
		Informasi/S.1 Sistem Dan Teknologi				
		Informasi/S.1 Sistem Informasi/S.1				
		Rekayasa Perangkat Lunak/S.1				
		Teknik Informatika/S.1 Ilmu				
		Komputer				
455	Pranata Komputer Ahli	S.1 Sistem Informasi/S.1 Teknik	Balai Besar Wilayah Sungai	1	Paling lama 5	
	Pertama	Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Ciliwung-Cisadane,		(lima) tahun	
		·	Direktorat Jenderal Sumber		,	
			Daya Air			
	Pranata Komputer Ahli	S.1 Sistem Informasi/S.1 Teknik	Balai Besar Wilayah Sungai	1	Paling lama 5	
	Pertama	Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Cimanuk Cisanggarung,		(lima) tahun	
			Direktorat Jenderal Sumber			
457	D (14 (ALI'	0.4.0: 4 1.6 1.0.4 1.1.	Daya Air		D. I	
457	Pranata Komputer Ahli	S.1 Sistem Informasi/S.1 Teknik	Balai Besar Wilayah Sungai	1	Paling lama 5	
	Pertama	Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Mesuji-Sekampung, Direktorat Jenderal Sumber		(lima) tahun	
			Daya Air			
458	Pranata Komputer Ahli	S.1 Sistem Informasi/S.1 Teknik	Balai Besar Wilayah Sungai	1	Paling lama 5	
100	Pertama	Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Pemali Juana, Direktorat	·	(lima) tahun	
			Jenderal Sumber Daya Air		(
			,			
459	Pranata Komputer Ahli	S.1 Sistem Informasi/S.1 Teknik	Direktorat Sistem Dan	1	Paling lama 5	
	Pertama	Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Strategi Pengelolaan		(lima) tahun	
			Sumber Daya Air, Direktorat			
			Jenderal Sumber Daya Air			
460	Pranata Komputer Ahli	D.IV Ilmu Komputer/D.IV Sistem	Biro Kepegawaian	3	Paling lama 5	
	Pertama	Dan Teknologi Informasi/D.IV	Organisasi Dan Tata		(lima) tahun	
		Rekayasa Perangkat Lunak/D.IV Teknik Informatika/D.IV Sistem	Laksana, Sekretariat Jenderal			
		Informasi/S.1 Sistem Dan Teknologi				
		Informasi/S.1 Sistem Informasi/S.1				
		Rekayasa Perangkat Lunak/S.1				
		Teknik Informatika/S.1 Ilmu				
		Komputer				
		Interripated				

	Pranata Komputer Ahli Pertama	D.IV Ilmu Komputer/D.IV Sistem Dan Teknologi Informasi/D.IV Rekayasa Perangkat Lunak/D.IV Teknik Informatika/D.IV Sistem Informasi/S.1 Sistem Dan Teknologi Informasi/S.1 Sistem Informasi/S.1 Rekayasa Perangkat Lunak/S.1 Teknik Informatika/S.1 Ilmu Komputer	Pusat Analisis Pelaksanaan Kebijakan, Sekretariat Jenderal	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
	Pranata Komputer Ahli Pertama		Pusat Data Dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
	Pranata Komputer Ahli Pertama	D.IV Rekayasa Perangkat Lunak/S.1 Teknik Informatika/S.1 Teknik Komputer	Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal	3	Paling lama 5 (lima) tahun	
	Pranata Komputer Ahli Pertama	D.IV Rekayasa Perangkat Lunak/S.1 Teknik Informatika/S.1 Teknik Komputer	Biro Pengelolaan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
	Pranata Komputer Ahli Pertama	D.IV Rekayasa Perangkat Lunak/S.1 Teknik Informatika/S.1 Teknik Komputer	Biro Perencanaan Anggaran Dan Kerja Sama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
	Pranata Komputer Ahli Pertama	D.IV Rekayasa Perangkat Lunak/S.1 Teknik Informatika/S.1 Teknik Komputer	Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah, Sekretariat Jenderal	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
467	Statistisi Ahli Pertama	D.IV Statistik/S.1 Statistik	Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air Dan Permukiman, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
468	Statistisi Ahli Pertama	S.1 Statistika	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur - Bali, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
	Statistisi Ahli Pertama	S.1 Statistika	Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Direktorat Jenderal Bina Marga	6	Paling lama 5 (lima) tahun	
470	Statistisi Ahli Pertama	D.IV Statistik/S.1 Statistik	Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal	2	Paling lama 5 (lima) tahun	

		1	1		T	
471	Statistisi Ahli Pertama	D.IV Statistik/S.1 Statistik	Pusat Data Dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
	Pertama		Nasional Bangka Belitung, Direktorat Jenderal Bina Marga	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
	Surveyor Pemetaan Ahli Pertama	D.IV Rekayasa Perangkat Lunak/S.1 Teknik Informatika/S.1 Teknik Komputer	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku Utara, Direktorat Jenderal Bina Marga	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
	Surveyor Pemetaan Ahli Pertama	S.1 Kartografi/S.1 Teknik Geodesi/S.1 Teknik Geomatika/S.1 Penginderaan Jauh/S.1 Sistem Informasi Geografis	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Utara, Direktorat Jenderal Bina Marga	4	Paling lama 5 (lima) tahun	
	Surveyor Pemetaan Ahli Pertama	S.1 Kartografi/S.1 Teknik Geodesi/S.1 Teknik Geomatika/S.1 Penginderaan Jauh/S.1 Sistem Informasi Geografis	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
476	Surveyor Pemetaan Ahli Pertama	S.1 Kartografi/S.1 Teknik Geodesi/S.1 Teknik Geomatika/S.1 Penginderaan Jauh/S.1 Sistem Informasi Geografis	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau, Direktorat Jenderal Bina Marga	3	Paling lama 5 (lima) tahun	
477	Surveyor Pemetaan Ahli Pertama	D.IV Geografi/D.IV Teknik Geodesi/S.1 Teknik Geodesi/S.1 Geografi/S.1 Teknik Geomatika	Pusat Data Dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
478	Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Pertama	D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Sipil	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur - Bali, Direktorat Jenderal Bina Marga	10	Paling lama 5 (lima) tahun	
479	Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Pertama	D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Sipil	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jambi, Direktorat Jenderal Bina Marga	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
480	Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Pertama	D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Sipil	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau, Direktorat Jenderal Bina Marga	10	Paling lama 5 (lima) tahun	
481	Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Pertama	D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Sipil	Direktorat Pembangunan Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga	5	Paling lama 5 (lima) tahun	

	Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Pertama	Sipil/D.IV Teknik Perancangan Jalan Dan Jembatan/S.1 Teknik Perancangan Jalan Dan Jembatan	Marga	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
483	Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Pertama	•	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta - Jawa Barat, Direktorat Jenderal Bina Marga	32	Paling lama 5 (lima) tahun	
484	Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Pertama	Sipil/D.IV Teknik Perancangan Jalan Dan Jembatan/S.1 Teknik Perancangan Jalan Dan Jembatan	Tengah - DI Yogyakarta, Direktorat Jenderal Bina Marga	12	Paling lama 5 (lima) tahun	
485	Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Pertama	D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Sipil/D.IV Teknik Perancangan Jalan Dan Jembatan/S.1 Teknik Perancangan Jalan Dan Jembatan	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur - Bali, Direktorat Jenderal Bina Marga	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
486	Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Pertama	Dan Jembatan/S.1 Teknik	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur, Direktorat Jenderal Bina Marga	45	Paling lama 5 (lima) tahun	
487	Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Pertama	Sipil/D.IV Teknik Perancangan Jalan Dan Jembatan/S.1 Teknik	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan, Direktorat Jenderal Bina Marga	16	Paling lama 5 (lima) tahun	
488	Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Pertama	•	Balai Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
489	Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Pertama	Sipil/D.IV Teknik Perancangan Jalan Dan Jembatan/S.1 Teknik Perancangan Jalan Dan Jembatan	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bangka Belitung, Direktorat Jenderal Bina Marga	11	Paling lama 5 (lima) tahun	
490	Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Pertama	D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Sipil/D.IV Teknik Perancangan Jalan Dan Jembatan/S.1 Teknik Perancangan Jalan Dan Jembatan	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Banten, Direktorat Jenderal Bina Marga	2	Paling lama 5 (lima) tahun	

491	Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Pertama	Sipil/D.IV Teknik Perancangan Jalan Dan Jembatan/S.1 Teknik Perancangan Jalan Dan Jembatan	Direktorat Jenderal Bina Marga	Paling lama 5 (lima) tahun	
492	Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Pertama	Sipil/D.IV Teknik Perancangan Jalan Dan Jembatan/S.1 Teknik	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Gorontalo, Direktorat Jenderal Bina Marga	Paling lama 5 (lima) tahun	
493	Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Pertama	Sipil/D.IV Teknik Perancangan Jalan Dan Jembatan/S.1 Teknik	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura, Direktorat Jenderal Bina Marga	Paling lama 5 (lima) tahun	
494	Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Pertama	Sipil/D.IV Teknik Perancangan Jalan Dan Jembatan/S.1 Teknik	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat, Direktorat Jenderal Bina Marga	Paling lama 5 (lima) tahun	
495	Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Pertama	Sipil/D.IV Teknik Perancangan Jalan Dan Jembatan/S.1 Teknik	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Selatan, Direktorat Jenderal Bina Marga	Paling lama 5 (lima) tahun	
496	Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Pertama	Sipil/D.IV Teknik Perancangan Jalan Dan Jembatan/S.1 Teknik	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Tengah, Direktorat Jenderal Bina Marga	Paling lama 5 (lima) tahun	
497	Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Pertama	Sipil/D.IV Teknik Perancangan Jalan	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Utara, Direktorat Jenderal Bina Marga	Paling lama 5 (lima) tahun	
498	Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Pertama	Sipil/D.IV Teknik Perancangan Jalan Dan Jembatan/S.1 Teknik	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau, Direktorat Jenderal Bina Marga	Paling lama 5 (lima) tahun	
499	Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Pertama	Sipil/D.IV Teknik Perancangan Jalan Dan Jembatan/S.1 Teknik	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung, Direktorat Jenderal Bina Marga	Paling lama 5 (lima) tahun	

500	Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Pertama	Sipil/D.IV Teknik Perancangan Jalan Dan Jembatan/S.1 Teknik Perancangan Jalan Dan Jembatan	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku Utara, Direktorat Jenderal Bina Marga	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
501	Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Pertama	D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Sipil/D.IV Teknik Perancangan Jalan Dan Jembatan/S.1 Teknik Perancangan Jalan Dan Jembatan	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku, Direktorat Jenderal Bina Marga	6	Paling lama 5 (lima) tahun	
502	Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Pertama	Sipil/D.IV Teknik Perancangan Jalan Dan Jembatan/S.1 Teknik	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Barat, Direktorat Jenderal Bina Marga	10	Paling lama 5 (lima) tahun	
503	Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Pertama	D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Sipil/D.IV Teknik Perancangan Jalan Dan Jembatan/S.1 Teknik Perancangan Jalan Dan Jembatan	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur, Direktorat Jenderal Bina Marga	5	Paling lama 5 (lima) tahun	
504	Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Pertama		Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Papua Barat, Direktorat Jenderal Bina Marga	8	Paling lama 5 (lima) tahun	
505	Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Pertama	D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Sipil/D.IV Teknik Perancangan Jalan Dan Jembatan/S.1 Teknik Perancangan Jalan Dan Jembatan	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau, Direktorat Jenderal Bina Marga	12	Paling lama 5 (lima) tahun	
506	Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Pertama	Sipil/D.IV Teknik Perancangan Jalan Dan Jembatan/S.1 Teknik	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tengah, Direktorat Jenderal Bina Marga	22	Paling lama 5 (lima) tahun	
507	Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Pertama	Sipil/D.IV Teknik Perancangan Jalan Dan Jembatan/S.1 Teknik Perancangan Jalan Dan Jembatan	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Utara, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
508	Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Pertama		Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat, Direktorat Jenderal Bina Marga	7	Paling lama 5 (lima) tahun	

509	Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Pertama	Sipil/D.IV Teknik Perancangan Jalan	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wamena, Direktorat Jenderal Bina Marga	4	Paling lama 5 (lima) tahun
510	Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Pertama	D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Sipil/D.IV Teknik Perancangan Jalan Dan Jembatan/S.1 Teknik Perancangan Jalan Dan Jembatan	Balai Perkerasan Dan Lingkungan Jalan, Direktorat Jenderal Bina Marga	2	Paling lama 5 (lima) tahun
511	Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Pertama	Sipil/D.IV Teknik Perancangan Jalan	Direktorat Pembangunan Jalan, Direktorat Jenderal Bina Marga	2	Paling lama 5 (lima) tahun
512	Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Pertama	Sipil/D.IV Teknik Perancangan Jalan Dan Jembatan/S.1 Teknik	Direktorat Preservasi Jalan Dan Jembatan Wilayah I, Direktorat Jenderal Bina Marga	2	Paling lama 5 (lima) tahun
513	Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Pertama	Sipil/D.IV Teknik Perancangan Jalan Dan Jembatan/S.1 Teknik Perancangan Jalan Dan Jembatan	Direktorat Sistem Dan Strategi Penyelenggaraan Jalan Dan Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun
514	Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Pertama		Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun
515	Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Pertama	S.1 Teknik Sipil	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara, Direktorat Jenderal Bina Marga	4	Paling lama 5 (lima) tahun
	Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Pertama		Balai Geoteknik Terowongan Dan Struktur, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun
	Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Pertama		Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bangka Belitung, Direktorat Jenderal Bina Marga	3	Paling lama 5 (lima) tahun
518	Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Pertama		Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bengkulu, Direktorat Jenderal Bina Marga	2	Paling lama 5 (lima) tahun

519	Teknik Jalan Dan	S.1 Teknik Sipil	Balai Pelaksanaan Jalan	1	Paling lama 5
313	Jembatan Ahli Pertama	O. F. TEKHIK OIPII	Nasional Jambi, Direktorat	'	(lima) tahun
	oembatan / tili i ertama		Jenderal Bina Marga		
520	Teknik Jalan Dan	S.1 Teknik Sipil	Balai Pelaksanaan Jalan	7	Paling lama 5
020	Jembatan Ahli Pertama	l	Nasional Sulawesi Barat,	•	(lima) tahun
			Direktorat Jenderal Bina		(iiiia) tariari
			Marga		
521	Teknik Jalan Dan	S.1 Teknik Sipil	Balai Pelaksanaan Jalan	2	Paling lama 5
021	Jembatan Ahli Pertama	S. F. FORTING OIPII	Nasional Sulawesi Utara,	_	(lima) tahun
			Direktorat Jenderal Bina		(iiiia) tariari
			Marga		
522	Teknik Jalan Dan	S.1 Teknik Sipil	Direktorat Bina Teknik Jalan	6	Paling lama 5
022	Jembatan Ahli Pertama	O. F. FORTING OID!!	Dan Jembatan, Direktorat	Ü	(lima) tahun
			Jenderal Bina Marga		(iiiia) tariari
			oondoral Bina Warga		
523	Teknik Jalan Dan	S.1 Teknik Sipil	Direktorat Jalan Bebas	20	Paling lama 5
	Jembatan Ahli Pertama		Hambatan, Direktorat		(lima) tahun
			Jenderal Bina Marga		
524	Teknik Jalan Dan	S.1 Teknik Sipil	Direktorat Kepatuhan Intern,	5	Paling lama 5
	Jembatan Ahli Pertama		Direktorat Jenderal Bina	-	(lima) tahun
			Marga		
525	Teknik Jalan Dan	S.1 Teknik Sipil	Direktorat Pembangunan	4	Paling lama 5
	Jembatan Ahli Pertama	·	Jalan, Direktorat Jenderal		(lima) tahun
			Bina Marga		
526	Teknik Jalan Dan	S.1 Teknik Sipil	Direktorat Pembangunan	5	Paling lama 5
	Jembatan Ahli Pertama	· ·	Jembatan, Direktorat		(lima) tahun
			Jenderal Bina Marga		
527	Teknik Jalan Dan	S.1 Teknik Sipil	Direktorat Preservasi Jalan	3	Paling lama 5
	Jembatan Ahli Pertama		Dan Jembatan Wilayah I,		(lima) tahun
			Direktorat Jenderal Bina		
			Marga		
528	Teknik Jalan Dan	S.1 Teknik Sipil	Direktorat Preservasi Jalan	6	Paling lama 5
	Jembatan Ahli Pertama		Dan Jembatan Wilayah II,		(lima) tahun
			Direktorat Jenderal Bina		
			Marga		
529	Teknik Jalan Dan	S.1 Teknik Sipil	Direktorat Sistem Dan	7	Paling lama 5
	Jembatan Ahli Pertama		Strategi Penyelenggaraan		(lima) tahun
			Jalan Dan Jembatan,		
			Direktorat Jenderal Bina		
			Marga		
530	Teknik Jalan Dan	S.1 Teknik Sipil	Sekretariat Badan Pengatur	4	Paling lama 5
	Jembatan Ahli Pertama		Jalan Tol, Direktorat		(lima) tahun
			Jenderal Bina Marga		

504	Talasia Ialas Bas	O 4 T-1-9-05-9	Only to date District		Dalla a lassa 5	T
	Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Pertama		Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
532	Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Pertama	Sipil/D.IV Teknik Perancangan Jalan Dan Jembatan/S.1 Teknik Perancangan Jalan Dan Jembatan	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan Dan Jembatan, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
	Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Pertama	Sipil/D.IV Teknik Perancangan Jalan Dan Jembatan/S.1 Teknik Perancangan Jalan Dan Jembatan	Direktorat Pengembangan Sistem Dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
534	Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Pertama	D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Sipil/D.IV Teknik Perancangan Jalan Dan Jembatan/S.1 Teknik Perancangan Jembatan Dan Jalan	Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah, Sekretariat Jenderal	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
535	Teknik Pengairan Ahli Pertama	D.IV Teknik Pengairan/D.IV Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
	Teknik Pengairan Ahli Pertama	D.IV Teknik Pengairan/D.IV Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan	Direktorat Pengembangan Sistem Dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
	Teknik Pengairan Ahli Pertama	_	Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	4	Paling lama 5 (lima) tahun	

		T====	I= =	ı .	I=	T
	Teknik Pengairan Ahli Pertama	D.IV Teknik Pengairan/D.IV Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan	Balai Besar Wilayah Sungai Brantas, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	3	Paling lama 5 (lima) tahun	
539	Teknik Pengairan Ahli Pertama	D.IV Teknik Pengairan/D.IV Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan	Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	4	Paling lama 5 (lima) tahun	
	Teknik Pengairan Ahli Pertama	D.IV Teknik Pengairan/D.IV Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan	Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	4	Paling lama 5 (lima) tahun	
541	Teknik Pengairan Ahli Pertama	D.IV Teknik Pengairan/D.IV Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan	Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	3	Paling lama 5 (lima) tahun	
	Teknik Pengairan Ahli Pertama	D.IV Teknik Pengairan/D.IV Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan	Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	3	Paling lama 5 (lima) tahun	
	Teknik Pengairan Ahli Pertama	D.IV Teknik Pengairan/D.IV Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan	Balai Besar Wilayah Sungai Citarum, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	4	Paling lama 5 (lima) tahun	
544	Teknik Pengairan Ahli Pertama	D.IV Teknik Pengairan/D.IV Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan	Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji-Sekampung, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	4	Paling lama 5 (lima) tahun	

		T	T		I=	Τ
	Teknik Pengairan Ahli Pertama	D.IV Teknik Pengairan/D.IV Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan	Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	3	Paling lama 5 (lima) tahun	
546	Teknik Pengairan Ahli Pertama	D.IV Teknik Pengairan/D.IV Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan	Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	4	Paling lama 5 (lima) tahun	
	Teknik Pengairan Ahli Pertama	D.IV Teknik Pengairan/D.IV Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan	Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	4	Paling lama 5 (lima) tahun	
548	Teknik Pengairan Ahli Pertama	D.IV Teknik Pengairan/D.IV Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan	Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
549	Teknik Pengairan Ahli Pertama	D.IV Teknik Pengairan/D.IV Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan	Balai Hidrolika Dan Geoteknik Keairan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
550	Teknik Pengairan Ahli Pertama	D.IV Teknik Pengairan/D.IV Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan	Balai Papua Barat, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
	Teknik Pengairan Ahli Pertama	D.IV Teknik Pengairan/D.IV Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan	Balai Teknik Irigasi, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	3	Paling lama 5 (lima) tahun	

<i>EE</i> 2	Takaik Dangainan Abi	D. IV. Toknik Donasiron/D. IV. Toknik	Dalai Taknik Dantai	<u> </u>	Deline James F	T
	Teknik Pengairan Ahli Pertama	D.IV Teknik Pengairan/D.IV Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan	Balai Teknik Pantai, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	3	Paling lama 5 (lima) tahun	
	Teknik Pengairan Ahli Pertama	Pengelolaan Sumber Daya Air/D.IV	Balai Teknik Sabo, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
554	Teknik Pengairan Ahli Pertama	D.IV Teknik Pengairan/D.IV Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan	Balai Teknik Sungai, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
	Teknik Pengairan Ahli Pertama	D.IV Teknik Pengairan/D.IV Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan	Balai Wilayah Sungai Bali Penida, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
556	Teknik Pengairan Ahli Pertama	D.IV Teknik Pengairan/D.IV Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan	Balai Wilayah Sungai Bangka Belitung, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	4	Paling lama 5 (lima) tahun	
557	Teknik Pengairan Ahli Pertama	D.IV Teknik Pengairan/D.IV Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan	Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	4	Paling lama 5 (lima) tahun	
	Teknik Pengairan Ahli Pertama	Pengelolaan Sumber Daya Air/D.IV	Balai Wilayah Sungai Kalimantan III Banjarmasin, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	4	Paling lama 5 (lima) tahun	

	Teknik Pengairan Ahli Pertama	D.IV Teknik Pengairan/D.IV Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan	Balai Wilayah Sungai Kalimantan V Tanjung Selor, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
560	Teknik Pengairan Ahli Pertama	D.IV Teknik Pengairan/D.IV Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan	Balai Wilayah Sungai Maluku Utara, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
561	Teknik Pengairan Ahli Pertama	D.IV Teknik Pengairan/D.IV Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan	Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I Mataram, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	4	Paling lama 5 (lima) tahun	
	Teknik Pengairan Ahli Pertama	D.IV Teknik Pengairan/D.IV Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan	Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II Kupang, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
563	Teknik Pengairan Ahli Pertama	D.IV Teknik Pengairan/D.IV Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan	Balai Wilayah Sungai Papua Merauke, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
	Teknik Pengairan Ahli Pertama	D.IV Teknik Pengairan/D.IV Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan	Balai Wilayah Sungai Papua, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
565	Teknik Pengairan Ahli Pertama	D.IV Teknik Pengairan/D.IV Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan	Balai Wilayah Sungai Sulawesi I, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	3	Paling lama 5 (lima) tahun	

		T	I		I=	I
	Teknik Pengairan Ahli Pertama	D.IV Teknik Pengairan/D.IV Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan	Balai Wilayah Sungai Sulawesi II Gorontalo, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	3	Paling lama 5 (lima) tahun	
567	Teknik Pengairan Ahli Pertama	D.IV Teknik Pengairan/D.IV Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan	Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
	Teknik Pengairan Ahli Pertama	D.IV Teknik Pengairan/D.IV Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan	Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV Kendari, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
569	Teknik Pengairan Ahli Pertama	D.IV Teknik Pengairan/D.IV Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan	Balai Wilayah Sungai Sumatera I Banda Aceh, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	3	Paling lama 5 (lima) tahun	
	Teknik Pengairan Ahli Pertama	D.IV Teknik Pengairan/D.IV Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan	Balai Wilayah Sungai Sumatera II Medan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	3	Paling lama 5 (lima) tahun	
	Teknik Pengairan Ahli Pertama	D.IV Teknik Pengairan/D.IV Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan	Balai Wilayah Sungai Sumatera III Pekanbaru, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	3	Paling lama 5 (lima) tahun	
	Teknik Pengairan Ahli Pertama	D.IV Teknik Pengairan/D.IV Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan	Balai Wilayah Sungai Sumatera IV Batam, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	4	Paling lama 5 (lima) tahun	

		Inner in a series of	In the second	1 .	ln	T
	Teknik Pengairan Ahli Pertama	D.IV Teknik Pengairan/D.IV Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan	Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air		Paling lama 5 (lima) tahun	
574	Teknik Pengairan Ahli Pertama	D.IV Teknik Pengairan/D.IV Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan	Balai Wilayah Sungai Sumatera VI, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
	Teknik Pengairan Ahli Pertama	D.IV Teknik Pengairan/D.IV Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan	Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	5	Paling lama 5 (lima) tahun	
576	Teknik Pengairan Ahli Pertama	D.IV Teknik Pengairan/D.IV Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan	Direktorat Air Tanah Dan Air Baku, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	3	Paling lama 5 (lima) tahun	
	Teknik Pengairan Ahli Pertama	D.IV Teknik Pengairan/D.IV Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan	Direktorat Bendungan Dan Danau, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
	Teknik Pengairan Ahli Pertama	D.IV Teknik Pengairan/D.IV Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan	Direktorat Bina Operasi Dan Pemeliharaan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	3	Paling lama 5 (lima) tahun	
579	Teknik Pengairan Ahli Pertama	D.IV Teknik Pengairan/D.IV Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan	Direktorat Bina Teknik Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	3	Paling lama 5 (lima) tahun	

	Teknik Pengairan Ahli Pertama	D.IV Teknik Pengairan/D.IV Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan	Direktorat Irigasi Dan Rawa, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	5	Paling lama 5 (lima) tahun	
581	Teknik Pengairan Ahli Pertama	D.IV Teknik Pengairan/D.IV Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan	Direktorat Kepatuhan Intern, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
	Teknik Pengairan Ahli Pertama	D.IV Teknik Pengairan/D.IV Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan	Direktorat Sistem Dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	3	Paling lama 5 (lima) tahun	
583	Teknik Pengairan Ahli Pertama	D.IV Teknik Pengairan/D.IV Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan	Direktorat Sungai Dan Pantai, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	4	Paling lama 5 (lima) tahun	
584	Teknik Pengairan Ahli Pertama	D.IV Teknik Pengairan/D.IV Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan	Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	3	Paling lama 5 (lima) tahun	
	Teknik Pengairan Ahli Pertama	D.IV Teknik Pengairan/D.IV Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan	Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
586	Teknik Pengairan Ahli Pertama	D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Sipil	Balai Wilayah Sungai Maluku, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
	Teknik Pengairan Ahli Pertama	D.IV Teknik Pengairan/D.IV Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/D.IV Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/S.1 Teknik Sipil/S.1 Teknik Pengairan	Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah, Sekretariat Jenderal	1	Paling lama 5 (lima) tahun	

588	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	D.IV Teknik Lingkungan/D.IV Sanitasi/S.1 Teknik Penyehatan/S.1 Teknik Lingkungan/S.1 Lingkungan	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Aceh, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	D.IV Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari S.1/D-IV Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan
						S.1 Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari S.1/D-IV Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan
589		D.IV Teknik Lingkungan/D.IV Sanitasi/S.1 Teknik Penyehatan/S.1 Teknik Lingkungan/S.1 Lingkungan	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	D.IV Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari S.1/D-IV Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan S.1 Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari S.1/D-IV Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan
590		D.IV Teknik Lingkungan/D.IV Sanitasi/S.1 Teknik Penyehatan/S.1 Teknik Lingkungan/S.1 Lingkungan	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bangka Belitung, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	D.IV Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari S.1/D-IV Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan S.1 Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari S.1/D-IV Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan
591	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	D.IV Teknik Lingkungan/D.IV Sanitasi/S.1 Teknik Penyehatan/S.1 Teknik Lingkungan/S.1 Lingkungan	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bengkulu, Direktorat Jenderal Cipta Karya	3	Paling lama 5 (lima) tahun	D.IV Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari S.1/D-IV Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan S.1 Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari S.1/D-IV Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan

592	Lingkungan Ahli Pertama	D.IV Teknik Lingkungan/D.IV Sanitasi/S.1 Teknik Penyehatan/S.1 Teknik Lingkungan/S.1 Lingkungan	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Gorontalo, Direktorat Jenderal Cipta Karya		Paling lama 5 (lima) tahun	D.IV Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari S.1/D-IV Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan S.1 Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari S.1/D-IV Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan
593		D.IV Teknik Lingkungan/D.IV Sanitasi/S.1 Teknik Penyehatan/S.1 Teknik Lingkungan/S.1 Lingkungan	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jakarta Metropolitan, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	D.IV Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari S.1/D-IV Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan S.1 Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari S.1/D-IV Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan
594		D.IV Teknik Lingkungan/D.IV Sanitasi/S.1 Teknik Penyehatan/S.1 Teknik Lingkungan/S.1 Lingkungan	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jambi, Direktorat Jenderal Cipta Karya		Paling lama 5 (lima) tahun	D.IV Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari S.1/D-IV Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan S.1 Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari S.1/D-IV Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan
595	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	D.IV Teknik Lingkungan/D.IV Sanitasi/S.1 Teknik Penyehatan/S.1 Teknik Lingkungan/S.1 Lingkungan	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Barat, Direktorat Jenderal Cipta Karya	10	Paling lama 5 (lima) tahun	D.IV Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari S.1/D-IV Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan S.1 Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari S.1/D-IV Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan

596	Lingkungan Ahli Pertama	Teknik Lingkungan/S.1 Lingkungan	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah, Direktorat Jenderal Cipta Karya	Paling lama 5 (lima) tahun	D.IV Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari S.1/D-IV Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan S.1 Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari S.1/D-IV Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan
597	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	D.IV Teknik Lingkungan/D.IV Sanitasi/S.1 Teknik Penyehatan/S.1 Teknik Lingkungan/S.1 Lingkungan	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur, Direktorat Jenderal Cipta Karya	Paling lama 5 (lima) tahun	D.IV Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari S.1/D-IV Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan S.1 Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari S.1/D-IV Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan
598	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	D.IV Teknik Lingkungan/D.IV Sanitasi/S.1 Teknik Penyehatan/S.1 Teknik Lingkungan/S.1 Lingkungan	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Barat, Direktorat Jenderal Cipta Karya	Paling lama 5 (lima) tahun	D.IV Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari S.1/D-IV Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan S.1 Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari S.1/D-IV Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan
599	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	•	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Selatan, Direktorat Jenderal Cipta Karya	Paling lama 5 (lima) tahun	D.IV Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari S.1/D-IV Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan S.1 Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari S.1/D-IV Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan

600	Lingkungan Ahli Pertama	Teknik Lingkungan/S.1 Lingkungan	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Tengah, Direktorat Jenderal Cipta Karya	Paling lama 5 (lima) tahun	D.IV Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari S.1/D-IV Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan S.1 Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari S.1/D-IV Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan
601	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama		Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Utara, Direktorat Jenderal Cipta Karya	Paling lama 5 (lima) tahun	D.IV Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari S.1/D-IV Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan S.1 Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari S.1/D-IV Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan
602	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	D.IV Teknik Lingkungan/D.IV Sanitasi/S.1 Teknik Penyehatan/S.1 Teknik Lingkungan/S.1 Lingkungan	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kepulauan Riau, Direktorat Jenderal Cipta Karya	Paling lama 5 (lima) tahun	D.IV Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari S.1/D-IV Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan S.1 Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari S.1/D-IV Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan
603	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	D.IV Teknik Lingkungan/D.IV Sanitasi/S.1 Teknik Penyehatan/S.1 Teknik Lingkungan/S.1 Lingkungan	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Lampung, Direktorat Jenderal Cipta Karya	Paling lama 5 (lima) tahun	D.IV Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari S.1/D-IV Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan S.1 Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari S.1/D-IV Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan

604	Lingkungan Ahli Pertama	Teknik Lingkungan/S.1 Lingkungan	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Barat, Direktorat Jenderal Cipta Karya	Paling lama 5 (lima) tahun	D.IV Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari S.1/D-IV Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan S.1 Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari S.1/D-IV Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan
605		D.IV Teknik Lingkungan/D.IV Sanitasi/S.1 Teknik Penyehatan/S.1 Teknik Lingkungan/S.1 Lingkungan	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Timur, Direktorat Jenderal Cipta Karya	Paling lama 5 (lima) tahun	D.IV Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari S.1/D-IV Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan S.1 Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari S.1/D-IV Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan
606	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	D.IV Teknik Lingkungan/D.IV Sanitasi/S.1 Teknik Penyehatan/S.1 Teknik Lingkungan/S.1 Lingkungan	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua Barat, Direktorat Jenderal Cipta Karya	Paling lama 5 (lima) tahun	D.IV Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari S.1/D-IV Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan S.1 Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari S.1/D-IV Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan
607	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	D.IV Teknik Lingkungan/D.IV Sanitasi/S.1 Teknik Penyehatan/S.1 Teknik Lingkungan/S.1 Lingkungan	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua, Direktorat Jenderal Cipta Karya	Paling lama 5 (lima) tahun	D.IV Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari S.1/D-IV Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan S.1 Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari S.1/D-IV Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan

608	Lingkungan Ahli Pertama	Teknik Lingkungan/S.1 Lingkungan	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Barat, Direktorat Jenderal Cipta Karya		Paling lama 5 (lima) tahun	D.IV Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari S.1/D-IV Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan S.1 Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari S.1/D-IV Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan
609		Teknik Lingkungan/S.1 Lingkungan	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Selatan, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	D.IV Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari S.1/D-IV Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan S.1 Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari S.1/D-IV Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan
610	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	D.IV Teknik Lingkungan/D.IV Sanitasi/S.1 Teknik Penyehatan/S.1 Teknik Lingkungan/S.1 Lingkungan	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Tengah, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	D.IV Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari S.1/D-IV Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan S.1 Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari S.1/D-IV Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan
611	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	D.IV Teknik Lingkungan/D.IV Sanitasi/S.1 Teknik Penyehatan/S.1 Teknik Lingkungan/S.1 Lingkungan	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat, Direktorat Jenderal Cipta Karya	3	Paling lama 5 (lima) tahun	D.IV Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari S.1/D-IV Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan S.1 Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari S.1/D-IV Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan

612	Lingkungan Ahli Pertama	Teknik Lingkungan/S.1 Lingkungan	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Selatan, Direktorat Jenderal Cipta Karya	Paling lama 5 (lima) tahun	D.IV Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari S.1/D-IV Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan S.1 Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari S.1/D-IV Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan
613	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	D.IV Teknik Lingkungan/D.IV Sanitasi/S.1 Teknik Penyehatan/S.1 Teknik Lingkungan/S.1 Lingkungan	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Utara, Direktorat Jenderal Cipta Karya	Paling lama 5 (lima) tahun	D.IV Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari S.1/D-IV Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan S.1 Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari S.1/D-IV Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan
614	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama		Balai Teknologi Sanitasi, Direktorat Jenderal Cipta Karya	Paling lama 5 (lima) tahun	D.IV Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari S.1/D-IV Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan S.1 Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari S.1/D-IV Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan
615	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	D.IV Teknik Lingkungan/D.IV Sanitasi/S.1 Teknik Penyehatan/S.1 Teknik Lingkungan/S.1 Lingkungan	Direktorat Sistem Dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya	Paling lama 5 (lima) tahun	D.IV Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari S.1/D-IV Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan S.1 Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari S.1/D-IV Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan

616	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	D.IV Teknik Lingkungan/D.IV Sanitasi/S.1 Teknik Penyehatan/S.1 Teknik Lingkungan/S.1 Lingkungan	Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	D.IV Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari S.1/D-IV Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan S.1 Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari S.1/D-IV Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan
617	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	0 0	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur, Direktorat Jenderal Cipta Karya		Paling lama 5 (lima) tahun	
	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	D.IV Teknik Lingkungan/S.1 Teknik Lingkungan	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
619	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	D.IV Teknik Lingkungan/S.1 Teknik Lingkungan	Direktorat Pengembangan Sistem Dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan		Paling lama 5 (lima) tahun	
620	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama		Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I, Direktorat Jenderal Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	D.IV Teknik Lingkungan/S.1 Teknik Lingkungan	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa II, Direktorat Jenderal Perumahan		Paling lama 5 (lima) tahun	
	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	Lingkungan	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa III, Direktorat Jenderal Perumahan		Paling lama 5 (lima) tahun	
623	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	D.IV Teknik Lingkungan/S.1 Teknik Lingkungan	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa IV, Direktorat Jenderal Perumahan		Paling lama 5 (lima) tahun	

624	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama		Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan II, Direktorat Jenderal Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
625	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	D.IV Teknik Lingkungan/S.1 Teknik Lingkungan	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I, Direktorat Jenderal Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
626	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	D.IV Teknik Lingkungan/S.1 Teknik Lingkungan	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II, Direktorat Jenderal Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
627	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama		Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua I, Direktorat Jenderal Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
628	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	D.IV Teknik Lingkungan/S.1 Teknik Lingkungan	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II, Direktorat Jenderal Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
629	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	D.IV Teknik Lingkungan/S.1 Teknik Lingkungan	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi III, Direktorat Jenderal Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
630	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	D.IV Teknik Lingkungan/S.1 Teknik Lingkungan	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera I, Direktorat Jenderal Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
631	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	D.IV Teknik Lingkungan/S.1 Teknik Lingkungan	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera II, Direktorat Jenderal Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	D.IV Teknik Lingkungan/S.1 Teknik Lingkungan	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III, Direktorat Jenderal Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
633	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama		Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V, Direktorat Jenderal Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
634	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	D.IV Teknik Lingkungan/S.1 Teknik Lingkungan	Direktorat Rumah Susun, Direktorat Jenderal Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	

005	Talasia Bassala tas	D N/ T-1-3-11-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	District Described on the con-		Dallar Isaa 5	ī
635	Teknik Penyehatan	D.IV Teknik Lingkungan/S.1 Teknik	Direktorat Rumah Swadaya,	1	Paling lama 5	
	Lingkungan Ahli Pertama	Lingkungan	Direktorat Jenderal		(lima) tahun	
			Perumahan		5	
636	Teknik Penyehatan	D.IV Teknik Lingkungan/S.1 Teknik	Direktorat Rumah Umum	1	Paling lama 5	
	Lingkungan Ahli Pertama	Lingkungan	Dan Komersial, Direktorat		(lima) tahun	
			Jenderal Perumahan			
637	Teknik Tata Bangunan	D.IV Teknik Arsitektur/D.IV	Balai Prasarana	1	Paling lama 5	
	Dan Perumahan Ahli	Arsitektur/D.IV Teknik Sipil/D.IV	Permukiman Wilayah Aceh,		(lima) tahun	
	Pertama	Teknik Konstruksi Gedung/S.1	Direktorat Jenderal Cipta			
		Teknik Arsitektur/S.1 Teknik	Karya			
		Sipil/D.IV Teknik Perawatan Dan				
		Perbaikan Gedung/S.1 Arsitektur				
638	Teknik Tata Bangunan	D.IV Teknik Arsitektur/D.IV	Balai Prasarana	1	Paling lama 5	
	Dan Perumahan Ahli	Arsitektur/D.IV Teknik Sipil/D.IV	Permukiman Wilayah Bali,		(lima) tahun	
	Pertama	Teknik Konstruksi Gedung/S.1	Direktorat Jenderal Cipta			
		Teknik Arsitektur/S.1 Teknik	Karya			
		Sipil/D.IV Teknik Perawatan Dan	_			
		Perbaikan Gedung/S.1 Arsitektur				
639	Teknik Tata Bangunan	D.IV Teknik Arsitektur/D.IV	Balai Prasarana	1	Paling lama 5	
	Dan Perumahan Ahli	Arsitektur/D.IV Teknik Sipil/D.IV	Permukiman Wilayah Jambi,		(lima) tahun	
	Pertama	Teknik Konstruksi Gedung/S.1	Direktorat Jenderal Cipta			
		Teknik Arsitektur/S.1 Teknik	Karya			
		Sipil/D.IV Teknik Perawatan Dan				
		Perbaikan Gedung/S.1 Arsitektur				
640	Teknik Tata Bangunan	D.IV Teknik Arsitektur/D.IV	Balai Prasarana	1	Paling lama 5	
	Dan Perumahan Ahli	Arsitektur/D.IV Teknik Sipil/D.IV	Permukiman Wilayah Jawa		(lima) tahun	
	Pertama	Teknik Konstruksi Gedung/S.1	Tengah, Direktorat Jenderal		(
	. Grama	Teknik Arsitektur/S.1 Teknik	Cipta Karya			
		Sipil/D.IV Teknik Perawatan Dan	o più riarya			
		Perbaikan Gedung/S.1 Arsitektur				
641	Teknik Tata Bangunan	D.IV Teknik Arsitektur/D.IV	Balai Prasarana	1	Paling lama 5	
	Dan Perumahan Ahli	Arsitektur/D.IV Teknik Sipil/D.IV	Permukiman Wilayah Jawa		(lima) tahun	
	Pertama	Teknik Konstruksi Gedung/S.1	Timur, Direktorat Jenderal		(iiiia) tallall	
	i Gitailla	Teknik Arsitektur/S.1 Teknik	Cipta Karya			
		Sipil/D.IV Teknik Perawatan Dan	Oipia Nai ya			
		Perbaikan Gedung/S.1 Arsitektur				
642	Teknik Tata Bangunan	D.IV Teknik Arsitektur/D.IV	Balai Prasarana	2	Paling lama 5	
042	Dan Perumahan Ahli	Arsitektur/D.IV Teknik Sipil/D.IV	Permukiman Wilayah	2	(lima) tahun	
		Teknik Konstruksi Gedung/S.1	Kalimantan Utara, Direktorat		(iiiiia) tallull	
	Pertama	Teknik Konstruksi Gedung/s. i Teknik Arsitektur/S.1 Teknik				
			Jenderal Cipta Karya			
		Sipil/D.IV Teknik Perawatan Dan				
		Perbaikan Gedung/S.1 Arsitektur				

643	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Ahli Pertama Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Ahli Pertama	D.IV Teknik Arsitektur/D.IV Arsitektur/D.IV Teknik Sipil/D.IV Teknik Konstruksi Gedung/S.1 Teknik Arsitektur/S.1 Teknik Sipil/D.IV Teknik Perawatan Dan Perbaikan Gedung/S.1 Arsitektur D.IV Teknik Arsitektur/D.IV Arsitektur/D.IV Teknik Sipil/D.IV Teknik Konstruksi Gedung/S.1 Teknik Arsitektur/S.1 Teknik	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Lampung, Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Barat, Direktorat Jenderal Cipta Karya		Paling lama 5 (lima) tahun Paling lama 5 (lima) tahun	
645	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Ahli Pertama	Sipil/D.IV Teknik Perawatan Dan Perbaikan Gedung/S.1 Arsitektur D.IV Teknik Arsitektur/D.IV Arsitektur/D.IV Teknik Sipil/D.IV Teknik Konstruksi Gedung/S.1 Teknik Arsitektur/S.1 Teknik Sipil/D.IV Teknik Perawatan Dan Perbaikan Gedung/S.1 Arsitektur	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Tengah, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
646	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Ahli Pertama	D.IV Teknik Arsitektur/D.IV Arsitektur/D.IV Teknik Sipil/D.IV Teknik Konstruksi Gedung/S.1 Teknik Arsitektur/S.1 Teknik Sipil/D.IV Teknik Perawatan Dan Perbaikan Gedung/S.1 Arsitektur	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
647	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Ahli Pertama	D.IV Teknik Arsitektur/D.IV Arsitektur/D.IV Teknik Sipil/D.IV Teknik Konstruksi Gedung/S.1 Teknik Arsitektur/S.1 Teknik Sipil/D.IV Teknik Perawatan Dan Perbaikan Gedung/S.1 Arsitektur	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Utara, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
648	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Ahli Pertama	D.IV Arsitektur/S.1 Teknik Arsitektur/S.1 Teknik Sipil/D.IV Teknik Perawatan Dan Perbaikan Gedung/S.1 Arsitektur/S.1 Teknik Konstruksi Bangunan/D.IV Teknik Konstruksi Bangunan	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
649	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Ahli Pertama	D.IV Teknik Arsitektur/D.IV Arsitektur/D.IV Teknik Sipil/D.IV Teknik Konstruksi Gedung/S.1 Teknik Arsitektur/S.1 Teknik Sipil/D.IV Teknik Perawatan Dan Perbaikan Gedung/S.1 Arsitektur	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa II, Direktorat Jenderal Perumahan		Paling lama 5 (lima) tahun	

650	Teknik Tata Bangunan	D.IV Teknik Arsitektur/D.IV	Balai Pelaksana Penyediaan	8	Paling lama 5	<u> </u>
	Dan Perumahan Ahli	Arsitektur/D.IV Teknik Sipil/D.IV	Perumahan Kalimantan I,	0	(lima) tahun	
	Pertama	Teknik Konstruksi Gedung/S.1	Direktorat Jenderal		(IIIIIa) tariuri	
	Fertailia	Teknik Arsitektur/S.1 Teknik	Perumahan			
			Perumanan			
		Sipil/D.IV Teknik Perawatan Dan				
CE4	Taknik Tata Danayanan	Perbaikan Gedung/S.1 Arsitektur	Dalai Dalakaana Danyadiaan	0	Deline lema F	
651	Teknik Tata Bangunan	D.IV Teknik Arsitektur/D.IV	Balai Pelaksana Penyediaan	8	Paling lama 5	
	Dan Perumahan Ahli	Arsitektur/D.IV Teknik Sipil/D.IV	Perumahan Kalimantan II,		(lima) tahun	
	Pertama	Teknik Konstruksi Gedung/S.1	Direktorat Jenderal			
		Teknik Arsitektur/S.1 Teknik	Perumahan			
		Sipil/D.IV Teknik Perawatan Dan				
		Perbaikan Gedung/S.1 Arsitektur				
652	Teknik Tata Bangunan	D.IV Teknik Arsitektur/D.IV	Balai Pelaksana Penyediaan	4	Paling lama 5	
	Dan Perumahan Ahli	Arsitektur/D.IV Teknik Sipil/D.IV	Perumahan Maluku,		(lima) tahun	
	Pertama	Teknik Konstruksi Gedung/S.1	Direktorat Jenderal			
		Teknik Arsitektur/S.1 Teknik	Perumahan			
		Sipil/D.IV Teknik Perawatan Dan				
		Perbaikan Gedung/S.1 Arsitektur				
653	Teknik Tata Bangunan	D.IV Teknik Arsitektur/D.IV	Balai Pelaksana Penyediaan	3	Paling lama 5	
	Dan Perumahan Ahli	Arsitektur/D.IV Teknik Sipil/D.IV	Perumahan Nusa Tenggara		(lima) tahun	
	Pertama	Teknik Konstruksi Gedung/S.1	I, Direktorat Jenderal			
		Teknik Arsitektur/S.1 Teknik	Perumahan			
		Sipil/D.IV Teknik Perawatan Dan				
		Perbaikan Gedung/S.1 Arsitektur				
654	Teknik Tata Bangunan	D.IV Teknik Arsitektur/D.IV	Balai Pelaksana Penyediaan	3	Paling lama 5	
	Dan Perumahan Ahli	Arsitektur/D.IV Teknik Sipil/D.IV	Perumahan Nusa Tenggara		(lima) tahun	
	Pertama	Teknik Konstruksi Gedung/S.1	II, Direktorat Jenderal		,	
		Teknik Arsitektur/S.1 Teknik	Perumahan			
		Sipil/D.IV Teknik Perawatan Dan				
		Perbaikan Gedung/S.1 Arsitektur				
655	Teknik Tata Bangunan	D.IV Teknik Arsitektur/D.IV	Balai Pelaksana Penyediaan	3	Paling lama 5	
	Dan Perumahan Ahli	Arsitektur/D.IV Teknik Sipil/D.IV	Perumahan Papua I,		(lima) tahun	
	Pertama	Teknik Konstruksi Gedung/S.1	Direktorat Jenderal		(
		Teknik Arsitektur/S.1 Teknik	Perumahan			
		Sipil/D.IV Teknik Perawatan Dan	l oranianan			
		Perbaikan Gedung/S.1 Arsitektur				
656	Teknik Tata Bangunan	D.IV Teknik Arsitektur/D.IV	Balai Pelaksana Penyediaan	7	Paling lama 5	
	Dan Perumahan Ahli	Arsitektur/D.IV Teknik Sipil/D.IV	Perumahan Papua II,	,	(lima) tahun	
	Pertama	Teknik Konstruksi Gedung/S.1	Direktorat Jenderal		(iiiia) tanun	
	ortaina	Teknik Arsitektur/S.1 Teknik	Perumahan			
		Sipil/D.IV Teknik Perawatan Dan				
		Perbaikan Gedung/S.1 Arsitektur				
		Ir erbaikari Geduriy/S. I Arsilektul				

	<u></u>		1	1	T	•
657	Teknik Tata Bangunan	D.IV Teknik Arsitektur/D.IV	Balai Pelaksana Penyediaan	4	Paling lama 5	
	Dan Perumahan Ahli	Arsitektur/D.IV Teknik Sipil/D.IV	Perumahan Sumatera I,		(lima) tahun	
	Pertama	Teknik Konstruksi Gedung/S.1	Direktorat Jenderal			
		Teknik Arsitektur/S.1 Teknik	Perumahan			
		Sipil/D.IV Teknik Perawatan Dan				
		Perbaikan Gedung/S.1 Arsitektur				
658	Teknik Tata Bangunan	D.IV Teknik Arsitektur/D.IV	Balai Pelaksana Penyediaan	5	Paling lama 5	
	Dan Perumahan Ahli	Arsitektur/D.IV Teknik Sipil/D.IV	Perumahan Sumatera III,		(lima) tahun	
	Pertama	Teknik Konstruksi Gedung/S.1	Direktorat Jenderal			
		Teknik Arsitektur/S.1 Teknik	Perumahan			
		Sipil/D.IV Teknik Perawatan Dan				
		Perbaikan Gedung/S.1 Arsitektur				
659	Teknik Tata Bangunan	D.IV Teknik Arsitektur/D.IV	Balai Pelaksana Penyediaan	3	Paling lama 5	
	Dan Perumahan Ahli	Arsitektur/D.IV Teknik Sipil/D.IV	Perumahan Sumatera IV,		(lima) tahun	
	Pertama	Teknik Konstruksi Gedung/S.1	Direktorat Jenderal		<u> </u>	
		Teknik Arsitektur/S.1 Teknik	Perumahan			
		Sipil/D.IV Teknik Perawatan Dan				
		Perbaikan Gedung/S.1 Arsitektur				
660	Teknik Tata Bangunan	D.IV Teknik Arsitektur/D.IV	Balai Pelaksana Penyediaan	2	Paling lama 5	
	Dan Perumahan Ahli	Arsitektur/D.IV Teknik Sipil/D.IV	Perumahan Sumatera V,		(lima) tahun	
	Pertama	Teknik Konstruksi Gedung/S.1	Direktorat Jenderal		,	
		Teknik Arsitektur/S.1 Teknik	Perumahan			
		Sipil/D.IV Teknik Perawatan Dan				
		Perbaikan Gedung/S.1 Arsitektur				
661	Teknik Tata Bangunan	D.IV Teknik Arsitektur/D.IV	Direktorat Rumah Swadaya,	2	Paling lama 5	
	Dan Perumahan Ahli	Arsitektur/D.IV Teknik Sipil/D.IV	Direktorat Jenderal	_	(lima) tahun	
	Pertama	Teknik Konstruksi Gedung/S.1	Perumahan		(
		Teknik Arsitektur/S.1 Teknik				
		Sipil/D.IV Teknik Perawatan Dan				
		Perbaikan Gedung/S.1 Arsitektur				
662	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III	Balai Pendidikan Dan	1	Paling lama 5	
		Administrasi Perkantoran/D.III	Pelatihan Pekerjaan Umum		(lima) tahun	
		Perpustakaan/D.III Kearsipan/D.III	Dan Perumahan Rakyat			
		Perkantoran/D.III Manajemen	Wilayah I Medan, Badan			
		Perkantoran/D.III Administrasi Publik				
			Daya Manusia			
663	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III	Balai Pendidikan Dan	1	Paling lama 5	
		Administrasi Perkantoran/D.III	Pelatihan Pekerjaan Umum		(lima) tahun	
		Perpustakaan/D.III Kearsipan/D.III	Dan Perumahan Rakyat		(a) tariari	
		Perkantoran/D.III Manajemen	Wilayah II Palembang,			
		Perkantoran/D.III Administrasi Publik	_			
		- Straintorally B.III Administrator I abilit	Sumber Daya Manusia			
			Camboi Daya Manasia			

	Arsiparis Terampil Arsiparis Terampil	Administrasi Perkantoran/D.III Perpustakaan/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran/D.III Administrasi Publik D.III Kesekretariatan/D.III	Balai Pendidikan Dan Pelatihan Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Wilayah III Jakarta, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Balai Pendidikan Dan Pelatihan Pekerjaan Umum	2	Paling lama 5 (lima) tahun Paling lama 5 (lima) tahun	
		Perpustakaan/D.III Kearsipan/D.III	Dan Perumahan Rakyat Wilayah IV Bandung, Badan		(iiiia) tanan	
666	Arsiparis Terampil	Perpustakaan/D.III Kearsipan/D.III	Balai Pendidikan Dan Pelatihan Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Wilayah IX Jayapura, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Paling lama 5 (lima) tahun	
667	Arsiparis Terampil	Administrasi Perkantoran/D.III Perpustakaan/D.III Kearsipan/D.III	Balai Pendidikan Dan Pelatihan Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Wilayah V Yogyakarta, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
668	Arsiparis Terampil	Administrasi Perkantoran/D.III Perpustakaan/D.III Kearsipan/D.III	Balai Pendidikan Dan Pelatihan Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Wilayah VI Surabaya, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Paling lama 5 (lima) tahun	
669	Arsiparis Terampil	Administrasi Perkantoran/D.III Perpustakaan/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran/D.III Administrasi Publik	Balai Pendidikan Dan Pelatihan Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Wilayah VII Banjarmasin, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Paling lama 5 (lima) tahun	

	Arsiparis Terampil	Administrasi Perkantoran/D.III Perpustakaan/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran/D.III Administrasi Publik	Sumber Daya Manusia	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
671	Arsiparis Terampil		Balai Penilaian Kompetensi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
672	Arsiparis Terampil		Politeknik Pekerjaan Umum, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
673	Arsiparis Terampil	Administrasi Perkantoran/D.III Perpustakaan/D.III Kearsipan/D.III	Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
674	Arsiparis Terampil	Administrasi Perkantoran/D.III Perpustakaan/D.III Kearsipan/D.III	Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air Dan Permukiman, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
675	Arsiparis Terampil	Administrasi Perkantoran/D.III Perpustakaan/D.III Kearsipan/D.III	Pusat Pengembangan Talenta, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
676	Arsiparis Terampil	Perpustakaan/D.III Kearsipan/D.III	Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	Paling lama 5 (lima) tahun	

	A · · - · ·	In m. v	In	Ι .	Б. г -	T
	Arsiparis Terampil	Perpustakaan/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran/D.III Administrasi Publik	Balai Jasa Konstruksi Wilayah I Aceh, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
678	Arsiparis Terampil	Administrasi Perkantoran/D.III Perpustakaan/D.III Kearsipan/D.III	Balai Jasa Konstruksi Wilayah II Palembang, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
679	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Perpustakaan/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran/D.III Administrasi Publik	Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Jakarta, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
680	Arsiparis Terampil	Perpustakaan/D.III Kearsipan/D.III	Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
681	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Perpustakaan/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran/D.III Administrasi Publik	Balai Jasa Konstruksi Wilayah V Banjarmasin, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
682	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Perpustakaan/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran/D.III Administrasi Publik	Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
683	Arsiparis Terampil	Perpustakaan/D.III Kearsipan/D.III	Balai Jasa Konstruksi Wilayah VII Jayapura, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	1	Paling lama 5 (lima) tahun	

	<u>-</u>	I=	<u> </u>	I -		Γ
	Arsiparis Terampil	Administrasi Perkantoran/D.III Perpustakaan/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran/D.III Administrasi Publik	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Bali, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
685	Arsiparis Terampil	Administrasi Perkantoran/D.III	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Bangka Belitung, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
686	Arsiparis Terampil	Administrasi Perkantoran/D.III Perpustakaan/D.III Kearsipan/D.III	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Banten, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
687	Arsiparis Terampil	Administrasi Perkantoran/D.III	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Bengkulu, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
688	Arsiparis Terampil	Administrasi Perkantoran/D.III	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah D.I. Yogyakarta, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
689	Arsiparis Terampil	Administrasi Perkantoran/D.III	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah DKI Jakarta, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
690	Arsiparis Terampil	Administrasi Perkantoran/D.III	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Gorontalo, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	1	Paling lama 5 (lima) tahun	

		T=				
691	Arsiparis Terampil	Administrasi Perkantoran/D.III Perpustakaan/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran/D.III Administrasi Publik	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Barat, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi		Paling lama 5 (lima) tahun	
692	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Perpustakaan/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran/D.III Administrasi Publik	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Tengah, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi		Paling lama 5 (lima) tahun	
693	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Perpustakaan/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran/D.III Administrasi Publik	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Timur, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi		Paling lama 5 (lima) tahun	
694	Arsiparis Terampil	Administrasi Perkantoran/D.III	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Barat, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi		Paling lama 5 (lima) tahun	
695	Arsiparis Terampil	Administrasi Perkantoran/D.III Perpustakaan/D.III Kearsipan/D.III	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Selatan, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
696	Arsiparis Terampil	Administrasi Perkantoran/D.III Perpustakaan/D.III Kearsipan/D.III	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Tengah, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi		Paling lama 5 (lima) tahun	
697	Arsiparis Terampil	Administrasi Perkantoran/D.III Perpustakaan/D.III Kearsipan/D.III	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Timur, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi		Paling lama 5 (lima) tahun	

698	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III	Balai Pelaksana Pemilihan	1	Paling lama 5	
		Administrasi Perkantoran/D.III Perpustakaan/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran/D.III Administrasi Publik	Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Utara, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi		(lima) tahun	
699	Arsiparis Terampil	Administrasi Perkantoran/D.III	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Maluku Utara, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
700	Arsiparis Terampil	Administrasi Perkantoran/D.III Perpustakaan/D.III Kearsipan/D.III	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Maluku, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
701	Arsiparis Terampil	Administrasi Perkantoran/D.III Perpustakaan/D.III Kearsipan/D.III	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Nusa Tenggara Barat, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
702	Arsiparis Terampil	Administrasi Perkantoran/D.III Perpustakaan/D.III Kearsipan/D.III	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Nusa Tenggara Timur, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
703	Arsiparis Terampil	Administrasi Perkantoran/D.III	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Papua Barat, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
704	Arsiparis Terampil	Administrasi Perkantoran/D.III Perpustakaan/D.III Kearsipan/D.III	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Papua, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi		Paling lama 5 (lima) tahun	

	I _	T=	<u> </u>			Γ
	Arsiparis Terampil	Administrasi Perkantoran/D.III Perpustakaan/D.III Kearsipan/D.III	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Riau, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi		Paling lama 5 (lima) tahun	
706	Arsiparis Terampil	Administrasi Perkantoran/D.III	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Barat, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi		Paling lama 5 (lima) tahun	
707	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Perpustakaan/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran/D.III Administrasi Publik	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Selatan, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi		Paling lama 5 (lima) tahun	
708	Arsiparis Terampil	Administrasi Perkantoran/D.III	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Tengah, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi		Paling lama 5 (lima) tahun	
709	Arsiparis Terampil	Administrasi Perkantoran/D.III Perpustakaan/D.III Kearsipan/D.III	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Tenggara, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
710	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Perpustakaan/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran/D.III Administrasi Publik	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Utara, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi		Paling lama 5 (lima) tahun	
711	Arsiparis Terampil	Administrasi Perkantoran/D.III	Direktorat Bina Kelembagaan Dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi		Paling lama 5 (lima) tahun	

712	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Perpustakaan/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran/D.III Administrasi Publik	Direktorat Keberlanjutan Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
713	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Perpustakaan/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran/D.III Administrasi Publik	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
714	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Perpustakaan/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran/D.III Administrasi Publik	Sekretariat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
715	Arsiparis Terampil	D.III Hubungan Masyarakat/D.III Komunikasi/D.III Jurnalistik/D.III Manajemen Komunikasi	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah - DI Yogyakarta, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
716	Arsiparis Terampil	D.III Kearsipan	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta - Jawa Barat, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
717	Arsiparis Terampil	D.III Kearsipan	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah - DI Yogyakarta, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
718	Arsiparis Terampil	D.III Kearsipan	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
	Arsiparis Terampil	D.III Kearsipan	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
720	Arsiparis Terampil	D.III Kearsipan	Balai Geoteknik Terowongan Dan Struktur, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	

721	Arsiparis Terampil	D.III Kearsipan	Balai Pelaksanaan Jalan	1	Paling lama 5	
121	Alsiparis Terampii	D.III Real Sipali	Nasional Aceh, Direktorat	ı	(lima) tahun	
			Jenderal Bina Marga		(iiiia) tanun	
722	Arsiparis Terampil	D.III Kearsipan	Balai Pelaksanaan Jalan	2	Paling lama 5	
122	Alsipans retainpii	D.III Real sipali	Nasional Bengkulu,	2	(lima) tahun	
			Direktorat Jenderal Bina		(IIIIIa) tariuri	
			Marga			
700	Arainaria Taramail	D.III Kearsipan	Balai Pelaksanaan Jalan	1	Doling Jame F	
723	Arsiparis Terampil	D.III Kearsipan		I	Paling lama 5	
			Nasional Gorontalo,		(lima) tahun	
			Direktorat Jenderal Bina			
704	A : : T ::	D.III.I.	Marga		D !! ! .	
724	Arsiparis Terampil	D.III Kearsipan	Balai Pelaksanaan Jalan	1	Paling lama 5	
			Nasional Kalimantan		(lima) tahun	
			Selatan, Direktorat Jenderal			
			Bina Marga			
725	Arsiparis Terampil	D.III Kearsipan	Balai Pelaksanaan Jalan	3	Paling lama 5	
			Nasional Kepulauan Riau,		(lima) tahun	
			Direktorat Jenderal Bina			
			Marga			
726	Arsiparis Terampil	D.III Kearsipan	Balai Pelaksanaan Jalan	3	Paling lama 5	
			Nasional Lampung,		(lima) tahun	
			Direktorat Jenderal Bina			
			Marga			
727	Arsiparis Terampil	D.III Kearsipan	Balai Pelaksanaan Jalan	1	Paling lama 5	
			Nasional Maluku Utara,		(lima) tahun	
			Direktorat Jenderal Bina			
			Marga			
728	Arsiparis Terampil	D.III Kearsipan	Balai Pelaksanaan Jalan	2	Paling lama 5	
	·	·	Nasional Nusa Tenggara		(lima) tahun	
			Timur, Direktorat Jenderal		,	
			Bina Marga			
729	Arsiparis Terampil	D.III Kearsipan	Balai Pelaksanaan Jalan	2	Paling lama 5	
			Nasional Riau, Direktorat		(lima) tahun	
			Jenderal Bina Marga		(
730	Arsiparis Terampil	D.III Kearsipan	Balai Pelaksanaan Jalan	1	Paling lama 5	
. 55			Nasional Sulawesi Tengah,	•	(lima) tahun	
			Direktorat Jenderal Bina			
			Marga			
731	Arsiparis Terampil	D.III Kearsipan	Balai Pelaksanaan Jalan	3	Paling lama 5	
, 51		2.iii Rearsipan	Nasional Sulawesi Utara,	5	(lima) tahun	
			Direktorat Jenderal Bina		(iiiia) tariuri	
722	Arsiparis Terampil	D.III.Kooroinan	Marga Balai Pelaksanaan Jalan	2	Doling lama F	
732	Arsiparis retampli	D.III Kearsipan		2	Paling lama 5	
			Nasional Sumatera Barat,		(lima) tahun	
			Direktorat Jenderal Bina			
			Marga			

733	Arsiparis Terampil	D.III Kearsipan	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wamena, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun
734	Arsiparis Terampil	D.III Kearsipan	Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Direktorat Jenderal Bina Marga	2	Paling lama 5 (lima) tahun
735	Arsiparis Terampil	D.III Kearsipan	Direktorat Pembangunan Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun
736	Arsiparis Terampil	D.III Kearsipan	Direktorat Sistem Dan Strategi Penyelenggaraan Jalan Dan Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun
737	Arsiparis Terampil	D.III Kearsipan	Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun
738	Arsiparis Terampil	D.III Kearsipan	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Bina Marga	2	Paling lama 5 (lima) tahun
739	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran	Balai Bahan Dan Struktur Bangunan Gedung, Direktorat Jenderal Cipta Karya	3	Paling lama 5 (lima) tahun
740	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran	Balai Kawasan Permukiman Dan Perumahan, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun
741	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Aceh, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun
	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun
743	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bangka Belitung, Direktorat Jenderal Cipta Karya	4	Paling lama 5 (lima) tahun

	1	T	1	1	T	T
744	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III	Balai Prasarana	5	Paling lama 5	
		Administrasi Perkantoran/D.III	Permukiman Wilayah		(lima) tahun	
		Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III	Banten, Direktorat Jenderal			
		Manajemen Perkantoran	Cipta Karya			
745	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III	Balai Prasarana	2	Paling lama 5	
		Administrasi Perkantoran/D.III	Permukiman Wilayah		(lima) tahun	
		Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III	Bengkulu, Direktorat			
		Manajemen Perkantoran	Jenderal Cipta Karya			
746	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III	Balai Prasarana	4	Paling lama 5	
		Administrasi Perkantoran/D.III	Permukiman Wilayah D.I.		(lima) tahun	
		Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III	Yogyakarta, Direktorat			
		Manajemen Perkantoran	Jenderal Cipta Karya			
747	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III	Balai Prasarana	4	Paling lama 5	
		Administrasi Perkantoran/D.III	Permukiman Wilayah		(lima) tahun	
		Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III	Gorontalo, Direktorat			
		Manajemen Perkantoran	Jenderal Cipta Karya			
748	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III	Balai Prasarana	2	Paling lama 5	
		Administrasi Perkantoran/D.III	Permukiman Wilayah		(lima) tahun	
		Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III	Jakarta Metropolitan,			
		Manajemen Perkantoran	Direktorat Jenderal Cipta			
			Karya			
749	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III	Balai Prasarana	2	Paling lama 5	
		Administrasi Perkantoran/D.III	Permukiman Wilayah Jambi,		(lima) tahun	
		Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III	Direktorat Jenderal Cipta			
		Manajemen Perkantoran	Karya			
750	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III	Balai Prasarana	2	Paling lama 5	
		Administrasi Perkantoran/D.III	Permukiman Wilayah Jawa		(lima) tahun	
		Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III	Barat, Direktorat Jenderal			
		Manajemen Perkantoran	Cipta Karya			
751	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III	Balai Prasarana	6	Paling lama 5	
		Administrasi Perkantoran/D.III	Permukiman Wilayah Jawa		(lima) tahun	
		Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III	Tengah, Direktorat Jenderal			
		Manajemen Perkantoran	Cipta Karya			
752	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III	Balai Prasarana	3	Paling lama 5	
		Administrasi Perkantoran/D.III	Permukiman Wilayah Jawa		(lima) tahun	
		Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III	Timur, Direktorat Jenderal			
		Manajemen Perkantoran	Cipta Karya			
753	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III	Balai Prasarana	3	Paling lama 5	
		Administrasi Perkantoran/D.III	Permukiman Wilayah		(lima) tahun	
		Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III	Kalimantan Barat, Direktorat		,	
		Manajemen Perkantoran	Jenderal Cipta Karya			

	Ia · · + "	In way 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	In n	_	ID 1: 1 = 1	
754	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III	Balai Prasarana	5	Paling lama 5	
		Administrasi Perkantoran/D.III	Permukiman Wilayah		(lima) tahun	
		Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III	Kalimantan Selatan,			
		Manajemen Perkantoran	Direktorat Jenderal Cipta			
			Karya			
755	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III	Balai Prasarana	5	Paling lama 5	
		Administrasi Perkantoran/D.III	Permukiman Wilayah		(lima) tahun	
		Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III	Kalimantan Tengah,			
		Manajemen Perkantoran	Direktorat Jenderal Cipta			
			Karya			
756	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III	Balai Prasarana	5	Paling lama 5	
		Administrasi Perkantoran/D.III	Permukiman Wilayah		(lima) tahun	
		Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III	Kalimantan Timur,		` ,	
		Manajemen Perkantoran	Direktorat Jenderal Cipta			
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Karya			
757	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III	Balai Prasarana	5	Paling lama 5	
		Administrasi Perkantoran/D.III	Permukiman Wilayah		(lima) tahun	
		Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III	Kalimantan Utara, Direktorat		,	
		Manajemen Perkantoran	Jenderal Cipta Karya			
		- Manajomon i omamoran	Josepha Harya			
758	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III	Balai Prasarana	2	Paling lama 5	
		Administrasi Perkantoran/D.III	Permukiman Wilayah		(lima) tahun	
		Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III	Kepulauan Riau, Direktorat		()	
		Manajemen Perkantoran	Jenderal Cipta Karya			
		ivianajomon i orkantoran	obridorar orpid ridiya			
759	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III	Balai Prasarana	2	Paling lama 5	
		Administrasi Perkantoran/D.III	Permukiman Wilayah		(lima) tahun	
		Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III	Lampung, Direktorat		,	
		Manajemen Perkantoran	Jenderal Cipta Karya			
760	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III	Balai Prasarana	1	Paling lama 5	
	'	Administrasi Perkantoran/D.III	Permukiman Wilayah		(lima) tahun	
		Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III	Maluku Utara, Direktorat		<u>'</u>	
		Manajemen Perkantoran	Jenderal Cipta Karya			
761	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III	Balai Prasarana	2	Paling lama 5	
	' '	Administrasi Perkantoran/D.III	Permukiman Wilayah		(lima) tahun	
		Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III	Maluku, Direktorat Jenderal		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	
		Manajemen Perkantoran	Cipta Karya			
762	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III	Balai Prasarana	2	Paling lama 5	
		Administrasi Perkantoran/D.III	Permukiman Wilayah Nusa	_	(lima) tahun	
		Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III	Tenggara Barat, Direktorat		() tarrarr	
		Manajemen Perkantoran	Jenderal Cipta Karya			
			osilasiai sipia itaiya			
	i					

763	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Timur, Direktorat Jenderal Cipta Karya	6	Paling lama 5 (lima) tahun
764	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua Barat, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun
	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua, Direktorat Jenderal Cipta Karya	4	Paling lama 5 (lima) tahun
	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Riau, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun
	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Barat, Direktorat Jenderal Cipta Karya	4	Paling lama 5 (lima) tahun
768	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Selatan, Direktorat Jenderal Cipta Karya	3	Paling lama 5 (lima) tahun
769	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Tengah, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun
770	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Tenggara, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun
	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun
772	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun

	Arsiparis Terampil		Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Selatan, Direktorat Jenderal Cipta Karya	4	Paling lama 5 (lima) tahun	
774	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Utara, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
	Arsiparis Terampil	Manajemen Perkantoran	Balai Sains Bangunan, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
	Arsiparis Terampil	Manajemen Perkantoran	Balai Teknologi Air Minum, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran	Balai Teknologi Sanitasi, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
778	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran	Direktorat Bina Penataan Bangunan, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
779	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran	Direktorat Kepatuhan Intern, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
780	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran	Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
781	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Perpustakaan/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran/D.III Administrasi Publik	Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	

	I 	I=				
	Arsiparis Terampil	Administrasi Perkantoran/D.III Perpustakaan/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran/D.III Administrasi Publik	Inspektorat I, Inspektorat Jenderal	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
783	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Perpustakaan/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran/D.III Administrasi Publik	Inspektorat II, Inspektorat Jenderal	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
784	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Perpustakaan/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran/D.III Administrasi Publik	Inspektorat IV, Inspektorat Jenderal	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
785	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Perpustakaan/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran/D.III Administrasi Publik	Inspektorat V, Inspektorat Jenderal	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
786	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Perpustakaan/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran/D.III Administrasi Publik	Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
787	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Perpustakaan/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran/D.III Administrasi Publik	Biro Kepegawaian Organisasi Dan Tata Laksana, Sekretariat Jenderal	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
788	Arsiparis Terampil		Biro Pengelolaan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal	2	Paling lama 5 (lima) tahun	

789	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Perpustakaan/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran/D.III Administrasi Publik	Biro Perencanaan Anggaran Dan Kerja Sama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal	Paling lama 5 (lima) tahun	
790	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Perpustakaan/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran/D.III Administrasi Publik	Biro Umum, Sekretariat Jenderal	Paling lama 5 (lima) tahun	
791	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Perpustakaan/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran/D.III Administrasi Publik	Pusat Analisis Pelaksanaan Kebijakan, Sekretariat Jenderal	Paling lama 5 (lima) tahun	
792	Arsiparis Terampil	D.III Kesekretariatan/D.III Administrasi Perkantoran/D.III Perpustakaan/D.III Kearsipan/D.III Perkantoran/D.III Manajemen Perkantoran/D.III Administrasi Publik	Pusat Data Dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal	Paling lama 5 (lima) tahun	
	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	D.III Hubungan Masyarakat/D.III Komunikasi/D.III Jurnalistik/D.III Manajemen Komunikasi	Balai Pendidikan Dan Pelatihan Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Wilayah I Medan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Paling lama 5 (lima) tahun	
	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	D.III Hubungan Masyarakat/D.III Komunikasi/D.III Jurnalistik/D.III Manajemen Komunikasi	Balai Pendidikan Dan Pelatihan Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Wilayah II Palembang, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Paling lama 5 (lima) tahun	
	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	D.III Hubungan Masyarakat/D.III Komunikasi/D.III Jurnalistik/D.III Manajemen Komunikasi	Balai Pendidikan Dan Pelatihan Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Wilayah III Jakarta, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Paling lama 5 (lima) tahun	

796	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	D.III Hubungan Masyarakat/D.III Komunikasi/D.III Jurnalistik/D.III Manajemen Komunikasi	Balai Pendidikan Dan Pelatihan Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Wilayah IV Bandung, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
797	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	D.III Hubungan Masyarakat/D.III Komunikasi/D.III Jurnalistik/D.III Manajemen Komunikasi	Balai Pendidikan Dan Pelatihan Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Wilayah IX Jayapura, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
798	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	D.III Hubungan Masyarakat/D.III Komunikasi/D.III Jurnalistik/D.III Manajemen Komunikasi	Balai Pendidikan Dan Pelatihan Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Wilayah V Yogyakarta, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
799	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	D.III Hubungan Masyarakat/D.III Komunikasi/D.III Jurnalistik/D.III Manajemen Komunikasi	Balai Pendidikan Dan Pelatihan Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Wilayah VI Surabaya, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
800	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	D.III Hubungan Masyarakat/D.III Komunikasi/D.III Jurnalistik/D.III Manajemen Komunikasi	Balai Pendidikan Dan Pelatihan Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Wilayah VII Banjarmasin, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
801	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	D.III Hubungan Masyarakat/D.III Komunikasi/D.III Jurnalistik/D.III Manajemen Komunikasi	Balai Pendidikan Dan Pelatihan Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Wilayah VIII Makassar, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	D.III Hubungan Masyarakat/D.III Komunikasi/D.III Jurnalistik/D.III Manajemen Komunikasi	Politeknik Pekerjaan Umum, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	Paling lama 5 (lima) tahun	

000	Int- 11.1	Dilli I de mara Maria de Company	IDt D		In-E	
803	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	D.III Hubungan Masyarakat/D.III Komunikasi/D.III Jurnalistik/D.III Manajemen Komunikasi	Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air Dan Permukiman, Badan	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
		•	Pengembangan Sumber Daya Manusia			
	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	D.III Hubungan Masyarakat/D.III Komunikasi/D.III Jurnalistik/D.III Manajemen Komunikasi	Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	D.III Hubungan Masyarakat/D.III Komunikasi/D.III Jurnalistik	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah - DI Yogyakarta, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
806	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	D.III Hubungan Masyarakat/D.III Komunikasi/D.III Jurnalistik	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur - Bali, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
807	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	D.III Hubungan Masyarakat/D.III Komunikasi/D.III Jurnalistik	Balai Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
808	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	D.III Hubungan Masyarakat/D.III Komunikasi/D.III Jurnalistik	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
809	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	D.III Hubungan Masyarakat/D.III Komunikasi/D.III Jurnalistik	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	D.III Hubungan Masyarakat/D.III Komunikasi/D.III Jurnalistik	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tengah, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	D.III Hubungan Masyarakat/D.III Komunikasi/D.III Jurnalistik	Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Direktorat Jenderal Bina Marga	4	Paling lama 5 (lima) tahun	
812	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	D.III Hubungan Masyarakat/D.III Komunikasi/D.III Jurnalistik	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	

	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil		Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil		Biro Umum, Sekretariat Jenderal	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	Komunikasi/D.III Jurnalistik/D.III Manajemen Komunikasi	Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah, Sekretariat Jenderal	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
816	Pranata Komputer Terampil			1	Paling lama 5 (lima) tahun	
817	Pranata Komputer Terampil	D.III Teknologi Informasi/D.III Teknik Informatika/D.III Ilmu Komputer/D.III Sistem Informasi	Balai Pendidikan Dan Pelatihan Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Wilayah II Palembang, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
818	Pranata Komputer Terampil			1	Paling lama 5 (lima) tahun	
819	Pranata Komputer Terampil	Sistem Informasi	Balai Pendidikan Dan Pelatihan Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Wilayah IV Bandung, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	Paling lama 5 (lima) tahun	

820	Pranata Komputer Terampil	D.III Teknologi Informasi/D.III Teknik Informatika/D.III Ilmu Komputer/D.III Sistem Informasi		2	Paling lama 5 (lima) tahun	
821	Pranata Komputer Terampil	D.III Teknologi Informasi/D.III Teknik Informatika/D.III Ilmu Komputer/D.III Sistem Informasi		1	Paling lama 5 (lima) tahun	
822	Pranata Komputer Terampil	D.III Teknologi Informasi/D.III Teknik Informatika/D.III Ilmu Komputer/D.III Sistem Informasi		2	Paling lama 5 (lima) tahun	
823	Pranata Komputer Terampil	Sistem Informasi	Balai Pendidikan Dan Pelatihan Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Wilayah VII Banjarmasin, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
824	Pranata Komputer Terampil	D.III Teknologi Informasi/D.III Teknik Informatika/D.III Ilmu Komputer/D.III Sistem Informasi		1	Paling lama 5 (lima) tahun	
825	Pranata Komputer Terampil	D.III Teknologi Informasi/D.III Teknik Informatika/D.III Ilmu Komputer/D.III Sistem Informasi		1	Paling lama 5 (lima) tahun	
826	Pranata Komputer Terampil	D.III Teknologi Informasi/D.III Teknik Informatika/D.III Ilmu Komputer/D.III Sistem Informasi		3	Paling lama 5 (lima) tahun	

	Pranata Komputer Terampil		Kompetensi Manajemen, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
828	Pranata Komputer Terampil	D.III Teknologi Informasi/D.III Teknik Informatika/D.III Ilmu Komputer/D.III Sistem Informasi		1	Paling lama 5 (lima) tahun	
829	Pranata Komputer Terampil	D.III Teknik Informatika	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta - Jawa Barat, Direktorat Jenderal Bina Marga	9	Paling lama 5 (lima) tahun	
830	Pranata Komputer Terampil	D.III Teknik Informatika	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah - DI Yogyakarta, Direktorat Jenderal Bina Marga	9	Paling lama 5 (lima) tahun	
831	Pranata Komputer Terampil	D.III Teknik Informatika	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur - Bali, Direktorat Jenderal Bina Marga	7	Paling lama 5 (lima) tahun	
832	Pranata Komputer Terampil	D.III Teknik Informatika	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
833	Pranata Komputer Terampil	D.III Teknik Informatika	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
834	Pranata Komputer Terampil	D.III Teknik Informatika	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
835	Pranata Komputer Terampil	D.III Teknik Informatika	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bangka Belitung, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
	Pranata Komputer Terampil		Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Gorontalo, Direktorat Jenderal Bina Marga	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
837	Pranata Komputer Terampil	D.III Teknik Informatika	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat, Direktorat Jenderal Bina Marga	2	Paling lama 5 (lima) tahun	

	Pranata Komputer Terampil	D.III Teknik Informatika	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Selatan, Direktorat Jenderal Bina Marga	4	Paling lama 5 (lima) tahun	
	Pranata Komputer Terampil	D.III Teknik Informatika	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
840	Pranata Komputer Terampil	D.III Teknik Informatika	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung, Direktorat Jenderal Bina Marga	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
841	Pranata Komputer Terampil	D.III Teknik Informatika	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku Utara, Direktorat Jenderal Bina Marga	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
842	Pranata Komputer Terampil	D.III Teknik Informatika	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
	Pranata Komputer Terampil	D.III Teknik Informatika	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau, Direktorat Jenderal Bina Marga	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
844	Pranata Komputer Terampil	D.III Teknik Informatika	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tengah, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
845	Pranata Komputer Terampil	D.III Teknik Informatika	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Utara, Direktorat Jenderal Bina Marga	3	Paling lama 5 (lima) tahun	
846	Pranata Komputer Terampil	D.III Teknik Informatika	Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Direktorat Jenderal Bina Marga	4	Paling lama 5 (lima) tahun	
847	Pranata Komputer Terampil	D.III Teknik Informatika	Direktorat Kepatuhan Intern, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
	Pranata Komputer Terampil	D.III Teknik Informatika	Direktorat Pembangunan Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
849	Pranata Komputer Terampil	D.III Teknik Informatika	Direktorat Sistem Dan Strategi Penyelenggaraan Jalan Dan Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga	2	Paling lama 5 (lima) tahun	

0=0	D	In many and the	lo		In it is a
850	Pranata Komputer Terampil	D.III Teknik Informatika	Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun
851	Pranata Komputer Terampil		Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Bina Marga	3	Paling lama 5 (lima) tahun
852	Pranata Komputer Terampil	D.III Teknologi Informasi/D.III Teknik Informatika/D.III Ilmu Komputer/D.III Sistem Informasi		1	Paling lama 5 (lima) tahun
853	Pranata Komputer Terampil	D.III Teknologi Informasi/D.III Teknik Informatika/D.III Ilmu Komputer/D.III Sistem Informasi		1	Paling lama 5 (lima) tahun
	Pranata Komputer Terampil	D.III Teknologi Informasi/D.III Teknik Informatika/D.III Ilmu Komputer/D.III Sistem Informasi	Sekretariat Jenderal	2	Paling lama 5 (lima) tahun
855	Pranata Komputer Terampil	D.III Teknologi Informasi/D.III Teknik Informatika/D.III Ilmu Komputer/D.III Sistem Informasi		2	Paling lama 5 (lima) tahun
	Pranata Laboratorium Pendidikan Terampil	D.III Teknik Sipil	Politeknik Pekerjaan Umum, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9	Paling lama 5 (lima) tahun
	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil	Ilmu Kepegawaian	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bengkulu, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun
	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil	Manajemen/D.III Administrasi/D.III Ilmu Kepegawaian	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wamena, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun
859	Pustakawan Terampil	D.III Perpustakaan	Politeknik Pekerjaan Umum, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	Paling lama 5 (lima) tahun
	Statistisi Terampil	D.III Statistika	Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Direktorat Jenderal Bina Marga	4	Paling lama 5 (lima) tahun
861	Surveyor Pemetaan Terampil		Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Direktorat Jenderal Bina Marga	2	Paling lama 5 (lima) tahun

862	Surveyor Pemetaan Terampil	D.III Survey Dan Pemetaan/D.III Informatika/D.III Rekayasa Perangkat Lunak	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tengah, Direktorat Jenderal Bina Marga	3	Paling lama 5 (lima) tahun	
863	Teknik Jalan Dan Jembatan Terampil	D.III Teknik Sipil	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta - Jawa Barat, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
864	Teknik Jalan Dan Jembatan Terampil	D.III Teknik Sipil	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah - DI Yogyakarta, Direktorat Jenderal Bina Marga	50	Paling lama 5 (lima) tahun	
865	Teknik Jalan Dan Jembatan Terampil	D.III Teknik Sipil	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur - Bali, Direktorat Jenderal Bina Marga	40	Paling lama 5 (lima) tahun	
866	Teknik Jalan Dan Jembatan Terampil	D.III Teknik Sipil	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
867	Teknik Jalan Dan Jembatan Terampil	D.III Teknik Sipil	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan, Direktorat Jenderal Bina Marga	5	Paling lama 5 (lima) tahun	
868	Teknik Jalan Dan Jembatan Terampil	D.III Teknik Sipil	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara, Direktorat Jenderal Bina Marga	9	Paling lama 5 (lima) tahun	
869	Teknik Jalan Dan Jembatan Terampil	D.III Teknik Sipil	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
870	Teknik Jalan Dan Jembatan Terampil	D.III Teknik Sipil	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bangka Belitung, Direktorat Jenderal Bina Marga	3	Paling lama 5 (lima) tahun	
871	Teknik Jalan Dan Jembatan Terampil	D.III Teknik Sipil	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Banten, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
872	Teknik Jalan Dan Jembatan Terampil	D.III Teknik Sipil	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bengkulu, Direktorat Jenderal Bina Marga	3	Paling lama 5 (lima) tahun	

	I 	<u> </u>	12		I _	ı
873	Teknik Jalan Dan	D.III Teknik Sipil	Balai Pelaksanaan Jalan	19	Paling lama 5	
	Jembatan Terampil		Nasional Jambi, Direktorat		(lima) tahun	
			Jenderal Bina Marga			
874	Teknik Jalan Dan	D.III Teknik Sipil	Balai Pelaksanaan Jalan	8	Paling lama 5	
	Jembatan Terampil		Nasional Jayapura,		(lima) tahun	
			Direktorat Jenderal Bina			
			Marga			
875	Teknik Jalan Dan	D.III Teknik Sipil	Balai Pelaksanaan Jalan	4	Paling lama 5	
	Jembatan Terampil	·	Nasional Kalimantan Barat,		(lima) tahun	
			Direktorat Jenderal Bina			
			Marga			
876	Teknik Jalan Dan	D.III Teknik Sipil	Balai Pelaksanaan Jalan	2	Paling lama 5	
·	Jembatan Terampil	· '	Nasional Kalimantan		(lima) tahun	
	'		Selatan, Direktorat Jenderal		l` '	
			Bina Marga			
877	Teknik Jalan Dan	D.III Teknik Sipil	Balai Pelaksanaan Jalan	1	Paling lama 5	
	Jembatan Terampil		Nasional Kepulauan Riau,	•	(lima) tahun	
			Direktorat Jenderal Bina		(,	
			Marga			
878	Teknik Jalan Dan	D.III Teknik Sipil	Balai Pelaksanaan Jalan	1	Paling lama 5	
""	Jembatan Terampil	·	Nasional Maluku Utara,	•	(lima) tahun	
	John Datain Torampii		Direktorat Jenderal Bina		(iii/ia) tariari	
			Marga			
879	Teknik Jalan Dan	D.III Teknik Sipil	Balai Pelaksanaan Jalan	4	Paling lama 5	
I 5, 5	Jembatan Terampil	D.III TOKIIIK OIPII	Nasional Maluku, Direktorat	7	(lima) tahun	
	ochibatan refampii		Jenderal Bina Marga		(anna) tanun	
			ochaciai bilia Maiga			
880	Teknik Jalan Dan	D.III Teknik Sipil	Balai Pelaksanaan Jalan	4	Paling lama 5	
555	Jembatan Terampil	D.III TOKIIIK OIPII	Nasional Nusa Tenggara	7	(lima) tahun	
	ochibatan refampii		Timur, Direktorat Jenderal		(iiiia) tariuri	
			Bina Marga			
881	Teknik Jalan Dan	D.III Teknik Sipil	Balai Pelaksanaan Jalan	9	Paling lama 5	
001	Jembatan Terampil	D.III TEKIIK SIPII	Nasional Papua Barat,	ð	(lima) tahun	
			Direktorat Jenderal Bina		(IIIIa) tallull	
			I			
992	Teknik Jalan Dan	D III Toknik Sinil	Marga Balai Pelaksanaan Jalan	6	Daling lama 5	
002		D.III Teknik Sipil		O	Paling lama 5	
	Jembatan Terampil		Nasional Sulawesi Tengah,		(lima) tahun	
			Direktorat Jenderal Bina			
	Takaik Jalan Dan	D. III Takeik Ciail	Marga		Deline Israe F	
883	Teknik Jalan Dan	D.III Teknik Sipil	Balai Pelaksanaan Jalan	2	Paling lama 5	
	Jembatan Terampil		Nasional Sulawesi Utara,		(lima) tahun	
			Direktorat Jenderal Bina			
			Marga			

884	Teknik Jalan Dan Jembatan Terampil	D.III Teknik Sipil	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat, Direktorat Jenderal Bina Marga	5	Paling lama 5 (lima) tahun	
885	Teknik Jalan Dan Jembatan Terampil	D.III Teknik Sipil	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wamena, Direktorat Jenderal Bina Marga	4	Paling lama 5 (lima) tahun	
886	Teknik Jalan Dan Jembatan Terampil	D.III Teknik Sipil	Direktorat Pembangunan Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
887	Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil	D.III Lingkungan/D.III Teknik Sipil/D.III Sanitasi Lingkungan/D.III Sipil/D.III Teknik Lingkungan/D.III Sanitasi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Aceh, Direktorat Jenderal Cipta Karya	6	Paling lama 5 (lima) tahun	D.III Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sipil yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan

000	Talasia Danasahatan	D III I is also as a /D III Talso?	Data: Dana and	0	Dalla a Janea 5	
888	Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil	D.III Lingkungan/D.III Teknik Sipil/D.III Sanitasi Lingkungan/D.III Sipil/D.III Teknik Lingkungan/D.III Sanitasi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali, Direktorat Jenderal Cipta Karya		Paling lama 5 (lima) tahun	D.III Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sipil yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan
889	Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil	D.III Lingkungan/D.III Teknik Sipil/D.III Sanitasi Lingkungan/D.III Sipil/D.III Teknik Lingkungan/D.III Sanitasi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bangka Belitung, Direktorat Jenderal Cipta Karya	5	Paling lama 5 (lima) tahun	D.III Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sipil yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan

890	Teknik Penyehatan	D.III Lingkungan/D.III Teknik	Balai Prasarana	5	Paling lama 5	
	Lingkungan Terampil	Sipil/D.III Sanitasi Lingkungan/D.III	Permukiman Wilayah]	(lima) tahun	D.III Lingkungan yang dimaksud
	Lingkungan Terampii	Sipil/D.III Teknik Lingkungan/D.III	Banten, Direktorat Jenderal		(IIIIIa) tariuri	adalah prodi/peminatan dari D-III
		Sanitasi				Teknik Sipil/Teknik Lingkungan
		Sanitasi	Cipta Karya			(Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu
						lingkungan/ilmu kesehatan
						D.III Sanitasi Lingkungan yang
						dimaksud adalah prodi/peminatan dari
						D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan
						(Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu
						lingkungan/ilmu kesehatan
						D.III Sipil yang dimaksud adalah
						prodi/peminatan dari D-III Teknik
						Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun
						Sipil) bukan rumpun ilmu
						lingkungan/ilmu kesehatan
						D.III Sanitasi yang dimaksud adalah
						prodi/peminatan dari D-III Teknik
						Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun
						Sipil) bukan rumpun ilmu
						lingkungan/ilmu kesehatan
891	Teknik Penyehatan	D.III Lingkungan/D.III Teknik	Balai Prasarana		Paling lama 5	L
	Lingkungan Terampil	Sipil/D.III Sanitasi Lingkungan/D.III	Permukiman Wilayah		(lima) tahun	D.III Lingkungan yang dimaksud
		Sipil/D.III Teknik Lingkungan/D.III	Bengkulu, Direktorat			adalah prodi/peminatan dari D-III
		Sanitasi	Jenderal Cipta Karya			Teknik Sipil/Teknik Lingkungan
						(Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu
						lingkungan/ilmu kesehatan
						D.III Sanitasi Lingkungan yang
						dimaksud adalah prodi/peminatan dari
						D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan
						(Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu
						lingkungan/ilmu kesehatan
						D.III Sipil yang dimaksud adalah
						prodi/peminatan dari D-III Teknik
						Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun
						Sipil) bukan rumpun ilmu
						lingkungan/ilmu kesehatan
						D.III Sanitasi yang dimaksud adalah
						prodi/peminatan dari D-III Teknik
						Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun
						Sipil) bukan rumpun ilmu
						lingkungan/ilmu kesehatan

892	Teknik Penyehatan	D.III Lingkungan/D.III Teknik	Balai Prasarana	3	Paling lama 5	T
	Lingkungan Terampil	Sipil/D.III Sanitasi Lingkungan/D.III	Permukiman Wilayah D.I.		(lima) tahun	D.III Lingkungan yang dimaksud
		Sipil/D.III Teknik Lingkungan/D.III	Yogyakarta, Direktorat		(iiiia) tariari	adalah prodi/peminatan dari D-III
		Sanitasi	Jenderal Cipta Karya			Teknik Sipil/Teknik Lingkungan
		Carnicadi	l condition of pia riarya			(Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu
						lingkungan/ilmu kesehatan
						D.III Sanitasi Lingkungan yang
						dimaksud adalah prodi/peminatan dari
						D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan
						(Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu
						lingkungan/ilmu kesehatan
						D.III Sipil yang dimaksud adalah
						prodi/peminatan dari D-III Teknik
						Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun
						Sipil) bukan rumpun ilmu
						lingkungan/ilmu kesehatan
						D.III Sanitasi yang dimaksud adalah
						prodi/peminatan dari D-III Teknik
						Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun
						Sipil) bukan rumpun ilmu
						lingkungan/ilmu kesehatan
893	Teknik Penyehatan	D.III Lingkungan/D.III Teknik	Balai Prasarana		Paling lama 5	
	Lingkungan Terampil	Sipil/D.III Sanitasi Lingkungan/D.III	Permukiman Wilayah		(lima) tahun	D.III Lingkungan yang dimaksud
		Sipil/D.III Teknik Lingkungan/D.III	Gorontalo, Direktorat			adalah prodi/peminatan dari D-III
		Sanitasi	Jenderal Cipta Karya			Teknik Sipil/Teknik Lingkungan
						(Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu
						lingkungan/ilmu kesehatan
						D.III Sanitasi Lingkungan yang
						dimaksud adalah prodi/peminatan dari
						D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan
						(Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan
						0 0
						D.III Sipil yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik
						Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun
						Sipil) bukan rumpun ilmu
						lingkungan/ilmu kesehatan
						D.III Sanitasi yang dimaksud adalah
						prodi/peminatan dari D-III Teknik
						Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun
						Sipil) bukan rumpun ilmu
						lingkungan/ilmu kesehatan
			i e	1		inighangan/inia hosonatan

201	I 	In march and a march and	In n		5	
894	Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil	D.III Lingkungan/D.III Teknik Sipil/D.III Sanitasi Lingkungan/D.III Sipil/D.III Teknik Lingkungan/D.III Sanitasi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jakarta Metropolitan, Direktorat Jenderal Cipta Karya	3	Paling lama 5 (lima) tahun	D.III Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sipil yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Jeminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu
895	Teknik Penyehatan	D.III Lingkungan/D.III Teknik	Balai Prasarana	6	Paling lama 5	lingkungan/ilmu kesehatan
	Lingkungan Terampil	Sipil/D.III Sanitasi Lingkungan/D.III Sipil/D.III Teknik Lingkungan/D.III Sanitasi	Permukiman Wilayah Jambi, Direktorat Jenderal Cipta Karya		(lima) tahun	D.III Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sipil yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan

000	Toknik Donyohoton	D.III Lingkungen/D.III Teksik	Doloi Droporor s	1.4	Doling Ioma F	
896	Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil	D.III Lingkungan/D.III Teknik Sipil/D.III Sanitasi Lingkungan/D.III Sipil/D.III Teknik Lingkungan/D.III Sanitasi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Barat, Direktorat Jenderal Cipta Karya	14	Paling lama 5 (lima) tahun	D.III Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sipil yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan
897	Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil	D.III Lingkungan/D.III Teknik Sipil/D.III Sanitasi Lingkungan/D.III Sipil/D.III Teknik Lingkungan/D.III Sanitasi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah, Direktorat Jenderal Cipta Karya	22	Paling lama 5 (lima) tahun	D.III Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sipil yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan

000	Tales is Daniel - to-	D. III. Line also see and D. III. T Line 9.	Delei Dreesers	0	Dallan Isrra 5	
898	Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil	D.III Lingkungan/D.III Teknik Sipil/D.III Sanitasi Lingkungan/D.III Sipil/D.III Teknik Lingkungan/D.III Sanitasi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur, Direktorat Jenderal Cipta Karya		Paling lama 5 (lima) tahun	D.III Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sipil yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan
899	Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil	D.III Lingkungan/D.III Teknik Sipil/D.III Sanitasi Lingkungan/D.III Sipil/D.III Teknik Lingkungan/D.III Sanitasi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Barat, Direktorat Jenderal Cipta Karya	7	Paling lama 5 (lima) tahun	D.III Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sipil yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan

900	Teknik Penyehatan	D.III Lingkungan/D.III Teknik	Balai Prasarana	9	Paling lama 5	
	Lingkungan Terampil	Sipil/D.III Sanitasi Lingkungan/D.III	Permukiman Wilayah		(lima) tahun	D.III Lingkungan yang dimaksud
		Sipil/D.III Teknik Lingkungan/D.III	Kalimantan Selatan,			adalah prodi/peminatan dari D-III
		Sanitasi	Direktorat Jenderal Cipta			Teknik Sipil/Teknik Lingkungan
			Karya			(Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu
						lingkungan/ilmu kesehatan
						D.III Sanitasi Lingkungan yang
						dimaksud adalah prodi/peminatan dari
						D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan
						(Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu
						lingkungan/ilmu kesehatan
						D.III Sipil yang dimaksud adalah
						prodi/peminatan dari D-III Teknik
						Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun
						Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan
						D.III Sanitasi yang dimaksud adalah
						prodi/peminatan dari D-III Teknik
						Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun
						Sipil) bukan rumpun ilmu
						lingkungan/ilmu kesehatan
901	Teknik Penyehatan	D.III Lingkungan/D.III Teknik	Balai Prasarana	9	Paling lama 5	January Community Control of the Con
	Lingkungan Terampil	Sipil/D.III Sanitasi Lingkungan/D.III	Permukiman Wilayah		(lima) tahun	D.III Lingkungan yang dimaksud
		Sipil/D.III Teknik Lingkungan/D.III	Kalimantan Tengah,		,	adalah prodi/peminatan dari D-III
		Sanitasi	Direktorat Jenderal Cipta			Teknik Sipil/Teknik Lingkungan
			Karya			(Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu
						lingkungan/ilmu kesehatan
						D.III Sanitasi Lingkungan yang
						dimaksud adalah prodi/peminatan dari
						D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan
						(Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu
						lingkungan/ilmu kesehatan
						D.III Sipil yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik
						Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun
						Sipil) bukan rumpun ilmu
						lingkungan/ilmu kesehatan
						D.III Sanitasi yang dimaksud adalah
						prodi/peminatan dari D-III Teknik
						Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun
						Sipil) bukan rumpun ilmu
						lingkungan/ilmu kesehatan

902	Teknik Penyehatan	D.III Lingkungan/D.III Teknik	Balai Prasarana	6	Paling lama 5	
	Lingkungan Terampil	Sipil/D.III Sanitasi Lingkungan/D.III	Permukiman Wilayah		(lima) tahun	D.III Lingkungan yang dimaksud
		Sipil/D.III Teknik Lingkungan/D.III	Kalimantan Timur,			adalah prodi/peminatan dari D-III
		Sanitasi	Direktorat Jenderal Cipta			Teknik Sipil/Teknik Lingkungan
			Karya			(Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu
						lingkungan/ilmu kesehatan
						D.III Sanitasi Lingkungan yang
						dimaksud adalah prodi/peminatan dari
						D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu
						lingkungan/ilmu kesehatan
						D.III Sipil yang dimaksud adalah
						prodi/peminatan dari D-III Teknik
						Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun
						Sipil) bukan rumpun ilmu
						lingkungan/ilmu kesehatan
						D.III Sanitasi yang dimaksud adalah
						prodi/peminatan dari D-III Teknik
						Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun
						Sipil) bukan rumpun ilmu
						lingkungan/ilmu kesehatan
903	Teknik Penyehatan	D.III Lingkungan/D.III Teknik	Balai Prasarana		Paling lama 5	D. III. Line along a control of the channel
	Lingkungan Terampil	Sipil/D.III Sanitasi Lingkungan/D.III	Permukiman Wilayah		(lima) tahun	D.III Lingkungan yang dimaksud
		Sipil/D.III Teknik Lingkungan/D.III	Kalimantan Utara, Direktorat			adalah prodi/peminatan dari D-III
		Sanitasi	Jenderal Cipta Karya			Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu
						lingkungan/ilmu kesehatan
						D.III Sanitasi Lingkungan yang
						dimaksud adalah prodi/peminatan dari
						D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan
						(Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu
						lingkungan/ilmu kesehatan
						D.III Sipil yang dimaksud adalah
						prodi/peminatan dari D-III Teknik
						Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun
						Sipil) bukan rumpun ilmu
						lingkungan/ilmu kesehatan
						D.III Sanitasi yang dimaksud adalah
						prodi/peminatan dari D-III Teknik
						Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun
						Sipil) bukan rumpun ilmu
						lingkungan/ilmu kesehatan

004	Toknik Donychoton	D.III Lingkungen/D.III Teknik	Dalai Dragarana		Doling Ioma F	
904	Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil	D.III Lingkungan/D.III Teknik Sipil/D.III Sanitasi Lingkungan/D.III Sipil/D.III Teknik Lingkungan/D.III Sanitasi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kepulauan Riau, Direktorat Jenderal Cipta Karya	8	Paling lama 5 (lima) tahun	D.III Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sipil yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan
905	Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil	D.III Lingkungan/D.III Teknik Sipil/D.III Sanitasi Lingkungan/D.III Sipil/D.III Teknik Lingkungan/D.III Sanitasi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Lampung, Direktorat Jenderal Cipta Karya	11	Paling lama 5 (lima) tahun	D.III Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sipil yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan

906	Teknik Penyehatan	D.III Lingkungan/D.III Teknik	Balai Prasarana	3	Paling lama 5	
	Lingkungan Terampil	Sipil/D.III Sanitasi Lingkungan/D.III	Permukiman Wilayah	3	(lima) tahun	D.III Lingkungan yang dimaksud
	Lingkungan Terampii	Sipil/D.III Teknik Lingkungan/D.III	Maluku, Direktorat Jenderal		(IIIIIa) tariuri	adalah prodi/peminatan dari D-III
			The state of the s			Teknik Sipil/Teknik Lingkungan
		Sanitasi	Cipta Karya			
						(Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu
						lingkungan/ilmu kesehatan
						D.III Sanitasi Lingkungan yang
						dimaksud adalah prodi/peminatan dari
						D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan
						(Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu
						lingkungan/ilmu kesehatan
						D.III Sipil yang dimaksud adalah
						prodi/peminatan dari D-III Teknik
						Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun
						Sipil) bukan rumpun ilmu
						lingkungan/ilmu kesehatan
						D.III Sanitasi yang dimaksud adalah
						prodi/peminatan dari D-III Teknik
						Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun
						Sipil) bukan rumpun ilmu
						lingkungan/ilmu kesehatan
907	Teknik Penyehatan	D.III Lingkungan/D.III Teknik	Balai Prasarana	17	Paling lama 5	
	Lingkungan Terampil	Sipil/D.III Sanitasi Lingkungan/D.III	Permukiman Wilayah Nusa		(lima) tahun	D.III Lingkungan yang dimaksud
		Sipil/D.III Teknik Lingkungan/D.III	Tenggara Barat, Direktorat			adalah prodi/peminatan dari D-III
		Sanitasi	Jenderal Cipta Karya			Teknik Sipil/Teknik Lingkungan
						(Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu
						lingkungan/ilmu kesehatan
						D.III Sanitasi Lingkungan yang
						dimaksud adalah prodi/peminatan dari
						D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan
						(Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu
						lingkungan/ilmu kesehatan
						D.III Sipil yang dimaksud adalah
						prodi/peminatan dari D-III Teknik
						Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun
						Sipil) bukan rumpun ilmu
						lingkungan/ilmu kesehatan
						D.III Sanitasi yang dimaksud adalah
						prodi/peminatan dari D-III Teknik
						Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun
						Sipil) bukan rumpun ilmu
						lingkungan/ilmu kesehatan

000	Tales is Dance in the	D III I in also a new /D III T - 1 2 -	Delei Decement	0.1	Dalina Isrra 5	
908	Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil	D.III Lingkungan/D.III Teknik Sipil/D.III Sanitasi Lingkungan/D.III Sipil/D.III Teknik Lingkungan/D.III Sanitasi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Timur, Direktorat Jenderal Cipta Karya	21	Paling lama 5 (lima) tahun	D.III Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sipil yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik
						Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan
909	Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil	D.III Lingkungan/D.III Teknik Sipil/D.III Sanitasi Lingkungan/D.III Sipil/D.III Teknik Lingkungan/D.III Sanitasi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua Barat, Direktorat Jenderal Cipta Karya	12	Paling lama 5 (lima) tahun	D.III Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sipil yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan

910	Teknik Penyehatan	D.III Lingkungan/D.III Teknik	Balai Prasarana	9	Paling lama 5	
	Lingkungan Terampil	Sipil/D.III Sanitasi Lingkungan/D.III Sipil/D.III Teknik Lingkungan/D.III Sanitasi	Permukiman Wilayah Papua, Direktorat Jenderal Cipta Karya		(lima) tahun	D.III Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sipil yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan
911	Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil	D.III Lingkungan/D.III Teknik Sipil/D.III Sanitasi Lingkungan/D.III Sipil/D.III Teknik Lingkungan/D.III Sanitasi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Riau, Direktorat Jenderal Cipta Karya	5	Paling lama 5 (lima) tahun	D.III Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sipil yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan

912	Teknik Penyehatan	D.III Lingkungan/D.III Teknik	Balai Prasarana	8	Paling lama 5	
	Lingkungan Terampil	Sipil/D.III Sanitasi Lingkungan/D.III	Permukiman Wilayah		(lima) tahun	D.III Lingkungan yang dimaksud
		Sipil/D.III Teknik Lingkungan/D.III	Sulawesi Barat, Direktorat		(iiiia) tariari	adalah prodi/peminatan dari D-III
		Sanitasi	Jenderal Cipta Karya			Teknik Sipil/Teknik Lingkungan
			o naorar o pia rarya			(Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu
						lingkungan/ilmu kesehatan
						D.III Sanitasi Lingkungan yang
						dimaksud adalah prodi/peminatan dari
						D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan
						(Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu
						lingkungan/ilmu kesehatan
						D.III Sipil yang dimaksud adalah
						prodi/peminatan dari D-III Teknik
						Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun
						Sipil) bukan rumpun ilmu
						lingkungan/ilmu kesehatan
						D.III Sanitasi yang dimaksud adalah
						prodi/peminatan dari D-III Teknik
						Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun
						Sipil) bukan rumpun ilmu
						lingkungan/ilmu kesehatan
	Teknik Penyehatan	D.III Lingkungan/D.III Teknik	Balai Prasarana		Paling lama 5	
	Lingkungan Terampil	Sipil/D.III Sanitasi Lingkungan/D.III	Permukiman Wilayah		(lima) tahun	D.III Lingkungan yang dimaksud
		Sipil/D.III Teknik Lingkungan/D.III	Sulawesi Selatan, Direktorat			adalah prodi/peminatan dari D-III
		Sanitasi	Jenderal Cipta Karya			Teknik Sipil/Teknik Lingkungan
						(Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu
						lingkungan/ilmu kesehatan
						D.III Sanitasi Lingkungan yang
						dimaksud adalah prodi/peminatan dari
						D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan
						(Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan
						D.III Sipil yang dimaksud adalah
						prodi/peminatan dari D-III Teknik
						Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun
						Sipil) bukan rumpun ilmu
						lingkungan/ilmu kesehatan
						D.III Sanitasi yang dimaksud adalah
						prodi/peminatan dari D-III Teknik
						Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun
						Sipil) bukan rumpun ilmu
						lingkungan/ilmu kesehatan

914	Teknik Penyehatan	D.III Lingkungan/D.III Teknik	Balai Prasarana	6	Paling lama 5	1
	Lingkungan Terampil	Sipil/D.III Sanitasi Lingkungan/D.III	Permukiman Wilayah	O	(lima) tahun	D.III Lingkungan yang dimaksud
	Lingkungan Terampii	Sipil/D.III Teknik Lingkungan/D.III	Sulawesi Tengah, Direktorat		(IIIIa) tariuri	adalah prodi/peminatan dari D-III
		1 .	_			Teknik Sipil/Teknik Lingkungan
		Sanitasi	Jenderal Cipta Karya			
						(Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu
						lingkungan/ilmu kesehatan
						D.III Sanitasi Lingkungan yang
						dimaksud adalah prodi/peminatan dari
						D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan
						(Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu
						lingkungan/ilmu kesehatan
						D.III Sipil yang dimaksud adalah
						prodi/peminatan dari D-III Teknik
						Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun
						Sipil) bukan rumpun ilmu
						lingkungan/ilmu kesehatan
						D.III Sanitasi yang dimaksud adalah
						prodi/peminatan dari D-III Teknik
						Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun
						Sipil) bukan rumpun ilmu
						lingkungan/ilmu kesehatan
915	Teknik Penyehatan	D.III Lingkungan/D.III Teknik	Balai Prasarana	6	Paling lama 5	J - J
	Lingkungan Terampil	Sipil/D.III Sanitasi Lingkungan/D.III	Permukiman Wilayah		(lima) tahun	D.III Lingkungan yang dimaksud
		Sipil/D.III Teknik Lingkungan/D.III	Sulawesi Tenggara,		(adalah prodi/peminatan dari D-III
		Sanitasi	Direktorat Jenderal Cipta			Teknik Sipil/Teknik Lingkungan
		Carnicadi	Karya			(Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu
			Raiya			lingkungan/ilmu kesehatan
						D.III Sanitasi Lingkungan yang
						dimaksud adalah prodi/peminatan dari
						D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan
						(Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu
						lingkungan/ilmu kesehatan
						D.III Sipil yang dimaksud adalah
						prodi/peminatan dari D-III Teknik
						Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun
						Sipil) bukan rumpun ilmu
						lingkungan/ilmu kesehatan
						D.III Sanitasi yang dimaksud adalah
						prodi/peminatan dari D-III Teknik
						Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun
						Sipil) bukan rumpun ilmu
1						lingkungan/ilmu kesehatan

916	Teknik Penyehatan	D. III. Lingkungen/D. III. Teknik	Balai Prasarana	1	Paling lama 5	
	Lingkungan Terampil	D.III Lingkungan/D.III Teknik Sipil/D.III Sanitasi Lingkungan/D.III Sipil/D.III Teknik Lingkungan/D.III Sanitasi	Permukiman Wilayah Sulawesi Utara, Direktorat Jenderal Cipta Karya	4	(lima) tahun	D.III Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sipil yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan
917	Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil	D.III Lingkungan/D.III Teknik Sipil/D.III Sanitasi Lingkungan/D.III Sipil/D.III Teknik Lingkungan/D.III Sanitasi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat, Direktorat Jenderal Cipta Karya	9	Paling lama 5 (lima) tahun	D.III Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sipil yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan

040	Talmile Danielastas	D.III Lingly on an /D. III Taliasila	Delei Dresereis -	_	Daling Icasa F	
918	Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil	D.III Lingkungan/D.III Teknik Sipil/D.III Sanitasi Lingkungan/D.III Sipil/D.III Teknik Lingkungan/D.III Sanitasi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Selatan, Direktorat Jenderal Cipta Karya	5	Paling lama 5 (lima) tahun	D.III Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sipil yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan
919	Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil	D.III Lingkungan/D.III Teknik Sipil/D.III Sanitasi Lingkungan/D.III Sipil/D.III Teknik Lingkungan/D.III Sanitasi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Utara, Direktorat Jenderal Cipta Karya	15	Paling lama 5 (lima) tahun	D.III Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sipil yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan

920	Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil	D.III Lingkungan/D.III Teknik Sipil/D.III Sanitasi Lingkungan/D.III Sipil/D.III Teknik Lingkungan/D.III Sanitasi	Balai Teknologi Air Minum, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	D.III Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sipil yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan
921	Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil	D.III Lingkungan/D.III Teknik Sipil/D.III Sanitasi Lingkungan/D.III Sipil/D.III Teknik Lingkungan/D.III Sanitasi	Balai Teknologi Sanitasi, Direktorat Jenderal Cipta Karya		Paling lama 5 (lima) tahun	D.III Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sipil yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan

922	Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil	D.III Lingkungan/D.III Teknik Sipil/D.III Sanitasi Lingkungan/D.III Sipil/D.III Teknik Lingkungan/D.III Sanitasi	Direktorat Air Minum, Direktorat Jenderal Cipta Karya	Paling lama 5 (lima) tahun	D.III Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sipil yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu
923	Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil	D.III Lingkungan/D.III Teknik Sipil/D.III Sanitasi Lingkungan/D.III Sipil/D.III Teknik Lingkungan/D.III Sanitasi	Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya	Paling lama 5 (lima) tahun	Ingkungan/ilmu kesehatan D.III Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sipil yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan

924	Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil	D.III Lingkungan/D.III Teknik Sipil/D.III Sanitasi Lingkungan/D.III Sipil/D.III Teknik Lingkungan/D.III Sanitasi	Direktorat Sanitasi, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	D.III Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sipil yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu
925	Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil	D.III Lingkungan/D.III Teknik Sipil/D.III Sanitasi Lingkungan/D.III Sipil/D.III Teknik Lingkungan/D.III Sanitasi	Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Jenderal Cipta Karya		Paling lama 5 (lima) tahun	D.III Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sipil yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan

		1			T	
926	Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil	D.III Teknik Sipil/D.III Sanitasi Lingkungan/D.III Sipil/D.III Teknik Lingkungan/D.III Sanitasi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Aceh, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	D.III Sanitasi Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III SIPIL yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan
927	Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil	D.III Teknik Sipil/D.III Sanitasi Lingkungan/D.III Sipil/D.III Teknik Lingkungan/D.III Sanitasi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	D.III Sanitasi Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III SIPIL yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan

	1	T			T	_
928	Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil	D.III Teknik Sipil/D.III Sanitasi Lingkungan/D.III Sipil/D.III Teknik Lingkungan/D.III Sanitasi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bangka Belitung, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	D.III Sanitasi Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III SIPIL yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan
929	Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil	D.III Teknik Sipil/D.III Sanitasi Lingkungan/D.III Sipil/D.III Teknik Lingkungan/D.III Sanitasi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Banten, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	D.III Sanitasi Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III SIPIL yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan

020	Toknik Donyohoton	D. III Toknik Sinil/D. III Sonitoni	Dalai Dragarana	2	Doling Jama E	
930	Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil	D.III Teknik Sipil/D.III Sanitasi Lingkungan/D.III Sipil/D.III Teknik Lingkungan/D.III Sanitasi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bengkulu, Direktorat Jenderal Cipta Karya		Paling lama 5 (lima) tahun	D.III Sanitasi Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III SIPIL yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan
931	Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil	D.III Teknik Sipil/D.III Sanitasi Lingkungan/D.III Sipil/D.III Teknik Lingkungan/D.III Sanitasi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jambi, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	D.III Sanitasi Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III SIPIL yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan

932	Teknik Penyehatan	D.III Teknik Sipil/D.III Sanitasi	Balai Prasarana	2	Paling lama 5	
932	Lingkungan Terampil	Lingkungan/D.III Sipil/D.III Teknik Lingkungan/D.III Sanitasi	Permukiman Wilayah Jawa Barat, Direktorat Jenderal Cipta Karya		(lima) tahun	D.III Sanitasi Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III SIPIL yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan
933	Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil	D.III Teknik Sipil/D.III Sanitasi Lingkungan/D.III Sipil/D.III Teknik Lingkungan/D.III Sanitasi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	D.III Sanitasi Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III SIPIL yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan

004	Talmila Damashatan	D. III Talusii, Ciril/D. III Caritasi	Dalai Dasasasa		Deline Inna 5	Т
934	Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil	D.III Teknik Sipil/D.III Sanitasi Lingkungan/D.III Sipil/D.III Teknik Lingkungan/D.III Sanitasi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Barat, Direktorat Jenderal Cipta Karya		Paling lama 5 (lima) tahun	D.III Sanitasi Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III SIPIL yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan
935	Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil	D.III Teknik Sipil/D.III Sanitasi Lingkungan/D.III Sipil/D.III Teknik Lingkungan/D.III Sanitasi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Utara, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	D.III Sanitasi Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III SIPIL yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan

		I		1		T
936	Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil	D.III Teknik Sipil/D.III Sanitasi Lingkungan/D.III Sipil/D.III Teknik Lingkungan/D.III Sanitasi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Maluku Utara, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	D.III Sanitasi Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III SIPIL yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan
937	Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil	D.III Teknik Sipil/D.III Sanitasi Lingkungan/D.III Sipil/D.III Teknik Lingkungan/D.III Sanitasi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Barat, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	D.III Sanitasi Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III SIPIL yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan

020	Toknik Donyohoton	D. III Taknik Cinil/D. III Canitasi	Dalai Dragarana	1	Doling Jama F	
938	Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil	D.III Teknik Sipil/D.III Sanitasi Lingkungan/D.III Sipil/D.III Teknik Lingkungan/D.III Sanitasi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Timur, Direktorat Jenderal Cipta Karya		Paling lama 5 (lima) tahun	D.III Sanitasi Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III SIPIL yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan
939	Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil	D.III Teknik Sipil/D.III Sanitasi Lingkungan/D.III Sipil/D.III Teknik Lingkungan/D.III Sanitasi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Riau, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	D.III Sanitasi Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III SIPIL yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan

0.40	Takaik Danyahatan	D III Taknik Cinil/D III Canitasi	Dalai Drasarana	4	Daling James 5	T
940	Teknik Penyehatan	D.III Teknik Sipil/D.III Sanitasi	Balai Prasarana	1	Paling lama 5	D.III Sanitasi Lingkungan yang
	Lingkungan Terampil	Lingkungan/D.III Sipil/D.III Teknik	Permukiman Wilayah		(lima) tahun	
		Lingkungan/D.III Sanitasi	Sulawesi Selatan, Direktorat			dimaksud adalah prodi/peminatan dari
			Jenderal Cipta Karya			D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan
						(Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu
						lingkungan/ilmu kesehatan
						D.III Sipil yang dimaksud adalah
						prodi/peminatan dari D-III Teknik
						Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun
						Sipil) bukan rumpun ilmu
						lingkungan/ilmu kesehatan
						D.III Lingkungan yang dimaksud
						adalah prodi/peminatan dari D-III
						Teknik Sipil/Teknik Lingkungan
						(Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu
						lingkungan/ilmu kesehatan
						D.III Sanitasi yang dimaksud adalah
						prodi/peminatan dari D-III Teknik
						Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun
						Sipil) bukan rumpun ilmu
						lingkungan/ilmu kesehatan
941	Teknik Penyehatan	D.III Teknik Sipil/D.III Sanitasi	Balai Prasarana	1	Paling lama 5	gg
	Lingkungan Terampil	Lingkungan/D.III Sipil/D.III Teknik	Permukiman Wilayah	·	(lima) tahun	D.III Sanitasi Lingkungan yang
		Lingkungan/D.III Sanitasi	Sulawesi Utara, Direktorat		(iiiia) tarrair	dimaksud adalah prodi/peminatan dari
		Zingkangan/2.iii Ganitaoi	Jenderal Cipta Karya			D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan
			ochaciai oipia itarya			(Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu
						lingkungan/ilmu kesehatan
						D.III SIPIL yang dimaksud adalah
						prodi/peminatan dari D-III Teknik
						Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun
						Sipil) bukan rumpun ilmu
						lingkungan/ilmu kesehatan
						D.III Sanitasi yang dimaksud adalah
						prodi/peminatan dari D-III Teknik
						Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun
						Sipil) bukan rumpun ilmu
						lingkungan/ilmu kesehatan

042	Toknik Donyohatan	D III Toknik Sinil/D III Sanitasi	Balai Prasarana	1	Daling Jama 5	T
942	Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil	D.III Teknik Sipil/D.III Sanitasi Lingkungan/D.III Sipil/D.III Teknik Lingkungan/D.III Sanitasi	Permukiman Wilayah Sumatera Selatan, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	D.III Sanitasi Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III SIPIL yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan
943	Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil	D.III Teknik Sipil/D.III Sanitasi Lingkungan/D.III Sipil/D.III Teknik Lingkungan/D.III Sanitasi	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Utara, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	D.III Sanitasi Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III SIPIL yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan

944	Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil	D.III Teknik Sipil/D.III Sanitasi Lingkungan/D.III Sipil/D.III Teknik Lingkungan/D.III Sanitasi	Direktorat Sanitasi, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	D.III Sanitasi Lingkungan yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III SIPIL yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan D.III Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan
945	Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil	D.III Teknik Sipil/D.III Teknik Lingkungan	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
946	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Terampil	D.III Teknik Sipil	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bengkulu, Direktorat Jenderal Cipta Karya		Paling lama 5 (lima) tahun	
947	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Terampil	D.III Teknik Sipil/D.III Bangunan Gedung/D.III Konstruksi Bangunan Gedung/D.III Konstruksi Bangunan Sipil/D.III Perencanaan Wilayah Dan Kota/D.III Sipil/D.III Bangunan/D.III Konstruksi Sipil/D.III Konstruksi Gedung/D.III Teknik Arsitektur/D.III Arsitek	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Maluku, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
948	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Terampil	D.III Teknik Sipil/D.III Bangunan Gedung/D.III Konstruksi Bangunan Gedung/D.III Konstruksi Bangunan Sipil/D.III Perencanaan Wilayah Dan Kota/D.III Sipil/D.III Bangunan/D.III Konstruksi Sipil/D.III Konstruksi Gedung/D.III Teknik Arsitektur/D.III Arsitek	Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	

	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Terampil	D.III Teknik Sipil/D.III Bangunan Gedung/D.III Konstruksi Bangunan Gedung/D.III Perencanaan Dan Pembangunan/D.III Konstruksi Bangunan Sipil/D.III Perencanaan Wilayah Dan Kota/D.III Sipil/D.III Bangunan/D.III Konstruksi Sipil/D.III Konstruksi Gedung/D.III Teknik Arsitektur/D.III Arsitek	Balai Kawasan Permukiman Dan Perumahan, Direktorat Jenderal Cipta Karya	3	Paling lama 5 (lima) tahun	
950	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Terampil	D.III Teknik Sipil/D.III Bangunan Gedung/D.III Konstruksi Bangunan Gedung/D.III Perencanaan Dan Pembangunan/D.III Konstruksi Bangunan Sipil/D.III Perencanaan Wilayah Dan Kota/D.III Sipil/D.III Bangunan/D.III Konstruksi Sipil/D.III Konstruksi Gedung/D.III Teknik Arsitektur/D.III Arsitek	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Aceh, Direktorat Jenderal Cipta Karya	5	Paling lama 5 (lima) tahun	
	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Terampil	D.III Teknik Sipil/D.III Bangunan Gedung/D.III Konstruksi Bangunan Gedung/D.III Perencanaan Dan Pembangunan/D.III Konstruksi Bangunan Sipil/D.III Perencanaan Wilayah Dan Kota/D.III Sipil/D.III Bangunan/D.III Konstruksi Sipil/D.III Konstruksi Gedung/D.III Teknik Arsitektur/D.III Arsitek	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali, Direktorat Jenderal Cipta Karya	5	Paling lama 5 (lima) tahun	
	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Terampil	D.III Teknik Sipil/D.III Bangunan Gedung/D.III Konstruksi Bangunan Gedung/D.III Perencanaan Dan Pembangunan/D.III Konstruksi Bangunan Sipil/D.III Perencanaan Wilayah Dan Kota/D.III Sipil/D.III Bangunan/D.III Konstruksi Sipil/D.III Konstruksi Gedung/D.III Teknik Arsitektur/D.III Arsitek	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bangka Belitung, Direktorat Jenderal Cipta Karya	4	Paling lama 5 (lima) tahun	

Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Terampil	D.III Teknik Sipil/D.III Bangunan Gedung/D.III Konstruksi Bangunan Gedung/D.III Perencanaan Dan Pembangunan/D.III Konstruksi Bangunan Sipil/D.III Perencanaan Wilayah Dan Kota/D.III Sipil/D.III Bangunan/D.III Konstruksi Sipil/D.III Konstruksi Gedung/D.III Teknik Arsitektur/D.III Arsitek	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Banten, Direktorat Jenderal Cipta Karya	6	Paling lama 5 (lima) tahun	
Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Terampil	D.III Teknik Sipil/D.III Bangunan Gedung/D.III Konstruksi Bangunan Gedung/D.III Perencanaan Dan Pembangunan/D.III Konstruksi Bangunan Sipil/D.III Perencanaan Wilayah Dan Kota/D.III Sipil/D.III Bangunan/D.III Konstruksi Sipil/D.III Konstruksi Gedung/D.III Teknik Arsitektur/D.III Arsitek	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bengkulu, Direktorat Jenderal Cipta Karya	4	Paling lama 5 (lima) tahun	
Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Terampil	D.III Teknik Sipil/D.III Bangunan Gedung/D.III Konstruksi Bangunan Gedung/D.III Perencanaan Dan Pembangunan/D.III Konstruksi Bangunan Sipil/D.III Perencanaan Wilayah Dan Kota/D.III Sipil/D.III Bangunan/D.III Konstruksi Sipil/D.III Konstruksi Gedung/D.III Teknik Arsitektur/D.III Arsitek	Balai Prasarana Permukiman Wilayah D.I. Yogyakarta, Direktorat Jenderal Cipta Karya	7	Paling lama 5 (lima) tahun	
Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Terampil	D.III Teknik Sipil/D.III Bangunan Gedung/D.III Konstruksi Bangunan Gedung/D.III Perencanaan Dan Pembangunan/D.III Konstruksi Bangunan Sipil/D.III Perencanaan Wilayah Dan Kota/D.III Sipil/D.III Bangunan/D.III Konstruksi Sipil/D.III Konstruksi Gedung/D.III Teknik Arsitektur/D.III Arsitek	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Gorontalo, Direktorat Jenderal Cipta Karya	11	Paling lama 5 (lima) tahun	

	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Terampil	D.III Teknik Sipil/D.III Bangunan Gedung/D.III Konstruksi Bangunan Gedung/D.III Perencanaan Dan Pembangunan/D.III Konstruksi Bangunan Sipil/D.III Perencanaan Wilayah Dan Kota/D.III Sipil/D.III Bangunan/D.III Konstruksi Sipil/D.III Konstruksi Gedung/D.III Teknik Arsitektur/D.III Arsitek	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jakarta Metropolitan, Direktorat Jenderal Cipta Karya	6	Paling lama 5 (lima) tahun	
958	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Terampil	D.III Teknik Sipil/D.III Bangunan Gedung/D.III Konstruksi Bangunan Gedung/D.III Perencanaan Dan Pembangunan/D.III Konstruksi Bangunan Sipil/D.III Perencanaan Wilayah Dan Kota/D.III Sipil/D.III Bangunan/D.III Konstruksi Sipil/D.III Konstruksi Gedung/D.III Teknik Arsitektur/D.III Arsitek	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jambi, Direktorat Jenderal Cipta Karya	6	Paling lama 5 (lima) tahun	
959	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Terampil	D.III Teknik Sipil/D.III Bangunan Gedung/D.III Konstruksi Bangunan Gedung/D.III Perencanaan Dan Pembangunan/D.III Konstruksi Bangunan Sipil/D.III Perencanaan Wilayah Dan Kota/D.III Sipil/D.III Bangunan/D.III Konstruksi Sipil/D.III Konstruksi Gedung/D.III Teknik Arsitektur/D.III Arsitek	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Barat, Direktorat Jenderal Cipta Karya	10	Paling lama 5 (lima) tahun	
	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Terampil	D.III Teknik Sipil/D.III Bangunan Gedung/D.III Konstruksi Bangunan Gedung/D.III Perencanaan Dan Pembangunan/D.III Konstruksi Bangunan Sipil/D.III Perencanaan Wilayah Dan Kota/D.III Sipil/D.III Bangunan/D.III Konstruksi Sipil/D.III Konstruksi Gedung/D.III Teknik Arsitektur/D.III Arsitek	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah, Direktorat Jenderal Cipta Karya	13	Paling lama 5 (lima) tahun	

	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Terampil	D.III Teknik Sipil/D.III Bangunan Gedung/D.III Konstruksi Bangunan Gedung/D.III Perencanaan Dan Pembangunan/D.III Konstruksi Bangunan Sipil/D.III Perencanaan Wilayah Dan Kota/D.III Sipil/D.III Bangunan/D.III Konstruksi Sipil/D.III Konstruksi Gedung/D.III Teknik Arsitektur/D.III Arsitek	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur, Direktorat Jenderal Cipta Karya	11	Paling lama 5 (lima) tahun	
	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Terampil	D.III Teknik Sipil/D.III Bangunan Gedung/D.III Konstruksi Bangunan Gedung/D.III Perencanaan Dan Pembangunan/D.III Konstruksi Bangunan Sipil/D.III Perencanaan Wilayah Dan Kota/D.III Sipil/D.III Bangunan/D.III Konstruksi Sipil/D.III Konstruksi Gedung/D.III Teknik Arsitektur/D.III Arsitek	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Barat, Direktorat Jenderal Cipta Karya	6	Paling lama 5 (lima) tahun	
963	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Terampil	D.III Teknik Sipil/D.III Bangunan Gedung/D.III Konstruksi Bangunan Gedung/D.III Perencanaan Dan Pembangunan/D.III Konstruksi Bangunan Sipil/D.III Perencanaan Wilayah Dan Kota/D.III Sipil/D.III Bangunan/D.III Konstruksi Sipil/D.III Konstruksi Gedung/D.III Teknik Arsitektur/D.III Arsitek	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Selatan, Direktorat Jenderal Cipta Karya	5	Paling lama 5 (lima) tahun	
	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Terampil	D.III Teknik Sipil/D.III Bangunan Gedung/D.III Konstruksi Bangunan Gedung/D.III Perencanaan Dan Pembangunan/D.III Konstruksi Bangunan Sipil/D.III Perencanaan Wilayah Dan Kota/D.III Sipil/D.III Bangunan/D.III Konstruksi Sipil/D.III Konstruksi Gedung/D.III Teknik Arsitektur/D.III Arsitek	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Tengah, Direktorat Jenderal Cipta Karya	4	Paling lama 5 (lima) tahun	

	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Terampil	Wilayah Dan Kota/D.III Sipil/D.III Bangunan/D.III Konstruksi Sipil/D.III Konstruksi Gedung/D.III Teknik Arsitektur/D.III Arsitek	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Timur, Direktorat Jenderal Cipta Karya	3	Paling lama 5 (lima) tahun	
966	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Terampil	D.III Teknik Sipil/D.III Bangunan Gedung/D.III Konstruksi Bangunan Gedung/D.III Perencanaan Dan Pembangunan/D.III Konstruksi Bangunan Sipil/D.III Perencanaan Wilayah Dan Kota/D.III Sipil/D.III Bangunan/D.III Konstruksi Sipil/D.III Konstruksi Gedung/D.III Teknik Arsitektur/D.III Arsitek	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Utara, Direktorat Jenderal Cipta Karya	5	Paling lama 5 (lima) tahun	
967	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Terampil	D.III Teknik Sipil/D.III Bangunan Gedung/D.III Konstruksi Bangunan Gedung/D.III Perencanaan Dan Pembangunan/D.III Konstruksi Bangunan Sipil/D.III Perencanaan Wilayah Dan Kota/D.III Sipil/D.III Bangunan/D.III Konstruksi Sipil/D.III Konstruksi Gedung/D.III Teknik Arsitektur/D.III Arsitek	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kepulauan Riau, Direktorat Jenderal Cipta Karya	6	Paling lama 5 (lima) tahun	
	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Terampil	D.III Teknik Sipil/D.III Bangunan Gedung/D.III Konstruksi Bangunan Gedung/D.III Perencanaan Dan Pembangunan/D.III Konstruksi Bangunan Sipil/D.III Perencanaan Wilayah Dan Kota/D.III Sipil/D.III Bangunan/D.III Konstruksi Sipil/D.III Konstruksi Gedung/D.III Teknik Arsitektur/D.III Arsitek	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Lampung, Direktorat Jenderal Cipta Karya	7	Paling lama 5 (lima) tahun	

	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Terampil	D.III Teknik Sipil/D.III Bangunan Gedung/D.III Konstruksi Bangunan Gedung/D.III Perencanaan Dan Pembangunan/D.III Konstruksi Bangunan Sipil/D.III Perencanaan Wilayah Dan Kota/D.III Sipil/D.III Bangunan/D.III Konstruksi Sipil/D.III Konstruksi Gedung/D.III Teknik Arsitektur/D.III Arsitek	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Maluku Utara, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
970	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Terampil	D.III Teknik Sipil/D.III Bangunan Gedung/D.III Konstruksi Bangunan Gedung/D.III Perencanaan Dan Pembangunan/D.III Konstruksi Bangunan Sipil/D.III Perencanaan Wilayah Dan Kota/D.III Sipil/D.III Bangunan/D.III Konstruksi Sipil/D.III Konstruksi Gedung/D.III Teknik Arsitektur/D.III Arsitek	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Barat, Direktorat Jenderal Cipta Karya	4	Paling lama 5 (lima) tahun	
971	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Terampil	D.III Teknik Sipil/D.III Bangunan Gedung/D.III Konstruksi Bangunan Gedung/D.III Perencanaan Dan Pembangunan/D.III Konstruksi Bangunan Sipil/D.III Perencanaan Wilayah Dan Kota/D.III Sipil/D.III Bangunan/D.III Konstruksi Sipil/D.III Konstruksi Gedung/D.III Teknik Arsitektur/D.III Arsitek	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Timur, Direktorat Jenderal Cipta Karya	7	Paling lama 5 (lima) tahun	
	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Terampil	D.III Teknik Sipil/D.III Bangunan Gedung/D.III Konstruksi Bangunan Gedung/D.III Perencanaan Dan Pembangunan/D.III Konstruksi Bangunan Sipil/D.III Perencanaan Wilayah Dan Kota/D.III Sipil/D.III Bangunan/D.III Konstruksi Sipil/D.III Konstruksi Gedung/D.III Teknik Arsitektur/D.III Arsitek	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua Barat, Direktorat Jenderal Cipta Karya	3	Paling lama 5 (lima) tahun	

	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Terampil	D.III Teknik Sipil/D.III Bangunan Gedung/D.III Konstruksi Bangunan Gedung/D.III Perencanaan Dan Pembangunan/D.III Konstruksi Bangunan Sipil/D.III Perencanaan Wilayah Dan Kota/D.III Sipil/D.III Bangunan/D.III Konstruksi Sipil/D.III Konstruksi Gedung/D.III Teknik Arsitektur/D.III Arsitek	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua, Direktorat Jenderal Cipta Karya	4	Paling lama 5 (lima) tahun	
974	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Terampil	D.III Teknik Sipil/D.III Bangunan Gedung/D.III Konstruksi Bangunan Gedung/D.III Perencanaan Dan Pembangunan/D.III Konstruksi Bangunan Sipil/D.III Perencanaan Wilayah Dan Kota/D.III Sipil/D.III Bangunan/D.III Konstruksi Sipil/D.III Konstruksi Gedung/D.III Teknik Arsitektur/D.III Arsitek	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Riau, Direktorat Jenderal Cipta Karya	4	Paling lama 5 (lima) tahun	
975	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Terampil	D.III Teknik Sipil/D.III Bangunan Gedung/D.III Konstruksi Bangunan Gedung/D.III Perencanaan Dan Pembangunan/D.III Konstruksi Bangunan Sipil/D.III Perencanaan Wilayah Dan Kota/D.III Sipil/D.III Bangunan/D.III Konstruksi Sipil/D.III Konstruksi Gedung/D.III Teknik Arsitektur/D.III Arsitek	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Barat, Direktorat Jenderal Cipta Karya	7	Paling lama 5 (lima) tahun	
	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Terampil	D.III Teknik Sipil/D.III Bangunan Gedung/D.III Konstruksi Bangunan Gedung/D.III Perencanaan Dan Pembangunan/D.III Konstruksi Bangunan Sipil/D.III Perencanaan Wilayah Dan Kota/D.III Sipil/D.III Bangunan/D.III Konstruksi Sipil/D.III Konstruksi Gedung/D.III Teknik Arsitektur/D.III Arsitek	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Selatan, Direktorat Jenderal Cipta Karya	7	Paling lama 5 (lima) tahun	

	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Terampil	D.III Teknik Sipil/D.III Bangunan Gedung/D.III Konstruksi Bangunan Gedung/D.III Perencanaan Dan Pembangunan/D.III Konstruksi Bangunan Sipil/D.III Perencanaan Wilayah Dan Kota/D.III Sipil/D.III Bangunan/D.III Konstruksi Sipil/D.III Konstruksi Gedung/D.III Teknik Arsitektur/D.III Arsitek	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Tengah, Direktorat Jenderal Cipta Karya	7	Paling lama 5 (lima) tahun	
	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Terampil	D.III Teknik Sipil/D.III Bangunan Gedung/D.III Konstruksi Bangunan Gedung/D.III Perencanaan Dan Pembangunan/D.III Konstruksi Bangunan Sipil/D.III Perencanaan Wilayah Dan Kota/D.III Sipil/D.III Bangunan/D.III Konstruksi Sipil/D.III Konstruksi Gedung/D.III Teknik Arsitektur/D.III Arsitek	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Tenggara, Direktorat Jenderal Cipta Karya	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
979	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Terampil	D.III Teknik Sipil/D.III Bangunan Gedung/D.III Konstruksi Bangunan Gedung/D.III Perencanaan Dan Pembangunan/D.III Konstruksi Bangunan Sipil/D.III Perencanaan Wilayah Dan Kota/D.III Sipil/D.III Bangunan/D.III Konstruksi Sipil/D.III Konstruksi Gedung/D.III Teknik Arsitektur/D.III Arsitek	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara, Direktorat Jenderal Cipta Karya	4	Paling lama 5 (lima) tahun	
	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Terampil	D.III Teknik Sipil/D.III Bangunan Gedung/D.III Konstruksi Bangunan Gedung/D.III Perencanaan Dan Pembangunan/D.III Konstruksi Bangunan Sipil/D.III Perencanaan Wilayah Dan Kota/D.III Sipil/D.III Bangunan/D.III Konstruksi Sipil/D.III Konstruksi Gedung/D.III Teknik Arsitektur/D.III Arsitek	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat, Direktorat Jenderal Cipta Karya	8	Paling lama 5 (lima) tahun	

	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Terampil	Wilayah Dan Kota/D.III Sipil/D.III Bangunan/D.III Konstruksi Sipil/D.III Konstruksi Gedung/D.III Teknik Arsitektur/D.III Arsitek	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Selatan, Direktorat Jenderal Cipta Karya	5	Paling lama 5 (lima) tahun	
	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Terampil	D.III Teknik Sipil/D.III Bangunan Gedung/D.III Konstruksi Bangunan Gedung/D.III Perencanaan Dan Pembangunan/D.III Konstruksi Bangunan Sipil/D.III Perencanaan Wilayah Dan Kota/D.III Sipil/D.III Bangunan/D.III Konstruksi Sipil/D.III Konstruksi Gedung/D.III Teknik Arsitektur/D.III Arsitek	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Utara, Direktorat Jenderal Cipta Karya	10	Paling lama 5 (lima) tahun	
983	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Terampil	D.III Teknik Sipil/D.III Bangunan Gedung/D.III Konstruksi Bangunan Gedung/D.III Perencanaan Dan Pembangunan/D.III Konstruksi Bangunan Sipil/D.III Perencanaan Wilayah Dan Kota/D.III Sipil/D.III Bangunan/D.III Konstruksi Sipil/D.III Konstruksi Gedung/D.III Teknik Arsitektur/D.III Arsitek	Balai Sains Bangunan, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Terampil	D.III Teknik Sipil/D.III Bangunan Gedung/D.III Konstruksi Bangunan Gedung/D.III Perencanaan Dan Pembangunan/D.III Konstruksi Bangunan Sipil/D.III Perencanaan Wilayah Dan Kota/D.III Sipil/D.III Bangunan/D.III Konstruksi Sipil/D.III Konstruksi Gedung/D.III Teknik Arsitektur/D.III Arsitek	Balai Teknologi Air Minum, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	

	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Terampil	Pembangunan/D.III Konstruksi Bangunan Sipil/D.III Perencanaan Wilayah Dan Kota/D.III Sipil/D.III Bangunan/D.III Konstruksi Sipil/D.III Konstruksi Gedung/D.III Teknik Arsitektur/D.III Arsitek	Direktorat Air Minum, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
986	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Terampil	D.III Teknik Sipil/D.III Bangunan Gedung/D.III Konstruksi Bangunan Gedung/D.III Perencanaan Dan Pembangunan/D.III Konstruksi Bangunan Sipil/D.III Perencanaan Wilayah Dan Kota/D.III Sipil/D.III Bangunan/D.III Konstruksi Sipil/D.III Konstruksi Gedung/D.III Teknik Arsitektur/D.III Arsitek	Direktorat Bina Penataan Bangunan, Direktorat Jenderal Cipta Karya	9	Paling lama 5 (lima) tahun	
987	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Terampil	D.III Teknik Sipil/D.III Bangunan Gedung/D.III Konstruksi Bangunan Gedung/D.III Perencanaan Dan Pembangunan/D.III Konstruksi Bangunan Sipil/D.III Perencanaan Wilayah Dan Kota/D.III Sipil/D.III Bangunan/D.III Konstruksi Sipil/D.III Konstruksi Gedung/D.III Teknik Arsitektur/D.III Arsitek	Direktorat Bina Teknik Permukiman Dan Perumahan, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Terampil	Gedung/D.III Perencanaan Dan	Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya	11	Paling lama 5 (lima) tahun	

989	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Terampil	D.III Teknik Sipil/D.III Bangunan Gedung/D.III Konstruksi Bangunan Gedung/D.III Perencanaan Dan Pembangunan/D.III Konstruksi Bangunan Sipil/D.III Perencanaan Wilayah Dan Kota/D.III Sipil/D.III Bangunan/D.III Konstruksi Sipil/D.III Konstruksi Gedung/D.III Teknik Arsitektur/D.III Arsitek	Direktorat Prasarana Strategis, Direktorat Jenderal Cipta Karya	5	Paling lama 5 (lima) tahun	
990	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Terampil	D.III Teknik Sipil/D.III Bangunan Gedung/D.III Konstruksi Bangunan Gedung/D.III Perencanaan Dan Pembangunan/D.III Konstruksi Bangunan Sipil/D.III Perencanaan Wilayah Dan Kota/D.III Sipil/D.III Bangunan/D.III Konstruksi Sipil/D.III Konstruksi Gedung/D.III Teknik Arsitektur/D.III Arsitek	Direktorat Sanitasi, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
991	Teknisi Penelitian Dan Perekayasaan Terampil	D.III Teknik Sipil	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta - Jawa Barat, Direktorat Jenderal Bina Marga	3	Paling lama 5 (lima) tahun	
992	Teknisi Penelitian Dan Perekayasaan Terampil	D.III Teknik Sipil	Balai Geoteknik Terowongan Dan Struktur, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
993	Teknisi Penelitian Dan Perekayasaan Terampil	D.III Teknik Sipil	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
	Teknisi Penelitian Dan Perekayasaan Terampil		Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Gorontalo, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
995	Teknisi Penelitian Dan Perekayasaan Terampil	D.III Teknik Sipil	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Selatan, Direktorat Jenderal Bina Marga	2	Paling lama 5 (lima) tahun	
996	Teknisi Penelitian Dan Perekayasaan Terampil	D.III Teknik Sipil	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku, Direktorat Jenderal Bina Marga	2	Paling lama 5 (lima) tahun	

997	Teknisi Penelitian Dan Perekayasaan Terampil	D.III Teknik Sipil	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur, Direktorat Jenderal Bina Marga	6	Paling lama 5 (lima) tahun	
998	Teknisi Penelitian Dan Perekayasaan Terampil	D.III Teknik Sipil	Balai Perkerasan Dan Lingkungan Jalan, Direktorat Jenderal Bina Marga	1	Paling lama 5 (lima) tahun	
999	Teknisi Penelitian Dan Perekayasaan Terampil	D.III Teknik Sipil/D.III Teknik Konstruksi Gedung/D.III Teknik Arsitektur/D.III Arsitektur/D.III Kimia/D.III Sanitasi	Balai Teknologi Air Minum, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	D.III Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan
1000	Teknisi Penelitian Dan Perekayasaan Terampil	D.III Teknik Sipil/D.III Teknik Konstruksi Gedung/D.III Teknik Arsitektur/D.III Arsitektur/D.III Kimia/D.III Sanitasi	Balai Teknologi Sanitasi, Direktorat Jenderal Cipta Karya	1	Paling lama 5 (lima) tahun	D.III Sanitasi yang dimaksud adalah prodi/peminatan dari D-III Teknik Sipil/Teknik Lingkungan (Rumpun Sipil) bukan rumpun ilmu lingkungan/ilmu kesehatan

LAMPIRAN II PENGUMUMAN

Nomor : KP.02.01-Mn/2621.1 Tanggal : 20 Desember 2022

I. KRITERIA PELAMAR

Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Untuk Jabatan Fungsional Teknis Tahun 2022 terbuka untuk umum selama memenuhi persyaratan pendidikan sebagaimana tercantum pada tabel lampiran I kolom 3, memiliki pengalaman kerja serta sertifikasi keahlian terkait jabatan yang dilamar sebagaimana tercantum pada tabel di bawah:

INFORMASI KETENTUAN PERSYARATAN PENGALAMAN KERJA DAN SERTIFIKASI KEAHLIAN BAGI PELAMAR SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA UNTUK JABATAN FUNGSIONAL TEKNIS

NO	JABATAN	CVADAT DENCALAMAN KED IA	SYARAT SERTI	FIKASI KEAHLIAN	KETEDANCAN
NO	JADATAN	SYARAT PENGALAMAN KERJA	SIFAT	JENIS	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Analis Kebijakan Ahli Pertama	Memiliki pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun dalam jabatan/bidang terkait riset kebijakan/analisis kebijakan/rekomendasi kebijakan (penyusunan/perumusan/evaluasi kebijakan publik) baik di tingkat lokal (daerah), nasional maupun regional atau kegiatan lainnya yang terkait dengan tugas jabatan yang dilamar.			
2	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	Memiliki pengalaman kerja paling singkat 2 (dua)			

NO	IADATAN	OVADAT DENGALAMAN KEDIA	SYARAT SERTI	IFIKASI KEAHLIAN	KETEDANGAN
NO	JABATAN	SYARAT PENGALAMAN KERJA	SIFAT	JENIS	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
3	Arsiparis Ahli Pertama	Memiliki pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun dalam jabatan/bidang terkait : a. pengelolaan arsip dinamis; atau b. pengelolaan arsip statis; atau c. pengolahan dan penyajian arsip menjadi Informasi; atau d. audit kearsipan.			
4	Asesor SDM Aparatur Ahli Pertama	 Memiliki pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun dalam jabatan/bidang terkait: a. perencanaan dan pengorganisasian asesmen kompetensi/potensi SDM; atau b. pengembangan perangkat/instrumen asesmen kompetensi/potensi SDM; atau c. pelaksanaan asesmen kompetensi/potensi SDM; atau d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan asesmen kompetensi/potensi SDM; atau e. pengendalian mutu asesmen kompetensi/potensi SDM; atau f. pengembangan sistem asesmen strategik. 			
5	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama	Memiliki pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun dalam jabatan/bidang terkait: a. penyusunan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi kelembagaan masyarakat jasa konstruksi/pengelolaan material, peralatan, dan teknologi, serta TKDN konstruksi/ kompetensi tenaga kerja konstruksi, pengembangan profesi jasa konstruksi berkelanjutan, Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, atau b. penyusunan rumusan strategi pemberdayaan mitra jasa konstruksi; atau c. penyusunan dan pembaruan Standar Kompetensi			

NO	JABATAN SYARAT PENGALAMAN KERJA	CVADAT DENCALAMAN KED IA	SYARAT SERT	IFIKASI KEAHLIAN	KETERANGAN
NO	JABATAN	STARAT PENGALAMAN KERJA	SIFAT	JENIS	KETEKANGAN
1	2	3	4	5	6
		 Kerja Nasional Indonesia; atau d. penyusunan modul/materi kompetensi tenaga kerja konstruksi;atau e. penyelenggaraan peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi; atau f. penyusunan rekomendasi teknis keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan konstruksi serta kegagalan bangunan; atau g. pengolahan data material, peralatan, teknologi dan TKDN konstruksi/ tenaga kerja konstruksi. 			
6	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	Memiliki pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun dalam jabatan/bidang terkait: a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria pelaksanaan pemilihan jasa konstruksi; atau b. pelaksanaan pengadaan barang/jasa (procurement) khususnya pengadaan barang/jasa pemerintah; atau c. pengembangan sistem dan pengolahan data pengadaan barang/jasa;	Wajib Sertifikat (Syarat Administrasi)	Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar/Level-1	Apabila tidak dilampirkan akan menggugurkan pada tahap seleksi administrasi
7	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama	Memiliki pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun dalam jabatan/bidang terkait: a. analisis dan pengkajian model teknologi pembelajaran; atau b. perancangan model teknologi pembelajaran; atau c. produksi media pembelajaran; atau d. penerapan model dan pemanfaatan media pembelajaran; atau e. pengendalian model pembelajaran; atau f. evaluasi penerapan model dan pemanfaatan media pembelajaran.			

NO	IADATAN	OVADAT DENGALAMAN KEDIA	SYARAT SERT	IFIKASI KEAHLIAN	KETEDANCAN
NO	JABATAN	SYARAT PENGALAMAN KERJA	SIFAT	JENIS	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
8	Perekayasa Ahli Pertama	 Memiliki pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun dalam jabatan/bidang terkait: a. Pelaksanaan perekayasaan, seperti pengujian teknologi, pengembangan teknologi, rancang bangun, atau b. Pelaksanaan kliring dan audit teknologi; atau c. Pelaksanaan kegiatan Alih Teknologi, Intermediasi Teknologi, dan Komersialisasi Teknologi, atau d. Pelaksanaan Kegiatan Difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 			
9	Perencana Ahli Pertama	Memiliki pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun dalam jabatan/bidang terkait: a. penyiapan, pengkajian, perumusan kebijakan dan rencana pembangunan infrastruktur jalan/jembatan/bangunan sumber daya air/perumahan dan permukiman; atau b. pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan infrastruktur jalan/jembatan/bangunan sumber daya air/perumahan dan permukiman.			
10	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Memiliki pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun dalam jabatan/bidang terkait: a. Perencanaan layanan informasi dan kehumasan, seperti analisis data dan informasi dari media atau masyarakat, perancangan kegiatan konferensi pers/seminar/lokakarya, atau b. Pelayanan informasi dan kehumasan, seperti pengolahan konten media, pengumpulan dan pengolahan isu publik, penyusunan materi layanan informasi untuk media elektronik, penyusunan berita pelayananan informasi untuk			

NO	LADATAN	IADATAN SVADAT DENCALAMAN KEDIA	SYARAT SERT	IFIKASI KEAHLIAN	KETEDANGAN	
NO	JABATAN	SYARAT PENGALAMAN KERJA	SIFAT	JENIS	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	6	
		media cetak/elektronik/daring, penyusunan naskah profil kelembagaan, tim kreatif penerbitan media pelayanan informasi untuk media cetak/elektronik/daring; atau c. Pelaksanaan hubungan eksternal dan internal, seperti pengumpulan dan pengolahan isu hubungan internal, peliputan kegiatan kelembagaan; atau d. Audit komunikasi kehumasan.				
11	Pranata Komputer Ahli Pertama	Memiliki pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun dalam jabatan/bidang terkait: a. Manajemen layanan TI; atau b. Pengelolaan data (<i>Data management</i>); atau c. Audit TI; atau d. Sistem jaringan komputer; atau e. Manajemen infrastruktur TI; atau f. Sistem informasi; atau g. Pengolahan data; atau h. Pengelolaan keamanan siber: atau i. Area TI spesial/khusus, seperti penyusunan definisi sistem proyeksi pada suatu data spasial, pembuatan peta tematik rinci, pengolahan data atribut dan spasial rinci.				
12	Statistisi Ahli Pertama	Memiliki pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun dalam jabatan/bidang terkait: a. Penyediaan Data dan informasi Statistik, seperti identifikasi prioritas kebutuhan Data Statistik, perancangan penyelenggaraan Kegiatan Statistik, persiapan penyelenggaraan Kegiatan Statistik, pengumpulan Data, pengolahan Data Statistik, analisis Data Statistik; atau b. Penguatan Sistem Statistik Nasional, seperti				

NO	IADATAN	CVADAT DENCALAMAN KED IA	SYARAT SERT	IFIKASI KEAHLIAN	KETEDANCAN
NO	JABATAN	SYARAT PENGALAMAN KERJA	SIFAT	JENIS	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		penjaminan kualitas Kegiatan Statistik, pengembangan Statistik, pengelolaan metadata dan standar Data Statistik, penguatan Statistik Sektoral.			
13	Surveyor Pemetaan Ahli Pertama	Memiliki pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun dalam jabatan/bidang terkait: a. penyelenggaraan informasi geospasial, seperti pelaksanaan Survei pendahuluan/ Orientasi/ Rekonesen, uji kelayakan alat survei kompleks, Analisis Detail Engineering Design, Survei Terestris untuk Garis Pantai, kompilasi data Continously Operating Reference System (CORS), Pengolahan Baseline dari data ukuran GNSS Geodetik untuk penentuan SRGI/ Datum/Geodinamika, survey dalam rangka perencanaan/pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan lain-lain;atau b. pembinaan penyelenggaraan informasi geospasial, seperti asistensi Kegiatan Pengumpulan DG dan IG tematik, dan lain-lain; atau c. pembangunan infrastruktur informasi geospasial, seperti penyuntingan dokumen rancangan standar bidang IG, Pembangunan dan pengelolaan Aplikasi SIG berbasis Web, Desktop atau Mobile, dan lain-lain.			
14	Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Pertama	Memiliki pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun dalam jabatan/bidang terkait : a. Pengkajian dan penyusunan rencana jaringan jalan, jembatan, atau terowongan; atau b. Penyusunan prastudi kelayakan dan studi kelayakan pengembangan jalan; atau	Tidak wajib (untuk afirmasi penambahan nilai)	Sertifikasi Keahlian Konstruksi Ahli Muda Bidang Sipil Jalan dan Jembatan yang dikeluarkan oleh Asosiasi	

NO	IADATAN	OVADAT DENGALAMAN KEDIA	SYARAT SERT	IFIKASI KEAHLIAN	KETEDANGAN
NO	JABATAN	SYARAT PENGALAMAN KERJA	SIFAT	JENIS	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		 c. penyiapan rekomendasi teknis untuk preservasi dan pembangunan jalan, jembatan, atau terowongan; atau d. perencanaan teknis jalan, jembatan, atau terowongan; atau e. pelaksanaan pekerjaan jalan, jembatan, atau terowongan; f. pelaksanaan sistem manajemen keselamatan konstruksi bidang jalan, jembatan, atau terowongan; atau g. pengawasan dan pemantauan pelaksanaan konstruksi jalan, jembatan dan terowongan. 		Profesi yang terakreditasi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), antara lain: 1. Ahli Teknik Jalan 2. Ahli Teknik Jembatan 3. Ahli Keselamatan Jalan 4. Ahli Teknik Terowongan 5. Ahli Teknik Geoteknik 6. Ahli Teknik	
15	Teknik Pengairan Ahli Pertama	Memiliki pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun dalam jabatan/bidang terkait: a. penyusunan norma, standar, pedoman dan kriteria (NSPK) bidang Sumber Daya Air; atau b. penyusunan program teknis bidang Sumber Daya Air; atau c. penyusunan pola Pengelolaan Sumber Daya Air; atau d. penyusunan rencana Pengelolaan Sumber Daya Air; atau e. pengkajian teknologi terapan Pengelolaan Sumber Daya Air; atau f. pelaksanaan sistem manajemen mutu (SMM), sistem manajemen lingkungan (SML), sistem			

NO	NO JABATAN SYARAT PENGALAMAN KERJA	OVADAT DENGALAMAN KEDIA	SYARAT SERT	IFIKASI KEAHLIAN	KETERANGAN	
NO	JABATAN	SYAKAT PENGALAMAN KEKJA	SIFAT	JENIS	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	6	
		manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) bidang Sumber Daya Air; atau g. penyusunan studi kelayakan sungai, daerah pantai, drainase utama perkotaan, daerah irigasi, rawa, air tanah,air baku, bendungan, danau, situ, embung, atau long storage; atau h. penyusunan desain bangunan sungai/daerah pantai/drainase utama perkotaan/daerah irigasi/rawa/air tanah/air baku/bendungan/danau/situ/embung/long storage; atau i. pelaksanaan konstruksi bangunan sungai/daerah pantai/ /drainase utama perkotaan/jaringan irigasi/rawa/air tanah/air baku/bendungan/danau/situ/embung/long storage; atau j. pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan bangunan sungai/daerah pantai/ /drainase utama perkotaan/jaringan irigasi/rawa/air tanah/air baku/bendungan/danau/situ/embung/long storage, atau k. pelaksanaan pengendalian manajemen risiko Pengelolaan Sumber Daya Air.				
16	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	 Memiliki pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun dalam jabatan/bidang terkait: a. penyusunan strategi bidang penyehatan lingkungan; atau b. perencanaan pengaturan bidang penyehatan lingkungan; atau c. pengelolaan manajemen risiko bidang penyehatan lingkungan; atau d. perencanaan penyelenggaraan infrastruktur berbasis masyarakat bidang penyehatan lingkungan/ system penyediaan air minum/ sistem 				

NO	LADATAN	JABATAN SYARAT PENGALAMAN KERJA	SYARAT SERT	IFIKASI KEAHLIAN	KETEDANCAN
NO	JABATAN	SYAKAT PENGALAMAN KEKJA	SIFAT	JENIS	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		pengelolaan air limbah domestic/ prasarana dan sarana persampahan/ sistem drainase lingkungan; atau e. pelaksanaan penyelenggaraan infrastruktur berbasis masyarakat bidang penyehatan lingkungan/ sistem penyediaan air minum/ sistem pengelolaan air limbah domestic/ prasarana dan sarana persampahan/ sistem drainase lingkungan.			
17	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Ahli Pertama	Memiliki pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun dalam jabatan/bidang terkait: a. perencanaan bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman; atau b. penyusunan strategi bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman; atau c. perencanaan pengaturan bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman; atau d. Pengelolaan manajemen risiko bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman; atau e. perencanaan penyelenggaraan infrastruktur berbasis masyarakat bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman/ Bangunan Gedung negara/ Bangunan Gedung hijau/ Kawasan Permukiman; atau f. pelaksanaan penyelenggaraan infrastruktur berbasis masyarakat bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman/ Bangunan Gedung negara/ Bangunan Gedung hijau/ Kawasan Permukiman; atau g. penyelenggaraan Bangunan Gedung; atau h. penataan bangunan dan lingkungan.			
18	Arsiparis Terampil	Memiliki pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun dalam jabatan/bidang terkait :			

NO.	LADATAN	OVADAT DENGALAMAN KED IA	SYARAT SERT	IFIKASI KEAHLIAN	KETEDANGAN	
NO	JABATAN	SYARAT PENGALAMAN KERJA	SIFAT	JENIS	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	6	
		a. pengelolaan arsip dinamis; ataub. pengelolaan arsip statis.				
19	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	Memiliki pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun dalam jabatan/bidang terkait: a. Pengumpulan data dan informasi untuk perencanaan dan pelaksanaan layanan informasi dan kehumasan/hubungan internal/hubungan ekternal, atau b. Pengumpulan konten media dan pemutakhiran data dan informasi publik; atau c. Penyusunan statistik pelayanan informasi dan kehumasan; atau; d. Penyusunan materi layanan informasi untuk media daring/tatap muka; atau e. Pembuatan desain untuk peningkatan pelaksanaan hubungan eksternal dalam bentuk foto/slide/spanduk/banner/backdrop; atau f. Penyusunan rencana kebutuhan sarana, prasarana dan biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan.				
20	Pranata Komputer Terampil	Memiliki pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun dalam jabatan/bidang terkait: a. Pengelolaan data/Data management (penggandaan data); atau b. Pengolahan data (perekaman dan pemindaian data); atau c. Sistem jaringan komputer (troubleshooting jaringan); atau d. Manajemen infrastruktur TI (pemasangan, pemeliharaan dan troubleshooting perangkat TI); atau e. Area TI spesial/khusus, seperti perekaman data				

NO	JABATAN	SYARAT PENGALAMAN KERJA	SYARAT SERT	IFIKASI KEAHLIAN	KETERANGAN
NO	JADATAN	STARAT PENGALAMAN KERJA	SIFAT	JENIS	KETEKANGAN
1	2	3	4	5	6
		spasial.			
21	Pranata Laboratorium Pendidikan Terampil	Memiliki pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun dalam jabatan/bidang terkait: a. Perancangan kegiatan laboratorium, seperti inventarisasi data dalam penyusunan program tahunan pengelolaan Laboratorium; atau b. Pengoperasian peralatan dan penggunaan bahan, seperti identifikasi dan pemetaan peralatan pada kegiatan pendidikan/penelitian, pengumpulan dan verifikasi data kebutuhan bahan; atau			
22	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil	c. Pemeliharaan/perawatan peralatan dan bahan. Memiliki pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun dalam jabatan/bidang terkait: a. penyiapan dan verifikasi bahan/data/informasi untuk penyusunan kebutuhan SDM/proses pengelolaan pangkat dan jabatan/penegakan disiplin pegawai/penilaian kinerja pegawai/pengembangan kompetensi; atau b. penyiapan dan verifikasi bahan/data/informasi untuk proses pengelolaan sistem informasi SDM.			
23	Pustakawan Terampil	Memiliki pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun dalam jabatan/bidang terkait : a. Pengelolaan perpustakaan; atau b. Pelayanan Perpustakaan; atau c. Pengembangan Sistem Kepustakawanan.	Tidak wajib (untuk afirmasi penambahan nilai)	Sertifikasi kompetensi kerja Pustakawan masih berlaku yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pustakawan.	
24	Statistisi Terampil	Memiliki pengalaman kerja paling singkat 2 (dua)			

NO	IADATAN	CVADAT DENCALAMAN KED IA	SYARAT SERT	FIKASI KEAHLIAN	KETEDANCAN
NO	JABATAN	SYARAT PENGALAMAN KERJA	SIFAT	JENIS	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		 tahun dalam jabatan/bidang terkait: a. Penyediaan data dan informasi statistik,seperti penyiapan alokasi dokumen survei/peralatan observasi, pengumpulan dan pengolahan data sekunder; atau b. Penyajian dan publikasi statistik, seperti pembuatan peta tematik manual kegiatan. 			
25	Surveyor Pemetaan Terampil	Memiliki pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun dalam jabatan/bidang terkait penyelenggaraan informasi geospasial, seperti penyiapan dan inventarisasi peralatan untuk pelaksanaan survei, penyusunan petunjuk operasional survei lapangan, pengukuran posisi/tinggi/sudut dengan alat sederhana berupa global navigation satellite system tipe navigasi/barometrik/kompas, pengukuran data geospasial tematik darat, pengeckan lapangan dan toponim, dan lain-lain.			
26	Teknik Jalan Dan Jembatan Terampil	Memiliki pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun dalam jabatan/bidang terkait: a. perencanaan sistem jaringan jalan, studi kelayakan, dan dokumen lingkungan; atau b. persiapan perencanaan teknis jalan, jembatan, atau terowongan; atau c. perencanaan teknis jalan, jembatan, atau terowongan; atau d. pelaksanaan pekerjaan jalan, jembatan, atau terowongan;atau e. pengujian bahan atau peralatan bidang jalan, jembatan, atau terowongan; atau f. pelaksanaan kegiatan kelaikan fungsi jalan; atau g. pengelolaan data jalan, jembatan, atau	Tidak wajib (untuk afirmasi penambahan nilai)	Sertifikasi Keahlian Konstruksi Ahli Muda Bidang Sipil Jalan dan Jembatan yang dikeluarkan oleh Asosiasi Profesi yang terakreditasi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), antara lain: 1. Ahli Teknik Jalan 2. Ahli Teknik	

NO	IADATAN	OVADAT DENGALAMAN KEDIA	SYARAT SERT	IFIKASI KEAHLIAN	KETEDANCAN
NO	JABATAN	SYARAT PENGALAMAN KERJA	SIFAT	JENIS	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		terowongan.		Jembatan 3. Ahli Keselamatan Jalan 4. Ahli Teknik Terowongan 5. Ahli Teknik Geoteknik 6. Ahli Teknik	
27	Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil	Memiliki pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun dalam jabatan/bidang terkait: a. perencanaan penyelenggaraan infrastruktur berbasis masyarakat bidang penyehatan lingkungan/ system penyediaan air minum/ sistem pengelolaan air limbah domestic/ prasarana dan sarana persampahan/ sistem drainase lingkungan; atau b. pelaksanaan penyelenggaraan infrastruktur berbasis masyarakat bidang penyehatan lingkungan/ sistem penyediaan air minum/ sistem pengelolaan air limbah domestic/ prasarana dan sarana persampahan/ sistem drainase lingkungan			
28	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan Terampil	Memiliki pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun dalam jabatan/bidang terkait : a. perencanaan penyelenggaraan infrastruktur berbasis masyarakat bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman/ Bangunan Gedung negara/ Bangunan Gedung hijau/ Kawasan Permukiman; atau b. pelaksanaan penyelenggaraan infrastruktur			

NO	JABATAN	TAN SYARAT PENGALAMAN KERJA		SYARAT SERTIFIKASI KEAHLIAN		
NO	JADATAN	STARAT PENGALAWAN KERJA	SIFAT	JENIS	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	6	
29	Teknisi Penelitian dan Perekayasaan Terampil	berbasis masyarakat bidang Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman/ Bangunan Gedung negara/ Bangunan Gedung hijau/ Kawasan Permukiman; atau c. penyelenggaraan Bangunan Gedung; atau d. penataan bangunan dan lingkungan. Memiliki pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun dalam jabatan/bidang terkait: a. Persiapan kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan Teknologi; atau b. Pelaksanaan kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan Teknologi; atau c. Pasca pelaksanaan kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan Teknologi.				

- 1. Pelamar selain memiliki kualifikasi pendidikan, pengalaman kerja serta sertifikasi keahlian terkait jabatan yang dilamar sebagaimana dimaksud di atas, juga wajib memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana diatur dalam pengumuman ini.
- 2. Pelamar penyandang disabilitas dapat melamar pada jabatan fungsional teknis, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelamar memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) di atas.
 - b. Pada saat melamar di SSCASN, pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas dan memenuhi persyaratan yang berlaku untuk jenis jabatan tersebut.

II. PERSYARATAN

- 1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan YME, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2. Berusia paling rendah 20 tahun 0 bulan 0 hari dan paling tinggi 57 tahun 0 bulan 0 hari pada saat melamar (menyelesaikan pendaftaran secara online di portal seleksi ASN nasional (https://sscasn.bkn.go.id). Batas usia sebagaimana dimaksud, dihitung berdasarkan tanggal kelahiran yang tercantum pada ijazah yang digunakan sebagai dasar untuk pelamaran.

- 3. Berkelakuan baik dan tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunya kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih (Dibuktikan dengan menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan pada saat pendaftaran serta dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian pada saat dinyatakan lulus pada Pengumuman Kelulusan Akhir Seleksi Pengadaan ASN).
- 4. Tidak berkedudukan sebagai calon ASN, ASN, prajurit TNI, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia(*Dibuktikan dengan menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan pada saat pendaftaran*).
- 5. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (Dibuktikan dengan menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan pada saat pendaftaran).
- 6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis (Dibuktikan dengan menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan pada saat pendaftaran).
- 7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan sebagaimana tercantum pada tabel lampiran I kolom 3, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada saat kelulusan (pada saat tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah); atau
 - b. Memiliki ijazah dari Perguruan Tinggi Luar Negeri yang telah mendapat penyetaraan Ijazah luar negeri dan penyetaraan/konversi nilai IPK dari Kementerian yang menyelenggarakaan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
 - c. Apabila **akreditasi pada saat lulus tidak tercantum/terdata** dalam sumber informasi akreditasi sebagai berikut :
 - 1) ijazah/transkrip nilai; atau
 - 2) data website pendaftaran ASN nasional (https://sscasn.bkn.go.id); atau
 - pangkalan data pendidikan tinggi yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi; atau
 - 4) pangkalan data (database) Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, maka harus dibuktikan dengan surat keterangan akreditasi yang serendah-rendahnya ditandatangani oleh Pembantu Dekan Bidang Akademi katau Pejabat lainnya yang dipersamakan (hasil scan surat keterangan diunggah bersama ijazah pada saat pendaftaran secara online di portal seleksi ASN nasional).
 - d. Pada saat mendaftar, seluruh pelamar wajib telah memiliki ijazah Perguruan Tinggi (Surat Keterangan Lulus tidak berlaku).
 - e. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), minimal 2,75 pada skala 4,00.
- 8. Memiliki masa kerja dan pengalaman kerja pada bidang yang sesuai dengan jabatan yang dilamar sebagaimana tercantum pada tabel lampiran II bagian I Kriteria Pelamar (kolom 3) dan dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh :
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (setara eselon II) bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di Instansi Pemerintah.
 - b. Direktur/Kepala Divisi yang membidangi sumber daya manusia bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya non pemerintah/yayasan.

- 9. Memiliki kompetensi/keahlian teknis jabatan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Untuk kebutuhan jabatan yang syarat sertifikasi keahliannya bersifat wajib sebagaimana tercantum pada tabel lampiran II bagian I Kriteria Pelamar (kolom 4) maka pelamar harus membuktikan dengan Sertifikat Keahlian sebagaimana tercantum pada tabel lampiran II bagian I Kriteria Pelamar (kolom 5) yang masih berlaku pada saat pendaftaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tercantum pada sertifikat.
 - b. Untuk kebutuhan jabatan yang syarat sertifikasi keahliannya bersifat afirmasi untuk penambahan nilai sebagaimana tercantum pada tabel lampiran II bagian I Kriteria Pelamar (kolom 4), maka pelamar dapat menambahkan dokumen Sertifikat Keahlian sebagaimana tercantum pada tabel lampiran II bagian I Kriteria Pelamar (kolom 5) yang masih berlaku pada saat pelamaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tercantum pada sertifikat, apabila pelamar memiliki sertifikasi dimaksud dan menginginkan afirmasi penambahan nilai.
- 10. Memiliki kemampuan/menguasai bahasa inggris dengan baik yang dibuktikan dengan hasil tes kemampuan bahasa Inggris yang **diterbitkan paling lama tahun 2021**, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Sertifikat kemampuan bahasa inggris yang dikeluarkan oleh ETS (Educational Testing Service) dengan skor minimal 450 untuk TOEFL ITP (Institutional Testing Program), atau skor minimal 53 untuk IBT (Internet Based Test), atau skor minimal 405 untuk TOEIC;
 - b. Sertifikat kemampuan bahasa inggris IELTS (*International English Language Testing System*) dengan skor minimal 5;
 - c. Sertifikasi kemampuan bahasa inggris (English Proficiency Test/TOEFL Prediction/dll) yang dikeluarkan oleh Lembaga Bahasa Perguruan Tinggi Negeri/Swasta dan Lembaga Bahasa Swasta lainnya dengan skala penilaian menyerupai/sama dengan/dapat disetarakan dengan skala penilaian pada huruf a) dan b) di atas.
- 11. Bersedia untuk membatalkan perjanjian/kontrak kerja dengan instansi pemerintah/swasta lain, pada saat dinyatakan lulus (Dibuktikan dengan menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan pada saat pendaftaran).
- 12. Bersedia ditempatkan di seluruh Unit Kerja/Satuan Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Dibuktikan dengan menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan pada saat pendaftaran).
- 13. Bebas dari penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya dan tidak pernah terlibat tindak pidana terkait penyebaran Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (Dibuktikan dengan Surat Keterangan Bebas Narkoba/NAPZA yang masih berlaku pada saat dinyatakan lulus pada Pengumuman Kelulusan Akhir Seleksi Pengadaan ASN).
- 14. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar(dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Surat Keterangan Sehat Rohani dari Dokter di Rumah Sakit Pemerintah/Unit Pelayananan Kesehatan Pemerintah setempat yang berlaku, dan diserahkan pada saat dinyatakan lulus seleksi pengadaan ASN). Bagi pelamar penyandang disabilitas, pada saat pendaftaran secara online di portal seleksi ASN nasional (https://sscasn.bkn.go.id) diwajibkan untuk:
 - a. melampirkan surat keterangan yang memuat jenis dan derajat kedisabilitasannya dari Dokter di Rumah Sakit Pemerintah/Unit Pelayananan Kesehatan Pemerintah setempat yang dikeluarkan paling lama 6 (enam) bulan terakhir, dan
 - b. menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

15. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer yang meliputi kemampuan mengoperasikan sistem operasi, menggunakan aplikasi perkantoran (pengolah kata, presentasi, pengolah data dan grafis) dan menggunakan internet (pengoperasian *email* dan kemampuan *browsing/searching*).

III. TATA CARA PENDAFTARAN

- 1. Seluruh pelamar melakukan pendaftaran secara *online* melalui website *https://sscasn.bkn.go.id*.
- 2. Pada saat melakukan pendaftaran *online*, pelamar hanya diperbolehkan memilih 1 (satu) lowongan jabatan pada 1 (satu) kategori pelamar.
- 3. Pelamar harap membaca dan mengikuti ketentuan pendaftaran *online* dengan baik dan teliti serta menyiapkan terlebih dahulu persyaratan yang harus dipenuhi sebelum mulai mengisi formulir pendaftaran *online* sesuai tata cara yang tercantum pada website https://sscasn.bkn.go.id.
- 4. Pelamar wajib mengunggah (*upload*) dokumen-dokumen kelengkapan yang berupa data digital/hasil *scan* atas dokumen asli,sebagai berikut :
 - a. Hasil scan Surat Lamaran asli yang ditujukan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan sudah ditandatangani dengan tinta hitam oleh pelamar serta dibubuhi e-materai/materai tempel Rp. 10.000,- dalam file format pdf. (surat lamaran yang diunggah harus merupakan hasil ketikan menggunakan komputer sesuai dengan format pada lampiran III pengumuman ini),
 - b. Pas Foto terbaru, sekurang-kurangnya menggunakan kemeja dengan warna latar berwarna merah dalam file format jpg.
 - c. Hasil *scan* KTP asli/Surat Keterangan asli Pengganti KTP/Surat Keterangan asli Perekaman Data E-KTP dalam file format pdf.
 - d. Hasil scan Surat Pernyataan Asli yang telah ditandatangani serta dibubuhi e-materai/materai tempel Rp. 10.000,- dalam file format pdf. (surat pernyataan yang diunggah berupa hasil ketikan menggunakan komputer sesuai dengan format pada lampiran IV pengumuman ini).
 - e. Hasil s*can* ijazah asli sesuai yang dipersyaratkan dalam 1 (satu) file format pdf multi halaman. Khusus bagi :
 - 1) Pelamar lulusan Perguruan Tinggi luar negeri menyertakan hasil *scan* Surat Penyetaraan Ijazah asli; dan/atau
 - 2) Pelamar yang keterangan akreditasi pada saat lulus tidak tercantum dalam ijazah/transkrip nilai/tidak terdapat dalam direktori hasil akreditasi Perguruan Tinggi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada website (https://banpt.or.id) dan juga tidak terdeteksi secara otomatis pada website pendaftaran ASN nasional menyertakan surat keterangan akreditasi.
 - f. Hasil *scan* transkrip nilai asli sesuai ijazah dalam 1 (satu) file format pdf multi halaman. Bagi pelamar lulusan Perguruan Tinggi luar negeri menyertakan hasil *scan* Surat Penyetaraan/konversi nilai IPK asli.
 - g. Hasil scan Surat Pengalaman Kerja pada Instansi Pemerintah/Swasta asli yang sudah ditandatangani pejabat yang sesuai ketentuan dalam 1 (satu) file format pdf multi halaman. (surat pengalaman kerja yang diunggah harus merupakan hasil ketikan menggunakan komputer sesuai dengan format pada lampiran V pengumuman ini).
 - h. Hasil scan Sertifikat Kompetensi/Keahlian asli dalam file format pdf. (Untuk jabatan yang mewajibkan Sertifikat Kompetensi/Keahlian, dokumen wajib diunggah).
 - i. Hasil scan Sertifikat tes kemampuan Bahasa Inggris Asli dalam file format pdf.

- j. Bagi pelamar yang berstatus sebagai penyandang disabilitas, diharuskan mengunggah:
 - 1) Hasil *scan* surat keterangan asli yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasan dalam file format pdf (*surat keterangan yang diunggah berupa sesuai dengan format pada lampiran VI pengumuman ini*).
 - 2) Membuat video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar dengan ketentuan:
 - a) dalam video, seluruh badan peserta harus terlihat jelas;
 - b) memperlihatkan aktifitas dalam melaksanakan pekerjaan terutama aktifitas yang terkait jenis disabilitasnya
 - c) durasi video sekurang-kurangnya 7 menit.
 - d) video diunggah dalam media google drive/aplikasi youtube, peserta menyampaikan link akses video melalui formulir yang sudah disediakan pada aplikasi pendaftaran (https://sscasn.bkn.go.id)
- 5. Pelamar harus memastikan seluruh dokumen yang diunggah pada angka 4 di atas sudah lengkap, secara keseluruhan fisik dokumen terlihat jelas dan dapat dibaca sebelum memfinalkan proses pendaftaran.

IV. TAHAPAN DAN SISTEM KELULUSAN SELEKSI

Seleksi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- 1. Seleksi Administrasi
 - a. Seleksi Administrasi dilakukan secara *online* atas dokumen yang diunggah (upload) oleh Pelamar pada saat pendaftaran.
 - b. Apabila dari dokumen yang diunggah (upload) oleh pelamar telah sesuai dengan ketentuan dan dapat menunjukkan yang bersangkutan memenuhi persyaratan, dinyatakan lolos seleksi administrasi.
 - c. Pelamar yang lolos seleksi administrasi akan diumumkan pada website Sistem Seleksi ASN Nasional (https://sscasn.bkn.go.id) dan website Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (https://setjen.pu.go.id/bko)
 - d. Pelamar yang lolos seleksi administrasi dapat mencetak Kartu Tanda Peserta Seleksi dan berhak mengikuti Seleksi Kompetensi.
 - e. Pencetakan Kartu Peserta Ujian dilakukan oleh **masing-masing Pelamar** melalui website Sistem Seleksi ASN Nasional **(https://sscasn.bkn.go.id).**
 - f. Hasil cetak Kartu Peserta Ujian agar disimpan dengan baik sebagai kelengkapan pada saat pelaksanaan rangkaian seleksi.
 - g. Bagi Pelamar yang dinyatakan "tidak memenuhi syarat" (TMS) seleksi administrasi, dapat mengajukan keberatan/sanggahan atas hasil seleksi administrasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Sanggahan diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah pengumuman hasil seleksi administrasi melalui website Sistem Seleksi ASN Nasional (https://sscasn.bkn.go.id).
 - Panitia Seleksi ASN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar.
 - 3) Panitia Seleksi ASN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan tersebut bukan berasal dari pelamar.
 - 4) Apabila sanggahan pelamar diterima, Panitia Pelaksana Seleksi ASN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

2. Seleksi Kompetensi Dan Wawancara

- a. Materi Seleksi Kompetensi meliputi :
 - Seleksi kompetensi teknis terdiri atas seleksi kompetensi teknis dengan metode Computer Assisted Test (CAT) dan seleksi kompetensi tambahan (Psikotes)
 - a) Seleksi kompetensi teknis bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
 - b) Jumlah soal seleksi kompetensi teknis dengan CAT berjumlah 90 (sembilan puluh butir soal)
 - c) Bobot jawaban benar bernilai 5 (lima) dan salah atau tidak menjawab bernilai 0 (nol).
 - d) Nilai kumulatif paling tinggi untuk seleksi kompetensi teknis sebesar 450 (empat ratus lima puluh).
 - e) Nilai ambang ambang batas seleksi kompetensi teknis dengan metode Computer Assisted Test (CAT) sebagaimana tercantum pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 971 Tahun 2022 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Tahun 2022.
 - f) Seleksi Kompetensi tambahan (Psikotes) dilaksanakan secara daring dengan hasil real time dengan nilai ambang batas skor total minimal (potensi fit) sebesar 64 dengan nilai pada aspek integritas minimal 4 dari skala 5. Seleksi Kompetensi tambahan (Psikotes) bersifat menggugurkan.
 - g) Proporsi nilai Seleksi Kompetensi dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT) berbanding dengan Seleksi Kompetensi Tambahan (Psikotes) adalah 70 : 30.
 - h) Pada Seleksi Kompetensi Teknis diberikan kebijakan penambahan nilai dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Pelamar dari penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasannya sesuai dengan jabatan yang dilamar mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis;
 - ii. Pelamar yang melamar pada jabatan Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Pertama , Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Terampil, Pustakawan Terampil yang memiliki Sertifikat Keahlian sebagaimana tercantum pada tabel lampiran II bagian I Kriteria Pelamar (kolom 5) mendapat tambahan nilai sebesar 15% (tiga puluh lima persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis;
 - iii. Dalam hal pelamar mendapatkan tambahan nilai sebagaimana dimaksud di atas secara kumulatif, diberikan nilai kompetensi teknis tidak lebih dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis sebesar 100%.
 - 2) Seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural
 - a) Seleksi kompetensi manajerial bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku dalam berorganisasi yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan:
 - i. integritas;
 - ii. kerjasama;
 - iii. komunikasi;
 - iv. orientasi pada hasil;
 - v. pelayanan publik;
 - vi. pengembangan diri dan orang lain;
 - vii. mengelola perubahan; dan
 - viii. pengambilan keputusan.

- b) Jumlah soal seleksi kompetensi manajerial berjumlah 25 (dua puluh lima butir soal).
- c) Bobot jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan paling tinggi 4 (empat), serta tidak menjawab bernilai 0 (nol).
- d) Seleksi kompetensi sosial kultural bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan, dalam peran pemangku jabatan sebagai perekat bangsa yang memiliki:
 - i. kepekaan terhadap perbedaan budaya;
 - ii. kemampuan berhubungan sosial;
 - iii. kepekaan terhadap konflik; dan
 - iv. empati.
- d) Jumlah soal seleksi kompetensi sosial kultural berjumlah 20 (dua puluh butir soal).
- e) Bobot jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan paling tinggi 5 (lima), serta tidak menjawab bernilai 0 (nol).
- f) Nilai kumulatif paling tinggi untuk seleksi kompetensi manajerial disatukan dengan seleksi kompetensi sosial kultural sebesar 200 (dua ratus).
- g) Nilai ambang batas seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural sebesar 130.

3) Wawancara

- Wawancara dimaksudkan untuk menilai integritas dan moralitas. Jumlah soal wawancara sejumlah 10 (sepuluh) butir soal dengan bobot jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan paling tinggi 4 (empat), serta tidak menjawab bernilai 0 (nol). Nilai kumulatif paling tinggi untuk wawancara adalah 40 (empat puluh) dengan nilai ambang batas adalah 24.
- 4) Seleksi kompetensi teknis dengan CAT, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural dilaksanakan dalam durasi waktu 120 (seratus dua puluh) menit dan wawancara dalam durasi waktu 10 (sepuluh) menit. Bagi pelamar yang berstatus penyandang disabilitas tuna netra seleksi kompetensi dilaksanakan dalam durasi waktu 150 (seratus lima puluh) menit dan wawancara dalam durasi waktu 15 (lima belas) menit
- b. Seleksi kompetensi dan wawancara sebagaimana dimaksud pada angka 4 di atas dilaksanakan dengan metode *Computer Assisted Test*(CAT) Badan Kepegawaian Negara.
- c. Tata cara pelaksanaan dan durasi waktu seleksi kompetensi tambahan (Psikotes) akan diumumkan kemudian.
- d. Peserta Seleksi Kompetensi pada pelaksanaan tes diwajibkan mengikuti seluruh tata tertib pelaksanaan Seleksi Kompetensi.
- e. Terhadap Peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti Seleksi Kompetensi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur.Bagi peserta yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan sedang menjalani isolasi dapat mengajukan permohonan penjadwalan ulang Seleksi Kompetensi mengacu pada ketentuan/tata cara yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara.

V. PENETAPAN KELULUSAN SELEKSI

- 1. Penilaian dan prinsip penentuan kelulusan peserta mengacu pada nilai ambang batas dan ketentuan kelulusan sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada setiap jenis kebutuhan jabatan dan pendidikan.
- 2. Pengumuman kelulusan penerimaan Calon PPPK Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan ditayangkan melalui website Sistem Seleksi ASN Nasional (https://sscasn.bkn.go.id) dan website Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (https://setjen.pu.go.id/bko).
- 3. Bagi peserta yang dinyatakan tidak lulus, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari dapat mengajukan sanggah atas hasil akhir seleksi melalui website https://sscasn.bkn.go.id.
- 4. Bagi peserta yang dinyatakan lulus seleksi tetapi mengundurkan diri, diwajibkan membuat Surat Pernyataan Mengundurkan Diri bermaterai Rp 10.000,-, dan Panitia Seleksi dapat menggantikan dengan Pelamar yang memiliki peringkat terbaik dibawahnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- 5. Seluruh peserta wajib membuat surat pernyataan bersedia mengabdi pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat saat pendaftaran dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun selama masa hubungan kerja sejak terhitung mulai tanggal diangkat sebagai PPPK. Surat pernyataan disampaikan (diunggah) saat pendaftaran dan fisik surat disampaikan pada saat pemberkasan nomor induk PPPK.
- 6. Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud di atas tetap mengajukan pindah, yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri.
- 7. Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus, tetapi di kemudian hari terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri PANRB dan/atau tidak memenuhi persyaratan lainnya, maka kelulusan yang bersangkutan akan dibatalkan.
- 8. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan Nomor Induk PPPK, kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan Aparatur Sipil Negara untuk periode berikutnya.
- 9. Dalam hal peserta yang dinyatakan lulus usianya kurang dari 1 (satu) tahun dari batas usia pensiun (BUP) jabatan 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat pengangkatan maka perjanjian hubungan kerja diberlakukan 1 (satu) tahun sejak pengangkatan sebagai PPPK dan diberhentikan sebagai PPPK setelah masa perjanjian kerja berakhir.

VI. JADWAL DAN LOKASI PELAKSANAAN SELEKSI

Jadwal dan lokasi pelaksanaan Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2022, adalah sebagai berikut :

a. Jadwal Umum Pelaksanaan Seleksi :

NO	TAHAPAN	JADWAL PELAKSANAAN	KETERANGAN
1	Pendaftaran secara Online	21 Desember 2022 – 06 Januari 2023	
2	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	12 – 15 Januari 2023	
3	Masa Sanggah Hasil Seleksi Administrasi	16 – 18 Januari 2023	
4	Verifikasi & Tanggapan Sanggah Hasil Seleksi Administrasi	19 – 25 Januari 2023	
5	Pengumuman Hasil	26 – 28 Januari 2023	

NO	TAHAPAN	JADWAL PELAKSANAAN	KETERANGAN
	Seleksi Administrasi Pasca Sanggah		
6	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	10 Maret – 06 April 2023	
7	Pengumuman Kelulusan Akhir	09 – 11 April 2023	
8	Masa Sanggah Hasil Akhir Seleksi	12 – 14 April 2023	
9	Tanggapan Sanggah Hasil Akhir Seleksi	14 - 20 April 2023	
10	Pengumuman Hasil Akhir Seleksi Pasca Sanggah	27 – 29 April 2023	
11	Pengisian Daftar Riwayat Hidup	30 April – 22 Mei 2023	
12	Usul Penetapan Nomor Induk PPPK	23 Mei – 20 Juni 2023	

Jadwal pelaksanaan seleksi dapat berubah sewaktu-waktu apabila terdapat kebijakan baru dari Panitia Seleksi Nasional.

- b. Lokasi Pelaksanaan Seleksi Kompetensi:
 - 1. Seleksi Kompetensi akan dilaksanakan di fasilitas *Computer Assisted Test* (CAT) yang disediakan oleh Badan Kepegawaian Negara.
 - 2. Pelamar disarankan untuk memilik lokasi seleksi terdekat dari tempat domisili untuk mengurangi mobilisasi antar wilayah.
 - 3. Jadwal pelaksanaan Seleksi Kompetensi, akan diumumkan kemudian.

VII. LAIN-LAIN

- 1. Seleksi Pengadaan CPPPK Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat **TIDAK DIPUNGUT BIAYA**.
- 2. Segala biaya/akomodasi selama mengikuti proses seleksi ditanggung oleh Pelamar.
- 3. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Panitia Seleksi sehingga peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran yang menjanjikan kemudahan pengangkatan sebagai Aparatur Sipil Negara.
- 4. Peserta seleksi aparatur sipil negara tahun 2021 yang dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan telah mendapatkan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP)/ Nomor Induk PPPK dari BKN, kemudian mengundurkan diri, maka yang bersangkutan tidak dapat mendaftar pada seleksi pengadaan Aparatur Sipil Negara tahun 2022.
- 5. Berkas lamaran yang dikirimkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebelum pengumuman Pengadaan Calon PPK Tahun 2022 dan tidak mengikuti prosedur pengadaan Calon PPPK 2022 tidak akan diproses dan dianggap tidak berlaku serta tidak dapat diminta kembali.
- 6. Berkas lamaran yang diterima panitia menjadi milik panitia dan tidak dapat diminta kembali oleh pelamar.
- 7. Panitia membuka jalur layanan bantuan melalui :
 - Telepone (hotline) bagi para pelamar pada hari dan jam kerja, Senin-Jumat, pukul 09:00–16:00 WIB selama periode pendaftaran (Panitia tidak melayani SMS).

|--|

0818-0312-1945 dan 0819-0312-1945

b. Layanan Online melalui :

Layanan	Alamat Url./Akun
Twitter	seleksiasnpupr

8. Informasi lebih lanjut mengenai hal-hal lain yang berkaitan dengan pengadaan Calon PPPK Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2022 (pelaksanaan ujian, pengumuman kelulusan, dll) akan ditentukan kemudian dan diinformasikan melalui website Sistem Seleksi ASN Nasional (https://sscasn.bkn.go.id) dan website Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (https://setjen.pu.go.id/bko).

Jakarta, Desember 2022

a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Sekretaris Jenderal

Cap.Ttd

Mohammad Zainal Fatah NIP.196610211996031001

LAMPIRAN III PENGUMUMAN

Nomor : KP.02.01-Mn/2621.1 Tanggal : 20 Desember 2022

Format Surat Lamaran	
Kepada Yth.	2022
•	n dan Perumahan Rakyat
Saya yang bertandatanga	n di bawah ini :
Nama Tempat, tanggal lahir Jenis Kelamin NIK Pendidikan Jabatan yang dilamar	: (Laki-laki / Perempuan)

Dengan ini menyampaikan permohonan agar dapat mengikuti seleksi pengadaan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2022. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan dokumen-dokumen, sebagai berikut:

- 1. Pasfoto terbaru dengan latar belakang warna merah.
- 2. Hasil *scan* KTP asli/Surat Keterangan asli Pengganti KTP/Surat Keterangan asli Perekaman Data E-KTP.
- 3. Hasil *scan* surat pernyataan asli.

Alamat Domisili Saat Ini

- 4. Hasil *scan* Ijazah asli beserta hasil *scan* SK Penyetaraan Ijazah asli dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi (**khusus bagi Ijazah yang diterbitkan di luar negeri**).
- 5. Hasil *scan* transkrip nilai asli beserta hasil *scan* Surat Penyetaraan/Konversi IPK dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi (**khusus bagi ljazah yang diterbitkan di luar negeri**).
- 6. Hasil scan Surat Pengalaman Kerja pada Instansi Pemerintah/Swasta asli.
- 7. Hasil scan Sertifikat Keahlian/Kompetensi asli (khusus bagi jabatan yang mewajibkan/jabatan yang memberikan afirmasi penambahan nilai*).
- 8. Hasil scan Sertifikat tes kemampuan Bahasa Inggris asli.
- 9. Hasil *scan* Surat Keterangan Dokter yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasan (**khusus bagi pelamar penyandang disabilitas***).

Demikian surat lamaran ini dibuat. Adapun seluruh data dan dokumen yang saya berikan adalah benar. Apabila dikemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka saya menerima keputusan panitia untuk membatalkan keikutsertaan/kelulusan dalam proses seleksi dan bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

	Hormat Saya,
materai Rp. 10.000	Ttd
	['] (Nama Lengkap)

^{*)} Hapus/hilangkan yang tidak perlu

LAMPIRAN IV PENGUMUMAN

Nomor : KP.02.01-Mn/2621.1 Tanggal : 20 Desember 2022

Format Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di	bawah ini :
Nama	:
Nomor Induk Kependudukan	:
Agama	:
Tempat, Tanggal Lahir	:
Alamat Sesuai KTP	:

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

- 1. Benar-benar sudah memahami dan memenuhi ketentuan persyaratan Seleksi Pengadaan CPPPK Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2022 dan semua kelengkapan dokumen yang diunggah (*diupload*) pada saat pendaftaran Seleksi Pengadaan CPPPK Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2022 adalah benar sesuai dengan aslinya.
- Berkelakuan baik dan tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.
- Tidak berkedudukan sebagai calon ASN, ASN, prajurit TNI, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
- 5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
- Bersedia untuk membatalkan perjanjian/kontrak kerja dengan instansi pemerintah/swasta lain, pada saat dinyatakan lulus.
- Bersedia ditempatkan di seluruh Unit Kerja/SatuanKerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- 8. Bersedia mengabdi dan menjalani ikatan dinas selama masa hubungan kerja dan tidak mengajukan pindah dengan alas an apapun sejak diangkat sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dibatalkan keikutsertaan dan/atau kelulusan dalam proses seleksi dan bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

	,
materai Rp. 10.000,-	Ttd
	_ (Nama Lengkap)

LAMPIRAN V PENGUMUMAN

Nomor: KP.02.01-Mn/2621.1 Tanggal: 20 Desember 2022

Format Surat Keterangan Pengalaman Kerja PPPK

KOP	SURAT	INSTANSI/PERUSA	ΗΔΔΝ
NOF	JUNAI	IIIO I AIIOI/F LITUOA	IIAAN

SU	RAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA
Saya yang bertandatang	an di bawah ini :
Nama NIP/NIK Jabatan Unit Kerja/Divisi Unit Organisasi Instansi/Perusahaan	
Dengan ini menerangkan	bahwa Saudara/Saudari :
Nama NIK Tempat, Tanggal Lahir Pendidikan	
kerja/divisi, unit organis (diisi awal mi kerja (tgl-bln-tahun)) sec jabatan), dengan uraian t 1	n pegawai/pernah bekerja di (diisi dengan nama unit asi dan nama instansi/perusahaan) selama tahun sejak ulai kerja (tgl-bln-tahun)) sampai dengan
dan yang bersangkutan jabatan tersebut.	memiliki kompetensi dan berkinerja baik dalam menjalankan tugas
sebagai kelengkapan pemerintah dengan perja tahun 2022. Apabila di	gan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan administrasi pendaftaran seleksi pengadaan calon pegawai anjian kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia ksi sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku.
	Yang MembuatPernyataan Jabatan
	Cap. Ttd.
	(Nama Lengkap)

Nomor : KP.02.01-Mn/2621.1 Tanggal : 20 Desember 2022

Format Surat Keterangan Penyandang Disabilitas

KOP SURAT RUMAH SAKIT PEMERINTAH/PUSKESMAS

SURAT KETERANGAN

Nama	:	Jenis Kelamin : Laki/Perempuan*)
Umur	:	
NIK	:	
Ada disabilitas	:	Ya/Tidak*)
Lokasi disabilitas	:	
	-	Susunan syaraf pusat
		sebutkan
	-	Organ Penginderaan
		Sebutkan
	-	Extremitas atas kanan/kiri/keduanya*)
	-	Tangan dominan kanan/kiri*)
	-	Extremitas bawah kanan/kiri/keduanya*)
	-	Lain – lain
		ANAMNESIS**)
1.Riwayat disabilitas	:	·
		- Sejak lahir
		- Sesudah kecelakaan, pada tahun
		- Sesudah sakit, pada tahun
2. Kemampuan	:	
mengurus diri*)		
		- Mampu
		- Sebagian besar bisa, jelaskan yang tidak bisa
		, , , , , ,
		- Perlu bantuan penuh orang lain
3. Bepergian keluar		- 1 end bantdan pendir orang lain
rumah		
Taman		- Bisa sendiri/perlu diantar anggota keluarga*)
		HASIL PEMERIKSAAN **)
4. Jenis disabilitas	a.	Disabilitas Fisik
		 Amputasi (Tangan/Kaki)*) Kelemahan bagian atas anggota gerak atas dan bawah Paraplegi (anggota tubuh bagian bawah yang meliputi kedua tungkai dan organ panggul) Celebral Palsy (CP)

	b. с. d.	Disabilitas Sensorik 1) Netra a) Buta Total b) Persepsi cahaya/Low Vision 2) Rungu 3) Wicara Disabilitas Intelektual 1) Disabilitas grahita 2) Down Syndroma Disabilitas Mental 1) Psikososial (Skizofrenia, Bipolar, Depresi, Anxietas dan Gangguan Kepribadian) *) 2) Disabilitas perkembangan (Autis/Hiperaktif) *)							
5. Derajat Disabilitas Fisik	: 1) 2) 3) 4) 5)	mempertahankan sikap dengan kesulitan Derajat 2: mampu melaksanakan kegiatan atau mempertahankan sikap dengan bantuan alat bantu Derajat 3: mampu melaksanakan aktivitas, sebagian memerlukan bantuan orang lain, dengan atau tanpa alat bantu Derajat 4: dalam melaksanakan aktivitas, tergantung penuh terhadap pengawasan orang lain Derajat 5: tidak mampu melakukan aktivitas tanpa bantuan penuh orang lain dan tersedianya lingkungan khusus							
6. Kemampuan mobilitas	: 1) 2)	Jalan/Jalan perlahan/jalan dengan alat bantu/tidak mampu jalan *) Naik tangga/naik tangga perlahan/tidak mampu naik tangga*)							
7. Gangguan Extremitas ata8. Alat bantu yang digunakan9. Penyakit lain10. PengobatanCatatan Tambahan Lainnya	1) 2) : :	Kanan: kekuatan 5/4/3/2/1/0 Kiri: Kekuatan 5/4/3/2/1/0 Ada/Tidak*), sebutkan Ada/Tidak*), sebutkan Ada/Tidak*), sebutkan							
		Tempat dan Tanggal Pemeriksaan Dokter yang memerikasa							

	N	aı	m	16	3	<u>)</u>	C	ŀ	(te	e	r	-		
NIP	٠.														

^{*)} Coret yang tidakperlu
**) wajib diisi rincian terkait deskripsi kondisi disabilitas